

**Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh
Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:

TIO YOLANDA R SIMANULLANG

135120207121019



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki
Tjahaja Purnama dalam Perspektif Dramatisme**

SKRIPSI

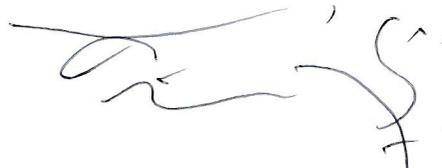
Disusun oleh:

Tio Yolanda R Simanullang

NIM. 135120207121019

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana tanggal 04 Agustus 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Antoni, S.Sos., M.Si
NIP/NIK. 197210102005011002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya**



Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E. M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

all

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Tio Yolanda R Simanullang
NIM : 135120207121019
Tanggal Ujian : 04 Agustus 2017
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Kelas Inggris
Judul Skripsi : Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama dalam Perspektif Dramatisme

TELAH DIREVISI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Antoni, S.Sos., M.Si	
3	Nisa Alfira, S.I.Kom., M.A	
4	Isma Adila, S.I.Kom.,M.A	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62341 575755; Fax : +62-341-570038
Website: www.fisip.ub.ac.id Email: fisip@ub.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 49 /UN10.F11.15/PP/2017

Lampiran : 1 halaman

Perihal : Hasil *Scanning* Plagiasi

Berdasarkan hasil *scanning* terhadap karya ilmiah mahasiswa:

Nama : Tio Yolanda
NIM : 135120207121019
Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rethoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme

Kami selaku tim deteksi plagiasi menyatakan bahwa karya tersebut mempunyai tingkat plagiasi sebesar 3%, sehingga dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan ujian Skripsi pada Jurusan/Prodi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 JUL 2017

Ketua Lab. Komputer FISIP-UB



Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos., MA.
NIK. 201201860915 1 001

f



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145, Telp : 62-341-575755 Fax : +62-341-570038

BIODATA SARJANA BARU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I DATA SARJANA BARU

Nama Lengkap Mahasiswa :

Nomor Induk Mahasiswa :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Warga Negara :

Status Pernikahan :

Alamat Asal (Lengkap) :

(Termasuk RT dan Rw, Propinsi, Kode Pos, Tlp Rumah dan HP) :

II DATA KELUARGA

Nama Ayah :

Nama Ibu :

Pendidikan / Pekerjaan Ayah :

Pendidikan / Pekerjaan Ibu :

III RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Masuk PT - Seleksi :

Tahun :

Seleksi :

Lama Terminal* :

Jurusan / Peminatan :

Memprogram Skripsi di KRS :

Semester :

Tgl / Bln / Tahun :

Penelitian Lapangan :

Mulai :

Selesai :

Lokasi Penelitian :

Ujian Skripsi :

Tgl / Bln / Tahun :

T.A. :

Ruang Ujian :

Jam Ujian :

Yudisium : Tgl / Bln / Tahun :

SK Yudisium :

Nomor Ijazah :

Nilai :

SKS Total :

JML MK :

MS :

Predikat :

IPK :

Gelar yang Diperoleh :

Dosen Pembimbing I :

Dosen Pembimbing II :

Dosen Penguji I :

Dosen Penguji II :

Pelaksanaan Wisuda :

Gelombang :

T.A. :

Judul Skripsi :

foto
3 X 4
(baju putih
celana hitam jas
almamater / putri
: kebaya)

Malang,



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mengetahui karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi sandaran dan pendengar penulis. Pemberi ketenangan dalam kegelisahan, pemberi semangat dalam keterpurukan.
2. Kedua orang tua mama dan papa yang telah memberikan dorongan dan motivasi buat saya baik dalam moril maupun materil.
3. Bapak Antoni, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dengan kesabaran selama penyusunan tugas akhir ini, saya bersyukur mempunyai dosbing seperti Pak Antoni karena selama proses skripsi, beliau sangat banyak memberikan waktu dan kemurahan hati beliau dalam membimbing saya, semoga beliau diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya
4. Ibu Nisa Alfira yang juga banyak membimbing saya pada saat pengumpulan data dan memberikan masukan untuk kerangka berpikir saya. Terimakasih buat Ibu Nisa semoga diberi kesehatan dan umur yang panjang.
5. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bruder Elias, beliau merupakan salah satu dosen filsafat di STFT Pematangsiantar yang bisa menjadi teman diskusi saya pada saat saya dalam tahap pengumpulan data dan melakukan *goodness criteria* di Bab III.

6. Pastor Andriadi Tinambunan, yang selalu memberikan wejangan rohani dan membimbing saya jika saya sedang mengalami kesulitan.
7. Uda Petrus Simanullang, Inanguda Gianty, Bou Miranda beserta adik Gianty, Yenni Sitorus, Yohana dan Miranda, yang merupakan keluarga saya selama saya magang di Jakarta, terimakasih untuk dukungannya dan sudah menganggap saya pribadi sebagai anaknya.
8. Seluruh teman-teman peserta Praktik Kerja Nyata dari berbagai Universitas, diantaranya Universitas Katholik Parahyangan jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara jurusan Hubungan Internasional, Universitas Negeri Semarang jurusan Sastra Prancis terutama Neira Valeria dan Lina Dwi.
9. Sahabat sayang yang selalu berada di samping saya Elyada Naibaho, Cindy Claudia, Winda Munthe serta sahabat LDR saya yaitu Berlian Intan Sitohang dan Hilda Marissa yang selalu menghibur dan menyusahkan saya.
10. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya Malang. Khususnya Inge Ade Zinnia, Sausan Putri Pratiwi, Rulan Suciyanti, I Made Alit Diatmika, dan Avininda Brilyani, Putri Dena Ramadhania. Terima kasih atas dukungan dan bersedia berbagi ilmu. Partner pejuang kampus sejati penulis di kelas Ilmu Komunikasi 2013, See you on top.
11. Kakak senior di jurusan Ilmu Komunikasi yang bersedia memberikan masukan dan saran dalam mengembangkan Skripsi dalam pendekatan dramatisme adalah Mbak Hanum dan mas Muhdanny Yusuf.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sertakan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik saran dan rekomendasi yang berguna serta membangun sangat terbuka bagi penulis dalam rangka perbaikan lebih baik dalam penulisan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Malang, 27 Agustus 2017

Penulis



Tio Yolanda R. Simanullang. (2017). "Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme". Pembimbing: Dr. Antoni,S.Sos.,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini secara teoritik menggunakan pendekatan dramatisme Kenneth Burke. Berfokus pada bahasa politik dan melibatkan interpretasi aktivitas komunikasi pada tokoh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Metode analisis yang digunakan adalah pentad pendekatan *genre political actor and rhetoric* meneliti hubungan antara *scene, act, agent, agency, purpose, attitude*. Hasil penelitian menunjukkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai sosok aktor politik yang berani, dan tegas namun juga humoris, artikulasi bahasa politiknya berfokus terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

Berbagai latar belakang keluarga, organisasi, kepartaian, dan rekam jejak di atas menjadi hal yang unik jika dikaitkan dengan retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Sikapnya yang vokal dan kritisnya mendobrak sekat-sekat ketabuan formal. Ahok seakan tak segan membuka ruang konfrontasi melalui komunikasi politik antar lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif serta tokoh-tokoh masyarakat. Benturan argumen, dengan demikian menimbulkan pertarungan wacana (*clash of argument*), pertentangan, perdebatan sangat dimungkinkan terjadi penyusupan ide dan pesan-pesan politis melalui lakon manipulatif penampilan tokoh politik. Sesuai dengan tujuan dramatisme yaitu memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Aktor Politik dan Retorika, Analisis Pentad, Dramatisme, Basuki Tjahaja Purnama, Komunika Politik

**Tio Yolanda R. Simanullang. (2017). Political Communication Studies Genre
Political Actor and Rhetoric of the Figure Basuki Tjahaja Purnama In
Perspective Dramatism.Supervisor: Dr.Antoni,S.Sos.,M.Si**

ABSTRAK

This research is theoretically using Kenneth Burke's dramatic approach. Focused on the political language and involves the interpretation of communication activities on the character of Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok. The analytical method used is the pentad approach of genre of political actor and rhetoric to examine the relationship between scene, act, agent, agency, purpose. The results showed Basuki Tjahaja Purnama as a figure of political actors are brave, and firm but also humorous, focusing its political articulation language related to law enforcement, democracy, governance clean, transparent and professional.

The various backgrounds of family, organization, party, and track record above are unique in relation to Basuki Tjahaja Purnama's political rhetoric. Vocal and critical attitude to break the taboo of formal barriers. Ahok seemed reluctant to open a confrontation room through political communication between government agencies, legislative, judiciary, executive and public figures. The clash of arguments, thus giving rise to clash of arguments, contradictions, debates are highly likely to infiltrate political ideas and messages through the manipulative plays of political figures. In accordance with the purpose of dramatism is to provide a logical explanation to understand the motives of human action, or why humans do what they do.

Keywords: Dramatism, Hadji Agus Salim, Political Actor and Rhetoric, Political Communication, Pentad Analysis

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tio Yolanda Romauli Simanullang

NIM: 135120207121019

Jurusan: Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

“Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme” adalah benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang mengenai bukan termasuk karya diberi tanda kutipan baik dari pengarang beserta tahunnya serta citasi yang ditunjukkan melalui daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pengggaran atas skripsi saya, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi atau gelar yang saya peroleh.

Malang, 24 Juli 2017

Tio Yolanda R Simanullang
135120207121019

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Komunikasi Politik	25
2.2 Komunikator Politik.....	29
2.3 Retorika Politik	32
2.4 Dramatisme Sebagai Kajian Retorika Baru	37
2.5 Pentad Drama.....	45
2.6 Penelitian Terdahulu	49





2.6.1	<i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	49
2.6.2	<i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burkes term for order in the drama of child seual abuse</i>	50
2.6.3	<i>The Grand Old Man Indonesia (Studi Retorika Dramatisme tentang Komunikasi Politik Genre Political Actor and Rhetoric pada Tokoh Haji Agus Salim)</i>	51
2.6.4	<i>From Counter-strike to Counter-statement using Burke's pentad as a tool for analysing video games</i>	52
2.6.5	<i>Ethnical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President Gerorge W Bush</i>	53
2.6.6	<i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	54
2.7	Keangka Pemikiran.....	56
BAB III METODE PENELITIAN		58
3.1	Jenis dan Tipe Penelitian	58
3.2	Paradigma Penelitian	59
3.3	Fokus Penelitian.....	60
3.4	Sumber Data.....	57
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6	Teknik Analisis Data.....	61
3.7	Teknik Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL.....		68
4.1	Latar Belakang Sosok Basuki Tjahaja Purnama	68
4.2	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Sebelum Menjabat Menjadi Gubernur DKI Jakarta.....	76
4.2.1	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua DPC Partai PIB.....	76
4.2.2	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai pendiri <i>Center for Democracy and Transparancy (CDT 31)</i>	82

4.2.3	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama saat Menjadi Anggota DPR Republik Indonesia	89
4.3	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Saat Menjadi Gubernur DKI Jakarta	93
4.4.1	Komunikasi Politik Basuki Terhadap Partai Gerindra dan DPRD DKI Jakarta	93
4.4.2	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap BPK (Badan Pengawas Keuangan) DKI Jakarta	109
4.4.3	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Komnas HAM	116
4.4.4	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Media	123
4.4.4	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Masyarakat	127
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		137
5.1	Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai <i>political actor</i>	137
5.1.1	Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama.....	139
5.4.2	Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik	140
5.4.3	Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama	142
5.4.4	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Media	123
5.4.4	Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Masyarakat	127
5.3	Basuki Tjahaja Purnama dalam studi Dramatisme	151
5.2.1	Fokus retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama	148
5.2.2	Penebusan Rasa Bersalah	150
5.2.3	Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra	153



5.2.4 Pengkambing Hitaman 159

BAB IV PENUTUP 167

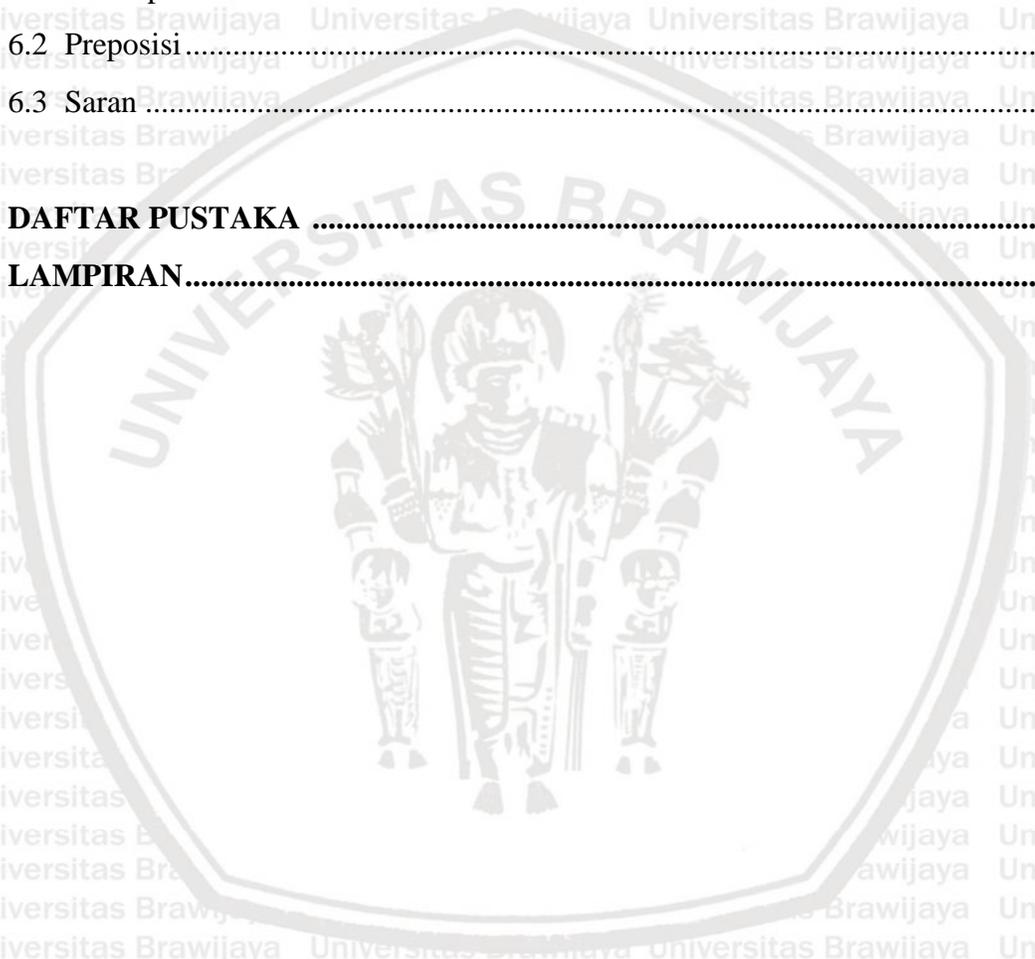
6.1 Kesimpulan 167

6.2 Preposisi 168

6.3 Saran 170

DAFTAR PUSTAKA ix

LAMPIRAN xiv



DAFTAR GAMBAR

2.1 Pentad Burke.....	48
2.2 Gambar kerangka PemikiranParadigma Penelitian.....	56
3.1 Gambar Proses Analisis Data.....	63
5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme.....	153



DAFTAR TABEL

1.1 Tema Utama Kajian Penelitian Komunikasi Politik.....	5
1.2 Tema Kajian Dramatisme	7
5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama	138
5.2. Hasil Temuan Dramatisme.....	147
5.2.1 Hasil Temuan <i>Scapegoat</i>	164



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, Anwar. (2006). *Komunikasi Politik: Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Nimmo, D. (1993). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (7th ed)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, O. U. (1993). *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Denzin & Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: Thousand Oaks Sage Publication
- Gergen, David. (2000). *Eyewitness to Power: The Essence of Leadership Nixon to Clinton*. New York: Simon & Chusters
- Firmanzah. (2008). *Marketing politik: Antara pemahaman dan realitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Griffin, E.M. (2005). *A First Look at Communication Theory (5th Ed)*. London: McGraw-Hill Companies.
- Junaedi, F. (2013). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi, dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Alfian, M.A. (2016). *Mengapa Politik Menarik: Memperbincangkan Urgensi Kepemimpinan Politik*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sehati.
- Santoso, A. (2015). *Hargaku adalah Nyawaku; Basuki Tjahaja Purnama Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Markus. (2013). *Ahok: Koboijakarta Baru*. Jakarta: Visimedia.

- Suyanto,B.(2005). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta; Prenada media
- Kaid,L.L.(2004). *Handbook of political communication research*. USA: Lawrence Erlbaum Associate.
- Levine,Deena.,R&Mara,B.,Adelman. 1993. *Beyond language: Cross Cultures Communication* (2thed). Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall.
- Neuman,W.L.,(2013). *Metode penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta:Indeks
- Qadaruddin,Muhammad (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- McNair,Brian. (2011). *An Introduction To Political Communication*(5thed). New York: Roudtledge
- Littlejohn,S.W. (2008). *Theories of Human Communication* (9thed). Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Qadaruddin,Muhammad (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- West, R. & Turner, L.H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi*. Buku 1 Edisi Ke 3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika

Jurnal :

- Atwater,Deborah.F.(2007). *Senator Barack Obama: The Rhetoric of Hope and the American Dream*. Vol.38, No.2
- Hunt,E.L.(2009). *Plato on Rhetoric and Rhetoricians*.*Quartely Journal of Speech*. 33-53
- Hasan,K.(2009).*Komunikasi Politik dan Pencitraan (Analisis Teoritis Pencitraan Politik di Indonesia)*.Vol.2,No.4.h.1-22
- Jacobs,L.(2017).*Burke's Dramatism Framework: A Lens to Analyse Bullying*.Vol.15, No.6, h.195-201.
- Koehn,V.L.(2011).*Ethical Elitism: A Burkean Analysis of The Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W.Bush* (Disertasi Doktorat, University of Denver). Diakses peneliti dari *Proquest Digital Dissertations*. Vol.15, No.6, h.195-201

- Ivie,R.L.(2009).*The Complete Criticism of Political Rhetoric. Quartely Journal of Speech*. Vol.73, No.1, h.98-107
- Soukup,A.P.(2014).*Communication Research Trends: Political Communication*. Vol.33,No.2,h.2-43
- Rahmanadji,D.(2007). Sejarah, Teori,Jenis, dan Fungsi Humor. Vol.35, No.2, h.1-9
- Xiaoyan, L & Street, N.L.(2009). *The Analysis of Senator Barack Obama's Speech on Race by Kenneth Burke's Idea of Dramatism*. Vol.7, No.1, h.83-92
- Schultz,P.D.(2011).*A Rhetoric of Retribution and Redemption: Burke's terms for order in the drama of child sexual abuse. International Journal of Law and Psychiatry*.Vol.34, h.168-176
- Bourgonjoun,J.,Rutten,K.,Soetart,R.,Valcke,M.(2011).*From Counter-Strike to Counter-Statement: Using Burke's pentad as a tool for analysing video games*.Vol.22, No.2, h.91-102
- Smudde & Courtright.(2011) *A holistic approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*. Vol.37, No.2, h.137-144
- Wilson,N.A.(2008). *Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*.

Skripsi:

- Suparno,B.A.(2010). Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- Massad.(2014). Gaya Komunikasi Menghadapi Resistensi Kebijakan Analisis Wacana Kritis Pernyataan-pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Menghadapi Penolakan Kebijakan Penertiban PKL di Pasar Tanah Abang
- Safitri,D.(2014). Linguistik Politik dan Persuasi Politik "Capres Boneka" dalam Perspektif Dramatistik Kenneth Burke. Jakarta: Universitas Negri Jakarta
- Hanum.(2016). Dari Aktivist Kampus Menuju Gedung Parlemen (Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* tentang Fahri Hamzah). Malang: Universitas Brawijaya

Melinda,D.(2016). Tokoh Berpengaruh Dunia Versi Majalah Time Tahun 1958 (Kajian Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tentang Presiden Soekarno). Malang: Universitas Brawijaya

Yusuf,M.(2016).*The Grand Old Man* (Studi Retorika Dramatime tentang Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric*). Malang:Universitas Brawijaya

Sumber Lain:

Gatranews.(2013). Ahok dan Nur Pamudji Terima Bung Hatta Anti Corruption Award. Diakses pada 27 Februari 2017, dari (<http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/41781-ahok-dan-nur-pamudji-terima-bung-hatta-anti-corruption-award.html>)

Kompas.(2015). Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan. Diakses pada 23 Maret 2017, dari (<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/25/17432131/Ahok.Bongkar.Ajuan.Anggaran.Siluman.DPRD.di.Dinas.Pendidikan>)

Kompas.(2015). Ahok Anggaran Siluman DPRD ada di Semua SKPD. Diakses pada 23 Maret 2017,dari(<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/07410421/Ahok.Anggaran.Siluman.DPRD.Ada.di.Semua.SKPD>)

CNN.(2015). Mediasi Ahok-DPRD Buntu, Dewan; Gubernur Preman. Diakses pada 24 Maret 2015, dari (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150305122022-20-36926/mediasi-ahok-dprd-buntu-dewan-gubernur-preman/>)

Kompas (2016). Kekesalan Ahok terhadap Dinas Pertamanan sampai Terbawa Mimoi. Diakses pada 01 April 2016, dari (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/10/09471181/Kekesalan.Ahok.terhadap.Dinas.Pertamanan.sampai.Terbawa.Mimpi?page=all>)

Detiknews.(2015). Kronologi Ahok VS DPRD dari Dana Siluman sampai Hak Angket. Diakses pada 31 Maret 2017, dari (<http://news.detik.com/berita/2844167/kronologi-ahok-vs-dprd-dari-dana-siluman-sampai-hak-angket>)

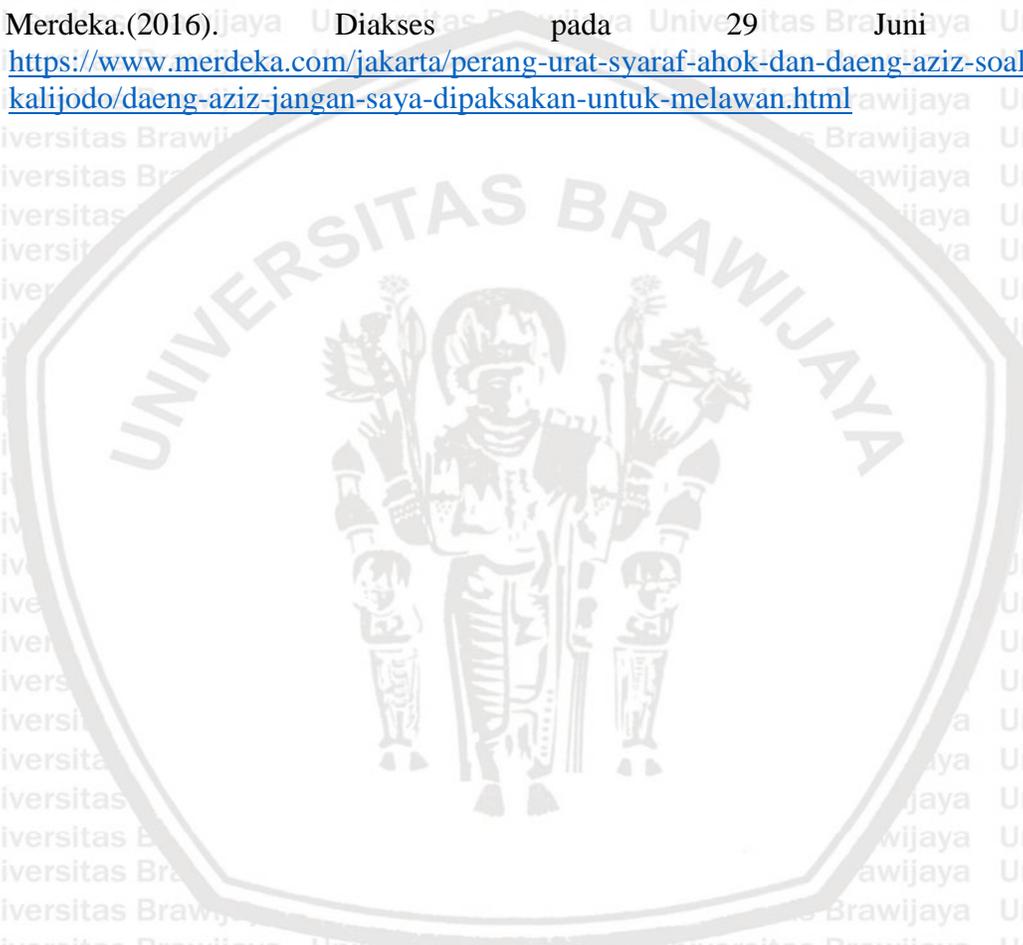
Kuwado.J.F.(2014). Jokowi Apresiasi AhokKeluar dari Gerindra. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/10/14125661/Jokowi.Apresiasi.Keberanian.Ahok.Keluar.dari.Gerindra>

Cahya,D.K.(2015).Alasan Nasdem, Tak Ikut Usung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari,

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/12402911/Alasan.Nasdem.Tak.Ikut.Uసు ng.Hak.Menyatakan.Pendapat.terhadap.Ahok>

Purba,O.D.(2016). Ratna Sarumpaet KPK Menutupi Kebenaran Soal Sumber Waras. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/20/18000381/ratna.sarumpaet.kpk.menutupi.kebenaran.soal.sumber.waras>

Merdeka.(2016). Diakses pada 29 Juni 2017 <https://www.merdeka.com/jakarta/perang-urat-syaraf-ahok-dan-daeng-aziz-soal-kalijodo/daeng-aziz-jangan-saya-dipaksakan-untuk-melawan.html>



DAFTAR TABEL

1.1 Tema Utama Kajian Penelitian Komunikasi Politik..... 5

1.2 Tema Kajian Dramatisme 7

5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama 138

5.2. Hasil Temuan Dramatisme 147

5.2.1 Hasil Temuan *Scapegoat* 164



DAFTAR GAMBAR

2.1 Pentad Burke 48

2.2 Gambar kerangka PemikiranParadigma Penelitian 56

3.1 Gambar Proses Analisis Data 63

5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme 153



BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kajian komunikasi politik pada awalnya berakar pada ilmu politik, meskipun penamaanya lebih banyak dikenal dengan istilah propaganda. Nimmo sepaham dengan ilmuwan politik Mark Roelof mendefenisikan komunikasi politik secara sederhana (Nimmo,2011,h.8) politik merupakan proses komunikasi yang melibatkan ‘pembicaraan’. Terkait hubungan antara komunikasi dan politik menurut Lucian Pye, keduanya memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (dominan) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Galnoor juga menambahkan bahwa ‘tanpa komunikasi’, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik (Cangara, 2011,h.12). Salah satu ilmuan yang memberi kontribusi awal pada studi komunikasi politik, seperti Harold Laswell yang menulis disertasi doktor dengan judul “*Propaganda Technique in the World War*” sebagai perintis penelitian propaganda yang didorong oleh aktivitas seputar dua perang dunia telah menghasilkan fokus kajian terkait motif-motif para komunikator dan simbol-simbol kunci yang menjadi isi pesan (Suyomukti,2013,h.32).

Meski komunikasi politik mulai populer pada tahun 1960, namun studi-studi tentang komunikasi yang memuat pesan-pesan politik telah ada sejak lama (Heryanto & Rumaru,2013,h.5). Perkembangan awal studi komunikasi politik di Eropa dapat dilacak pada tahun 1922 ketika Ferdinand Tonnies menerbitkan *kritik*

der Offentliche Meinung yang meneliti sifat opini publik pada masyarakat massa, dan munculnya karya klasik Walter Lippmann mengenai *Public Opinion* sebagai langkah awal hubungan komunikasi dengan politik mulai membangkitkan kepenasaran tidak hanya jurnalis, tetapi juga politikus, pencari publisitas, dan ilmuwan sosial (Nimmo,2011).

Menurut Dan Nimmo (Rakhmat,2000,h.6) komunikasi politik di Amerika melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara multidisipliner. Walaupun belum ada kesepakatan tentang apa saja yang termasuk komunikasi politik, sebagai sebuah disiplin baru, komunikasi politik telah menunjukkan kehadirannya. Nimmo (2000,h.6) juga mengatakan penelitian tentang komunikasi politik telah berkembang dari kira-kira sejumlah 1000 buah pada tahun 1972 menjadi hampir tidak tercatalogkan pada waktu ini. Dan diskusi-diskusi komunikasi politik tidak lagi terbatas di Amerika, tetapi mulai tersebar juga ke negara lainnya, terutama Eropa.

Begitu pula di Asia, menurut Chu dalam bukunya yang berjudul *Political Communication Research* (Kaid,2004, h.479) komunikasi politik diperkenalkan ke Taiwan pada pertengahan 1950-an, ke Hongkong pada pertengahan 1960-an, dan ke daratan Cina pada awal 1980-an. Negara Asia lainnya, seperti Jepang dan Korea juga memberikan kontribusi besar dalam pengetahuan media massa di Asia. Kaid (2004, h.479) menyatakan riset komunikasi politik di Asia secara umum mendeskripsikan mengenai interaksi antara media dengan negara, kemudian perhatian terhadap efek media dan formasi opini publik. Banyaknya

artikel komunikasi politik berorientasi lebih ke arah hasil pemilu atau topik tentang yang diuji dari sekitar isu-isu komunikasi.

Hasan (2009,h.26) dalam jurnalnya mengatakan bahwa komunikasi politik di Indonesia sendiri sudah dijalankan oleh para aktor politik di era Orde Lama dan Orde Baru, namun kajian komunikasi politik tidak mengalami perkembangan yang berarti sedangkan menurut Alwi Dahlan, itu terjadi karena ilmu komunikasi politik masih dianggap tidak perlu ditelaah secara utuh. Kalaupun diajarkan, mata kuliah di bidang ini tidak dapat memberikan pemahaman yang memadai mengenai proses komunikasi politik. Sementara jurusan komunikasi di berbagai universitas juga belum mendalami komunikasi politik secara khusus. Para ilmuwan komunikasi pun enggan melakukan penelitian yang berkaitan dengan politik, kecuali yang bersifat deskriptif atau normatif (Hasan,2009.h.27).

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam praktek komunikasi politik di IndonesiaKemerdekaan berpendapat dan demokrasi menjadi landasan bagi setiap orang untuk menyeruakan idenya, termasuk bidang politik. Pengolahan citra, persuasi dan retorika politik dilakukan dengan baik oleh para aktor politik untuk memperoleh simpati rakyat. Terkait hal tersebut komunikasi politik harus menempati posisi yang strategis untuk itu dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Karena aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara dapat memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini (Qadaruddin, 2016,h.5).

Riset dibidang Komunikasi Politik tadinya bertumpu pada hal-hal yang bersifat normatif dan kualitatif berdasarkan observasi dan wacana, sementara tingkat generalisasinya sangat terbatas. Tetapi perkembangan metodologi riset di bidang komunikasi politik menyebabkan terjadinya diversifikasi permasalahan, yakni tidak lagi terbatas pada perilaku voting para pemilih saja, melainkan sudah mencakup peta politik, baik berdasarkan hasil pemilu sebelumnya maupun kecenderungan perilaku politik dan pemilih dengan melihat aspek-aspek sosio demografinya, bahasa politik, retorika politik, periklanan politik, propaganda, debat politik, serta sejumlah spesialisasi penelitian yang sedang tumbuh (Canggara,20011,h.398). Hal ini sejalan dengan Nimmo dan Swanson (1990) bahwa sepuluh tahun terakhir ini studi komunikasi politik mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sesudah berembusnya angin demokrasi di negara-negara sedang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian Graber (2005,h.482) selama 4 tahun pada januari 2000 dan berakhir 2003 artikel yang didapatkan dalam 11 jurnal unggulan seperti *American journal of Political Science, Communication Research, Harvard International Journal of Press/Politics, Journal of Communication, Journal of mass Media Ethnics, Journal of Media and Religion, Journal of Media Economics, new Media and Society, Political Communication, Popular Communication, Televison & New Media* dari total 137 artikel semua kontribusi yang dipublikasikan di jurnal topiknya mengenai komunikasi politik. Tabel dibawah ini menunjukkan tema utama yang ditemukan masing-masing artikel tersebut.

Tabel 1.1. Tema Utama Kajian Penelitian Komunikasi Politik

<i>Theme Categories</i>	<i># of article carrying theme</i>
<i>Elections Campaigns</i>	21 (15,3%)
<i>New Media</i>	14 (10,2%)
<i>Civic Engagement</i>	13 (9,5%)
<i>International Relations</i>	12 (8,7%)
<i>Information Processing</i>	9 (6,5%)
<i>Public Opinion</i>	9 (6,5%)
<i>Campaign Advertising</i>	7 (5,1%)
<i>Political Actors & Rhetorics</i>	7 (5,1%)
<i>Media Economics</i>	7 (5,1%)
<i>Popular Culture</i>	7 (5,1%)
<i>Journalism Practices</i>	6 (4,4%)
<i>Framing</i>	5 (3,6%)
<i>Media Bias</i>	4 (2,9%)
<i>Agenda Setting</i>	4 (2,9%)
<i>Comparative Politics</i>	4 (2,9%)
<i>Elections</i>	3 (2,1%)
<i>Talk Radio</i>	3 (2,1%)
<i>Television</i>	2 (1,4%)
Totals	137 (100%)

Sumber : Graber (2005, h. 482)

Jika dicermati tabel 1.1. di atas, menggambarkan bahwa topik utama kajian komunikasi politik yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal unggulan dalam rentang waktu 4 tahun, mulai dari bulan Januari 2000 sampai pada Desember 2003, presentasinya lebih banyak mengenai *Elections Campaigns*, *New Media*, & *Civic Engagement* merupakan tema kajian komunikasi yang menduduki posisi tiga teratas. Sehingga kajian komunikasi politik yang diteliti

para ahli lebih berfokus ke arah isu-isu pemilu dan opini publik, daripada masalah komunikasi.

Padahal jika dilihat dari pengertiannya, bidang komunikasi politik memiliki cakupan yang sangat luas meliputi konstruksi, pengiriman, penerimaan, dan pengolahan pesan yang berpotensi memberikan dampak langsung maupun tidak langsung yang signifikan kepada politik. Pengirim pesan atau penerima pesan bisa saja politisi, wartawan, anggota kelompok kepentingan, swasta, atau warga terorganisir dan elemen utamanya adalah pesan tersebut memiliki pengaruh politik yang signifikan terhadap pemikiran dan perilaku Individu, kelompok, institusi, dan seluruh masyarakat dan lingkungan di Indonesia yang ada mereka (Graber, 2005).

Melalui tabel tersebut, topik *political actor and rhetoric* yang masih sempit perhatian untuk diteliti dan terbukti hanya diteliti sebanyak 7 kali (5,1%). Padahal jika dicermati lagi, aktor politik dan retorika merupakan dua komponen yang penting dalam komunikasi politik. Agar tercapainya tujuan dari tindakan komunikasinya, *political actor* memerlukan retorika untuk dapat menanamkan ide, dan gagasannya di benak khalayak. Dan Nimmo (2008, h.30) mengatakan *political actor* sebagai komunikator politik, baik sebagai politikus, profesional, maupun aktivis perlu memiliki keterampilan retorika yang baik melalui ucapan-ucapan dan gagasan-gagasannya untuk mengubah sikap, cara pandang, kepercayaan khalayak.

Perlunya memberikan perhatian pada bidang studi komunikasi politik *genre political actor and rhetoric* terutama melalui perspektif dramatisme. Di Indonesia sendiri pendekatan dramatisme bukan hanya digunakan untuk *genre political actor and rhetoric* namun dramatisme sebagai kajian retorika baru dulunya fokus retorika tradisional digunakan sebagai instrumen persuasi yang efektif untuk situasi tertentu. Retorika ‘baru’ menekankan fokus yang lebih luas seperti konteks budaya dan struktur umum dari retorika (Bourgounjon,Rutten,Soetart,2011,h.92). Berikut hasil meta riset yang dilakukan peneliti mengenai studi dramatisme di Indonesia.

Tabel 1.2. Tema Kajian Dramatisme

No	Universitas	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Supervisor	Jumlah
1.	Universitas Indonesia	Nur Kholisoh (Disertasi)	2010	Dramatisme Pentas Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia	Tidak tersedia	27.3%
2.		Basuki Agus Suparno (Disertasi)	2010	Konstestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia	Pinckey Triputra	
3		Yosi Winosa (Skripsi)	2014	Dramatisme berita televisi dan Imparsialitas media analisis dramatisme pentad terhadap berita tentang Nazarudin dalam kasus suap wisma atlet pada program metro hari Ini periode Mei Agustus 2011	Ken Reciana Sanjoto	
4.		Muhamad Misbakhudin (Tesis)	2015	Retorika dan persuasi (analisis <i>dramatistic pentad</i> atas pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi perseteruan KPK-POLRI)	Eriyanto	
5.		Ramadhanti Chairunisa (Makalah Non	2014	Dramatisasi Program <i>Reality Show</i> Master Cheff Indonesia di RCTI	Drs. Lilik Arifin,M.Si	

		Seminar)				
6.		Irsa Bastian (Tesis)	2015	Kontestasi Makna Sebutan 'Petugas Partai' Pada Relasi Jokowi dengan Para Politikus	Pinckey Triputra	
7.	Universitas Brawijaya	Rizka Nadya Ayu Marsella (Skripsi)	2015	Strategi Komunikasi <i>twitter influencer</i> dalam Mendapatkan pelanggan (Rhetoric-Dramatism pada akun @shitlicious, @benzbara, @ddycw, @monstreza, @zarryhendrik dalam teks promosi di <i>twitter</i>)	Dr.Antoni.,M.Si & Bayu Indra Pratama, S.I.Kom,M.A	18%
8.		Muhdany Yusuf (Skripsi)	2016	<i>The Grand Old Man</i> Indonesia-Haji Agus Salim (Studi Retorika Dramatisme tentang Komunikasi Politik <i>Genre Political Actor and Rhetoric</i> pada Tokoh Haji Agus Salim)	Dr. Antoni.,M.Si & Nilam Wardasari,S.I.Kom, M.I.Kom	
9.		Nur Mufidatul Hanum (Skripsi)	2016	Dari Aktivistis Kampus Menuju Gedung Parlemen (Studi Komunikasi Politik <i>Genre Political Actor and Rhetoric</i> tentang Fahri Hamzah	Dr.Antoni.,M.Si & Nisa Alfira,M.A	
10.		Rachmad Dhyas S (Skripsi)	2017	Studi Dramatisme pada Video Blog Erix Soekamti	Dr.Antoni.,M.Si	
11.	UPN Veteran Yogyakarta	Intan Kusuma Cahyani	2013	Studi <i>Pentad Analysis</i> Makna Persahabatan Dalam Film Bermula Dari karya Bw Purbanegara	Tidak tersedia	13.6%
12.		Nastasya Gasbela Krisnintyas (Thesis)	2015	Pentad Analysis Film "Gending Sriwijaya" Karya Hanung Bramantyo (Studi Dramatisme)	Tidak tersedia	
13.		Latifah Novitasari, Prayudi, dan Agung Prabowo (Thesis)	2015	Pentad Analisis Pada Film <i>Legend of The Guardians</i>	Tidak tersedia	
14.	Universitas Sumatra Utara	Hanim Farida	2013	<i>Dramatisme</i> kontestan Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Pilgubsu)	Tidak tersedia	9%
15.		Ria Situmorang (Skripsi)	2015	Dramatisme Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko widodo (Analisis Wacana	Prof.Dr.Badauddin,M.Si	

				Pidato Kenegaraan Pertama Presiden RI Joko Widodo Pasca Dilantik dalam Perspektif Dramatisme)		
16.	Institut Pertanian Bogor	Ikhsan Ahmad (Thesis)	2014	Strategi komunikasi pembangunan Pesantren Salafiyah Al Munawar Bani Amin Kabupaten Serang Banten (<i>Pentad analysis</i> , Kennetyh Burke)	Pudji Muljono dan Retno Sri Hartati	4.5%
17.	Universitas Diponegoro	Muhammad Bayu (Jurnal)	2016	Dramatisme Dalam Strategi Penuangan Gagasan Melalui <i>Street Art</i> Komunitas Visual Grafis	Tidak tersedia	4.5%
18.	Universitas Negeri Jakarta	Dini Saffitri (Conference Paper ISKI 2014)	2014	Linguistik Politik dan Persuasi Politik “Capres Boneka Dalam Perspektif Dramatistik Kenneth Burke”	Tidak tersedia	4.5%
19.	Universitas Bakrie	Marti Riani Maghfiroh (Jurnal)	2014	Dramatisme dalam Wacana Pemberantasan Korupsi di Media Online	Tidak tersedia	9%
20.		Yuliana Maryati (Skripsi)	2016	Dramatisme Realitas Kehidupan Masyarakat Kelas Bawah dalam Program <i>Reality Game Show</i> (Studi pada The New Eat Bulaga Indonesia di ANTV)	Dr. Tuti Widiastuti,S.Sos, M.Si	
21.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Stephani Agustina & (Jurnal)	2014	Proses Identifikasi Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang (Studi Kualitatif tentang Upaya Penerimaan Publik dengan Pendekatan Dramatisme Kenneth Burke)	MC Ninik Sri Rejeki	4.5%
22.	Universitas Pasundan	Amalina Vitriara Sari (Thesis)	2017	Perubahan Prilaku Ibu Rumah Tangga yang menonton Sinetron India ‘GOPI’ di ANTV (Studi Kasus Ibu-Ibu Rumah Tangga di Pondok Padalarang Indah RT 04 RW 22)	Dra.Hj.Yulia Segarwati,M.Si.	4.5%
Total Penelitian Dramatisme					22 Penelitian	100%

Sumber: Diolah Peneliti,2017

Berdasarkan tabel di atas, studi Dramatisme yang telah diunggah patut menjadi perhatian, kontribusi Perguruan Tinggi di Indonesia atas tema penelitian pada kajian *political actor and rhetoric* dalam perspektif dramatisme presentasinya masih tergolong sedikit. Di FISIP UB perkembangannya studi dramatisme dari tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 4 penelitian (18%), namun peringkat FISIP UB masih dibawah Universitas Indonesia (UI) yang telah meneliti sebanyak 6 penelitian (27.3%) dan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2010.

Namun FISIP UB telah memberikan kontribusi 2 penelitian pada *Genre Political Actor and Rhetoric*. Hal inilah yang menjadi alasan kuat peneliti untuk mengangkat tema “Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama dalam perspektif dramatisme.”

Meski menurut Graber hanya mengantongi 5,1% namun studi komunikasi politik genre *Political Actors and Rhetorics* sudah banyak berkembang, dan di penelitiannya sudah dipublikasikan. Salah satunya dalam Jurnal Melynk (2011) yang berjudul *Canada and Afganistan: Peacemaking as counter-Insergury Warfare: A study in Political Rhetoric*, membahas retorika yang digunakan politisi Kanada untuk mendukung keterlibatan militer Kanada di perang di Afganistan dari tahun 2001-2011. Studi kasus Afganistan ini mengeksplorasi bagaimana retorika politik bekerja untuk merubah pendekatan militer ke pendekatan politik akan mengurangi tingkat konflik dengan melakukan diskusi politik di kawasan regional untuk memastikan perdamaian Afganistan. Secara khusus juga memperlihatkan retorika politik bekerja untuk mengubah identitas nasional dan

hambatan yang telah dihadapi dalam membuat perubahan mendasar untuk sikap publik yang dibentuk pada tahun sebelumnya.

Penelitian komunikasi politik yang bertema *political actor and rhetoric* juga ada di buku yang berjudul *Eyewitness to Power: The Essence of Leadership Nixon to Clinton* yang ditulis oleh David Gergen (dikutip dari Alfian, 2016, h.26) menyinggung mengenai *political actor* Bill Clinton yang diakui memiliki retorika yang baik, benar-benar muda, cerdas; ia punya kapasitas mental verbal diatas hampir semua orang di panggung publik, yang lebih mengesankan, ia mampu mengumpulkan informasi dari sudut pandang lintas kelompok tidak hanya dari pendukungnya, melainkan kelompok lain, terutama mereka yang biasanya mendapat tempat di meja kekuasaan seperti orang kulit hitam, Hispanik dan perempuan. Ia memiliki kepemimpinan 360 derajat sifat yang semakin penting dimiliki seorang pemimpin dalam dunia yang kompleks dan kemampuan itu sangat memperkuat penilaiannya. Dan terakhir, ia membuat beberapa keputusan politik yang cemerlang. Namun, seperti yang diketahui secara rinci, Clinton juga punya kekurangan dalam karakter yang terus menghantuinya. Bahwa *affairs* Clinton dengan Monika Lewinsky terungkap ke publik bahkan menyeret Clinton ke proses *impeachment*.

Selain jurnal dan buku dari luar, di Indonesia penelitian komunikasi politik *genre political actor and rhetoric* juga sudah pernah dilakukan oleh Melinda (2016) dengan skripsinya yang berjudul Tokoh Berpengaruh Dunia Versi Majalah Time Tahun 1958 (Kajian Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Presiden Soekarno). Melinda melakukan interpretasi terhadap retorika serta

makna yang terkandung dalam teks-teks berupa foto, video, otobiografi, serta pidato Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. Hasil dari penelitian menunjukkan narasi yang dibangun oleh Soekarno melalui kisah yang disampaikan melalui otobiografi dan pidato-pidatonya yang juga didukung bentuk komunikasi nonverbal seperti gaya berpakaian, postur tubuh dan gaya berbicaranya, ia ingin membentuk pandangan atas dirinya serta identitas bangsa Indonesia di mata dunia.

Robert Ivie (2009) dalam jurnalnya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* membahas pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan”. Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan. Memungkinkan reagen yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak.

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Senator Barack Obama: The Rhetoric of Hope and The American Dream*. Penelitian ini

mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama sebagai *political actors*, dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa untuk memilih Obama sebagai Presiden kulit hitam pertama di Amerika dengan pidatonya menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan. Menurut Mulyana (2006), berintikan pandangan bahwa “ketika berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu, setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain.

McNair (2011, h.34) dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Political Communication* bahwa dalam politik dunia modern, pemimpin politik dinilai tidak hanya berdasarkan apa yang mereka katakan, namun juga bagaimana mereka mengatakannya. Dalam pertarungan, aktor harus pandai memerankan peranannya. Bermain dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan. Inilah yang disebut dengan dramatisme dalam komunikasi politik. Metafora “hidup adalah panggung sandiwara,” merupakan dari pendekatan dramatisme Kenneth Burke yang berpikir tentang perilaku politik. Pelaku drama menggunakan bahasa dalam dialog untuk menciptakan dunia dimana tokoh-tokohnya bertindak, seperti pelaku drama, politisi dan warga negara menggunakan bahasa untuk mengatur dunia yang mereka hadapi dan bagaimana

mereka bertindak. Dengan bahasa ini, aktor politik memilah kejadian nyata di dalam dunia yang membentuk pemahan tentang hal tersebut (Kaid & Bacha,2008,h.193).

Satu dari banyak cara manusia mengartikan dunia adalah melalui bahasa dalam bentuk drama begitu pula tokoh politik. Burke berpendapat jika manusia secara otomatis memproses dunianya melalui kategori drama. Dunia adalah drama, panggung adalah produk penyulungan kedua dari drama pengalaman hidup, dramatisme adalah cara manusia berinteraksi dengan bahasanya. Burke begitu tertarik pada tindakan. Ia ingin mengetahui bagaimana bahasa bisa menyelesaikan segalanya. Dia tidak memperhatikan kebenaran, akurasi atau kekuatan strategi. Ia juga tidak menganalisis bahasa sebagai penyampain informasi atau kebenaran, tetapi instrumen bagi setiap tindakan (Turner& West,2007,h.28).

Metode yang digunakan untuk menerapkan dramatisme disebut Burke dengan nama Pentad, yang terdiri dari lima poin atau elemen, yaitu apa yang dilakukan (*act*), dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan (*scene*), orang seperti apa yang melakukannya (*agent*), dengan cara apa melakukannya (*agency*) dan untuk tujuan apa (*purpose*). Sementara itu, kurang lebih dua puluh tahun setelah menciptakan pentad, Burke menambahkan poin baru (keenam) yaitu sikap yang membuatnya menjadi hexad, namun kebanyakan orang masih tetap menyebut metode ini dengan nama pentad. Metode ini menentukan elemen yang memberikan petunjuk terbaik untuk motivasi pembicara (West Turner,2007,h.33).

Adapun tujuan Burke menciptakan pentad yaitu sebagai alat untuk menjelajahi

tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetaert, 2014, h.7).

Di Amerika kefasihan oratoris dalam politik selalu menduduki tempat utama dalam politik Amerika seperti Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, William Jennings Bryan, Albert Beveridge, mereka berjasa dalam membangun tradisi yang kaya dari oratori politik dalam politik Amerika. Di Indonesia sendiri banyak aktor politik yang terkenal dengan retorikanya namun tidak dikaji lebih lanjut motif dan tindakan aktor tersebut dalam berkomunikasi. Berbagai tokoh sangat menarik dan layak untuk diteliti dalam kajian komunikasi politik. Dedikasi dan kontribusi mereka layak untuk diapresiasi agar dapat menjadi rujukan dan contoh bagi tokoh-tokoh dan generasi selanjutnya. Salah satunya aktor politik Basuki Tjahaja Purnama, namanya mencuat di percaturan politik Indonesia. Berasal dari *double minority* yaitu keturunan Tionghoa dan beragama kristen lantas tidak mengurungkan niatnya naik ke pentas politik lokal maupun nasional. Pada 19 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo. Sebelumnya ia menekuni karir politiknya pasca reformasi 1998 menjadi DPRD Belitung Timur pada tahun 2004. Namun tidak lama kemudian ia melenggang ke senayan meniti karir di DPR Komisi II periode 2004-2009. Karir politiknya di DPR Komisi II adalah tempat tempat yang tepat bagi Ahok dalam memperjuangkan aspirasi rakyat mengingat sebagai ‘orang kampung’ melihat banyak permasalahan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan (Santoso,2015,h.113).

Semasa dirinya menjadi anggota Komisi II DPR RI ia sangat vokal dalam menyerukan narasi politiknya. Ia mengkritisi kinerja KPU dan Bawaslu tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya lamban dalam melakukan terobosan upaya menghindari kecurangan dalam pemungutan suara, dan membuat aturan jelas untuk calon yang maju independen sehingga tidak menutup kemungkinan PNS-PNS jujur dan Aktivistis yang ideologis bersaing secara sehat tanpa politik uang. Sikap konsisten yang dipupuknya tersebut sejalan pada saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta ia tidak segan-segan mengkritik Partai pengusungnya Gerindra yang tergabung dalam KMP (Koalisi Merah Putih) yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui perwakilan DPRD. Tanpa basa-basi Ahok kembali melontarkan kritik kerasnya:

“Eksekutif nantinya hanya akan menjadi ‘sapi perah’ anggota dewan, dan kongkalikong politik semakin dahsyat. Gubernur, bupati, atau walikota tidak akan pernah lagi mengurus kepentingan rakyat. Itulah yang terjadi di zaman Orde Baru, DPRD berkuasa.” (Santosa, 2015, h.266)

“Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik. Jangan hanya alasan biaya mahal. Memang lebih murah nyogok anggota dewan; itu mah bukan negarawan, dan pikirannya pengecut.” Kata Ahok geram (MetroTv: Ahok jadi Polemik, 2014)

Dibalik sikap tegasnya, bahkan ekspresi marahnya yang kerap kali menjadi konsumsi publik tertangkap layar kaca, sejatinya Ahok memiliki kepribadian yang sangat humoris (Abimanyu, 2016, h.205). Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor. Kata-kata

satiris pun keluar, Hal tersebut diungkapkannya melalui media nasional, Metro TV acara Stand Up Comedy:

“Kalo kamu memang mau jadi pejabat itu, syaratnya ga susah. Anda Cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu kalo mau jadi pejabat. Pilnya itu agak gede, dia tulisannya PPG, artinya ada dua juga pertama pinter-pinter goblok dan pura-pura gila. Nah tergantung nih, kalo pejabat minumannya yang pura-pura gila ya itu kaya model Saya. Tapi kalo tablet kedua yang diminum yang pintar-pintar goblok. Itu kaya oknum DPRD itu, UPS dibeli begitu mahal!” (Stand Up Comedy, 3 Mei 2015)

Pada tahun 2015 Majalah bisnis *Globe Asia* menobatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai "Man of The Year" edisi Januari 2015

karena dia berasal dari minoritas dan dinilai sebagai fenomena baru aktor politik di Indonesia dengan gaya bicaranya yang keras dan terus terang dan menjadi tonggak sejarah bagaimana kelompok minoritas bisa menduduki salah satu jabatan politik terpenting di Indonesia. Ahok adalah fenomena dalam politik Indonesia bukan hanya karena gayanya yang agresif dan blak-blakan, yang telah menarik banyak pendukung sekaligus pencela. Ahok bahkan disejajarkan dengan Bobby Jindal, seorang keturunan India-Amerika yang sukses menjadi Gubernur Louisiana, AS, juga berkat gaya bicaranya yang keras dan program perombakan birokrasi pemerintah daerah yang tak pandang bulu (JakartaGlobe,2015)

Berbagai latar belakang keluarga, organisasi, kepartaian, dan rekam jejak di atas menjadi hal yang unik jika dikaitkan dengan retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Sikapnya yang vokal dan kritisnya mendobrak sekat-sekat ketabuan formal. Ahok seakan tak segan membuka ruang konfrontasi melalui komunikasi politik antar lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif serta

tokoh-tokoh masyarakat. Benturan argumen, dengan demikian menimbulkan pertarungan wacana, pertentangan, perdebatan merupakan masalah-masalah yang dapat timbul dari persoalan pemaknaan yang dapat menimbulkan teater politik dan drama politik layaknya dunia teater. Untuk itu penelitian ini juga penting karena berusaha untuk mendalami retorika politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor* dilihat dari perspektif dramatisme serta menampilkan aspek-aspek persaingan (kontestasi).

Dalam kehidupan manusia percakapan memang sepintas terlihat sebagai tindak praktis sederhana, di dalamnya ternyata mengandung esensi kontestasi dan representasi kepentingan politis yang sangat substantif. Dengan mengkaji aspek persaingan (kontestasi) dari percakapan-percakapan ataupun benturan argumen sangat dimungkinkan terjadi penyusupan ide dan pesan-pesan politis melalui lakon manipulatif penampilan tokoh politik. Sesuai dengan tujuan dramatisme yaitu memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan (Turner dan West,2007,h.26).

Salah satu disertasi penelitian Suparno (2010) dengan judul penelitian Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia, bahwa melalui kajian dramatisme dapat menganalisis pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap pemaknaan Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini,

tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian lainnya oleh Xiaoyan & Street (2009) juga menggunakan dramatisme dan analisis pentad dengan judul *The Analysis of Senator Barack Obama's Speech on Race by Kenneth Burke's Idea of Dramatism*. Dalam penelitiannya Xiaoyan & Street melakukan identifikasi dan menginterpretasi persuasi retorik dan motif di balik retorika dari pidato Obama yang membahas terkait "ras". Hasilnya menunjukkan bahwa motif dan tindakan komunikasi politik Obama ingin mengurangi kekacauan yang ditimbulkan oleh Wright (pendeta Obama) saat menyinggung masalah ras pada kampanyenya beberapa waktu lalu. Selanjutnya, motif dari pidato Obama adalah karena ia merasa perlu penebusan diri, karena serangan publik terhadap dirinya semakin meningkat.

Penelitian lainnya yang dilakukan Schultz (2011) berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse*. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, khalayak, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label "Predator seksual" yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba. Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggaran mengalami perasaan bersalah dan penebusan, rasa malu menghasilkan

tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban, dan bagaimana sang aktor didorong melakukan pengorbanan untuk mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian.

Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Disertasi penelitian Koehn (2010) *Ethical Elitism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President*

George W Bush menganalisis pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Dalam setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Penelitian yang menggunakan dramatisme pernah dilakukan di Indonesia oleh Muhdanny Yusuf (2016) dengan judul *The Grand Old Man Indonesia* (Studi Retorika Dramatisme tentang Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* pada Tokoh Haji Agus Salim). Dalam penelitiannya Yusuf mengungkap retorika serta motif dari aktivitas komunikasi politik tokoh sejarah Haji Agus Salim saat berada di dalam organisasi politik, pers dan pemerintahan Indonesia pada zaman pergerakan sampai kemerdekaan nasional. Secara khusus melakukan intepretasi terhadap pernyataan, ucapan, sikap, gaya berpakaian (penampilan), pidato, tulisan-tulisan Haji Agus Salim saat menjadi jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif retorika yang dibangun Haji Agus Salim selama zaman pergerakan nasional dan zaman kemerdekaan Indonesia adalah menanamkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pada agama islam meningkatkan kualitas diri bangsa Indonesia, lepas dari penjajahan serta mendorong terbentuknya pemerintahan sendiri dan pemerintahan yang baik di Indonesia serta mengusung islam sebagai dasar sikap nasionalisme dan patriotisme.

Selanjutnya penelitian Hanum (2016) yang berjudul *Dari Aktivis Kampus Menuju Gedung Parlemen* (*Studi Komunikator Politik Genre Political Actor and Rhetoric tentang Fahri Hamzah*). Penelitian ini menyoroti nilai-nilai retorika bertujuan untuk mengungkap bagaimana aktivitas komunikasi dan kekhasan retorika politik dari Fahri Hamzah selama menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melalui perspektif dramatisme. Jenis penelitian yang digunakan Hanum adalah penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan analisis pentad sebagai alat untuk mendeskripsikan. Hasilnya, Hanum menyimpulkan bahwa

Good Governance merupakan isu utama dalam komunikasi Politik Fahri Hamzah, dan kekhasan aktivitas retorika Fahri Hamzah menampilkan dirinya sebagai oposisi atau pengkritik pemerintah, KPK, rekan politik, Metro TV, bahkan presenter Kompas TV dianggapnya menyajikan konten berita yang terkesan memojokkan DPR RI. Hanum dalam penelitiannya juga mengatakan selain Pengkritik Fahri Hamzah juga merupakan politisi Islam yang religius. Untuk itu analisis pentad pada pendekatan *genre political actor* sangatlah efektif untuk mengkaji lebih dalam motif dan tindakan komunikasinya.

Jika dilihat dari berbagai penelitian di atas, studi komunikasi politik *genre political actor and rhetoric* cukup berkembang dan bervariasi. Berbagai tokoh sangat menarik dan layak untuk diteliti dalam kajian komunikasi politik. Dedikasi dan kontribusi mereka layak untuk diapresiasi agar dapat menjadi rujukan dan contoh bagi tokoh-tokoh dan generasi selanjutnya. Basuki Tjahja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok sebagai tokoh politik yang mendapat penghargaan *Bung Hatta Anti Corruption Award* (BHACA) 2013 dari 44 nominator (Gatra News,2013) dinilai sebagai individu yang bersih, tidak menyalahgunakan jabatan untuk menerima suap, serta membuat langkah sistematis untuk menciptakan lingkungan *zero tollerance of corruption* di dalam tubuh pemerintahan. Basuki sebagai aktor politik dinilai menggunakan bahasa politik yang lugas, otentik, apa adanya dan langsung *to the point*.

Dari latar belakang tersebut kajian retorika dan aktor politik sudah semakin berkembang. Namun belum ada penelitian yang secara komprehensif menggunakan variasi data lainnya dalam menganalisis retorika seorang aktor

politik, seperti video dan dokumentasi. Penelitian menarik lainnya dengan melihat latar belakang keluarga Basuki Tjahja Purnama, organisasi, kepartaian, dan rekam jejak di atas menjadi hal yang unik jika dikaitkan dengan retorika politiknya.

Penelitian ini juga penting karena berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana retorika politik Basuki Tjahaja Purnama dilihat dari teori Dramatisme mengenai permainan bahasanya mulai dirinya meniti karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) yang akan dikaji secara luas oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Studi Komunikasi Politik Genre Political Actor and Rhetoric Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana studi komunikasi politik *Genre political actor and rhetoric* tokoh Basuki Tjahaja Purnama sejak meniti karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana studi komunikasi politik *Genre political actor and rhetoric* tokoh Basuki Tjahaja Purnama sejak meniti karir politik di Partai

Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) perspektif dramatisme.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Komunikasi merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan itu mencerminkan kekuatan simbol. Dalam kapasitas ini, manusia menggunakan simbol. Aktor-aktor politik melakukan produksi dan reproduksi pesan-pesan yang menampilkan pernyataan-pernyataan yang persuasif, argumentatif, provokatif, memuji, memaki, mendeskreditkan, dan mengkambinghitamkan. Demikian komunikasi sesuatu yang vital karena communication is power. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan khasanah ilmu komunikasi serta menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang studi komunikasi politik *genre political actor and rhetoric* serta dramatisme sebagai retorika baru dan analisis pentad.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran serta pemahaman mengenai tindakan komunikasi dari seorang *political actor* mengandung retorika dan motif dari penggunaannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada seluruh *political actor* agar lebih meningkatkan kualitas diri dan inovatif

dalam menggunakan bahasa atau retorika, sehingga pesan yang disampaikan secara efektif dan persuasi kepada khalayak.

2. Melalui pendekatan dramatisme, penelitian ini diharapkan dapat membekali seorang *political actor* sehingga dapat menjadi kajian Partai Politik dan Lembaga Konsultan Politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Politik

Chaffe (dalam Kaid,2004,h.13) secara substansial, komunikasi politik biasa dihubungkan dengan pembicara politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun nonverbal, yang dapat mempengaruhi rakyat dan pemegang kekuasaan melalui proses pidato dan debat. Graber & Smith (dalam Soukup 2014,h.2). Bidang komunikasi politik tersebut meliputi konstruksi, pengiriman, penerimaan dan pemrosesan pesan yang berpotensi menimbulkan dampak langsung atau tidak langsung yang signifikan terhadap politik. Sependapat dengan Nimmo bahwa Pengirim pesan atau penerima pesan mungkin saja politisi atau aktor politik, wartawan, anggota kelompok kepentingan, atau masyarakat biasa yang tidak terorganisir. Dan elemen utamanya bahwa pesan tersebut memiliki efek politik yang signifikan terhadap pemikiran, kepercayaan, dan perilaku individu, kelompok, institusi, dan keseluruhan masyarakat dan lingkungan di tempat mereka ada.

Dulu Denton dan Woodward (Ivie,2009,h.99) memahami komunikasi politik pada umumnya sebagai aktivitas yang berorientasi pada “proses” dan berpusat pada “keputusan” yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan segera dari khalayak tertentu yang seringkali hanya dapat dicapai melalui akses media massa. Doris Graber (Canggara,2011,h.30) juga mengingatkan dalam tulisannya *political language* bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga

mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti boikot, protes, dan unjuk ras dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Komunikasi Politik juga memiliki ruang lingkup untuk melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok pada semua tingkatan masyarakat. Untuk itu Krans dan Davis (Ardial,2010,h.29) melukiskan komunikasi politik sebagai proses komunikais massa dan elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap prilaku politik. Dalam hal ini Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan konstruksi realitas politik dalam masyarakat.

Arifin (2006,h.86) menyebutkan tujuan lain dari komunikasi politik untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan, bisa pula mengendalikan pendapat atau tuduhan lawan politik (Ardial,2010,h.40). Pentingnya komunikasi politik untuk membangun citra atau identitas politik yang dilakukan ini berkaitan dengan semua hal yang dilakukan oleh aktor politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan-balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat (Firmanzah,2008,h.257).

Sehingga dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik tidak hanya tentang pemilu, kampanye, dan propaganda saja, melainkan

masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi politik yang dilakukan aktor politik tidak hanya melalui bahasa verbal dan pernyataan tertulis saja, tetapi juga sarana nonverbal seperti pakaian, *make-up*, *hairstyle*, *gesture*, desain logo, dan sebagainya yang semuanya merupakan elemen komunikasi yang bisa dikatakan sebagai citra atau identitas politik (Mulyana,2014,h.76).

Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyak defenisi. Defenisi lain menurut McNair (Hasan,2009,h.25) dalam *An Introduction to Political Communication* mendefenisikan komunikasi politik sebagai *purposeful communication about politic* yang meliputi: *Pertama*, Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, Komunikasi politik ditujukan oleh aktor-aktor politik kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. *Ketiga*, komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatan mereka, seperti temuan dalam berita, editorial dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik. Sebagai disiplin ilmu, maka komunikasi politik menurut McNair (Canggara,2011,h.33) memiliki lima fungsi dasar, yakni:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi pengamatan, dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (*objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai *watchdog* sebagaimana pernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai presiden Amerika, karena terlibat dalam kasus Watergate.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat tersalurkan kepada media massa.

Mulyana mengungkapkan (2013,h.26) Pada masa mendatang komunikasi politik di Indonesia akan semakin menarik khususnya setelah tahun 2014 bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum Presiden, ini sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dalam pemilu 2019, tampaknya Indonesia akan dipimpin oleh generasi baru pasca Orde Baru, meskipun sebagian dari para pemimpin yang lahir dalam Era Reformasi akan tetap berada di panggung politik.

Jumlah massa semakin banyak terutama di kalangan generasi muda, diduga akan bertambah. Ini berarti bahwa *political actor* perlu meningkatkan kepiawaian mereka untuk mempengaruhi rakyat. Rakyat semakin cerdas, karena itu pemimpin yang sekadar pencitraan akan ditinggalkan. Pemimpin yang otentik dan dekat dengan rakyat akan semakin digandrungi.

2.2. Komunikator Politik

Doop (dalam Nimmo,20011,h.30) berpendapat bahwa Komunikator juga memiliki peran dalam proses opini, ia menyarankan agar komunikator politik memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkannya di dalam kepribadian oleh motif untuk berkomunikasi.

Menurut Heryanto dan Rumaru (2013,h.15) komunikator politik merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik kepada pihak lain, baik bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. Komunikator dalam komunikasi politik terdiri atas berikut ini:

1. Politisi : Wakil dan Ideolog

Politisi disebut juga dengan politikus. Politikus dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu politisi wakil dan politisi ideologi. Politikus sebagai wakil adalah komunikator politik yang menjadi perwakilan artikulasi kepentingan politik

individu atau kelompok. Politisi wakil ini biasanya tidak lahir dari proses kaderisasi, melainkan dari posisinya sebagai *vote getter* (*pendulang suara*).

Dengan popularitas atau posisi yang telah ada sebelumnya, politisi wakil diambil dan dijadikan representasi politik kelompok tertentu. Misalnya selebritas, pengusaha, maupun petinggi militer yang tiba-tiba dijadikan figur politik sebuah partai atau orang yang diusung menjadi bupati, walikota, gubernur, dan sebagainya.

Politikus ideolog adalah komunikator politik yang menjadi kader ideologi dan representasi nilai-nilai normatif yang diusung oleh individu atau kelompok politik biasanya berdasarkan sebuah proses kaderisasi yang panjang. Politikus tipe ini adalah orang yang bercita-cita untuk atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Yang jelas bagi politisi jenis ini, berpolitik sesuai dengan nafas ideologi yang dia yakini jauh lebih penting daripada kepentingan pragmatisnya.

Sementara itu, menurut Daniel Katz (dalam Nimmo, 2011, h.31) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berkenaan dengan sumber keuangan kepentingan politikus pada proses politik. Kedua tipe ini, yakni:

- a. Politikus ideologi adalah orang-orang yang dalam politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik, mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepada tuntutan seorang langganan atau kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan

tujuan kebijakan yang lebih luas mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara.

- b. Politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan diri atau kelompoknya. Politikus tipe ini biasanya tidak menjadi loyalis partai tertentu, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, meski suatu saat harus bertentangan dengan prinsip-prinsip normatif partainya.

Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintahan adalah para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya), pejabat legislatif (Ketua MPR/DPR/DPD, ketua fraksi anggota MPR/DPR/DPD, dan sebagainya), dan yudikatif (ketua Mahkamah Agung, ketua anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, dan sebagainya).

Dalam penelitian ini, Basuki Tjahaja Purnama sebagai komunikator politik dalam lingkup eksekutif yang menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja purnama juga termasuk ke dalam politikus ideologi karena ia merupakan produk dari proses kaderisasi, meniti karir politik yang dimulai menjadi ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Selanjutnya pada tahun 2009, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencalonkan diri dan terpilih menjadi

anggota DPR RI, duduk di Komisi II. Namun belum habis masa jabatannya, Ahok mendapat pinangan dari Partai Gerindra untuk maju menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo, mantan walikota Solo untuk periode 2012-2017. Di Partai Gerindra Ahok juga sempat menjabat menjadi Ketua DPP Bidang Politik. Pada 2014 Joko Widodo mendapat mandat untuk maju dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. secara otomatis Ahok mengisi kekosongan Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada tanggal 19 November sampai sekarang.

2.3. Retorika Politik

Jika ditelusuri dari sejarah ilmu pengetahuan, komunikasi politik sudah dikenal sejak zaman Cicero dan Aristoteles. Minat terhadap hubungan antara komunikasi dan politik secara sistematis telah dimulai dengan karya-karya kaum sophis di Yunani. Kaum sophis merupakan kaum yang menggagas ide demokrasi dan pemerintahan yang mewakili rakyatnya karena itulah pada masa itu, muncul seni berpidato dalam rangka mewarnai proses politik demokrasi dan pandangan-pandangan mengemuka oleh Aristoteles dalam karyanya "*Politic and Rhetoric*". (Suyomukti,2013,h.24).

Aristoteles (dalam Suyomukti,2013,h.28) menjadikan retorika sebagai konsep yang realistis. Baginya retorika dapat berarti; *Pertama*, seni persuasi melalui pernyataan logis; *Kedua*, suatu uraian yang harus singkat, jelas dan menakutkan; *Ketiga*, menggunakan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki (*corrective*); memerintah (*instructive*); mendorong (*suggestive*), dan mempertahankan (*defensive*). Aristoteles (Hunt,2009,h.40) juga menulis di dalam

buku ketiganya bahwa tidaklah cukup untuk mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi juga perlu untuk mengetahui bagaimana mengatakannya, dan seni mengatakan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam menanamkan warna tertentu untuk pidato.

Dalam buku *Theories of Human Communication* dikatakan bahwa studi retorika sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu komunikasi. Karena kajian retorika secara umum didefensikan sebagai simbol yang digunakan manusia. Pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Kemudian, berkembang sampai meliputi proses *adjusting ideas to people and people to ideas* dalam segala jenis pesan. Fokus dari retorika telah diperluas bahkan telah mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal (Littlejohn, 2009, h. 73).

Kajian retorika erat hubungannya dengan kajian komunikasi politik. Untuk itu penggabungan antara retorika dalam ranah politik akhirnya memunculkan pembahasan mengenai retorika politik. Pemahaman bahwa retorika merupakan seni berbicara (*art of speech*) jika dikaitkan dengan politik maka seperti pernyataan Denton dan Woodward (Ivie, 2009, h. 1987) retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, retorika politik dikarakteristikan melalui tujuan jangka pendek, tujuan tertentu, tenggat waktu dekat, konsensus mencari taktik.

Sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan

manipulasi simbol politik. Semua bentuk komunikasi politik cocok dengan konsep retorika atau pidato, yang secara harfiah berarti berbicara daripada kategori yang meliputi kampanye iklan, televisi, dan sebagainya, sehingga tidak mengeherankan jika retorika merupakan salah satu area kunci dalam kajian komunikasi politik (Soukup, 2014, h. 8).

Dalam karyanya *Rhetorica*, Aristoteles juga membagi retorika (termasuk retorika politik) ke dalam tiga jenis: (1) *retorika deliberative*, yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah; (2) *retorika forensic*, yaitu retorika yang berkaitan dengan pengadilan, dengan fokus pembicaraan pada masa lalu yang berkaitan dengan keputusan pengadilan, (3) *retorika demonstrative*, yaitu retorika yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat. Retorika politik pada umumnya menggunakan retorika demonstratif untuk mempengaruhi khalayak (Arifin, 2010, h. 216).

Soukup (2014, h. 8) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Retorika merupakan jantung dari kajian komunikasi politik. Hal tersebut sudah di kritik dan dijelaskan oleh Plato dan Aristotle sebagai seni persuasi. Sehingga tujuan retorika membangkitkan kesadaran ataupun perasaan audiens pada sebuah isu sosial. Seni retorika termasuk wacana deliberatif dan persuasif untuk memandu pengambilan keputusan di tubuh politik (Soukup, 2014, h. 2). Dalam Griffin (2006, h. 321) Aristoteles menyebutkan ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia:

(1) *Ethos*, komunikator harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan

status. Sisi Ethos, menurut Aristoteles mengatakan bahwa tindakan retorika tidak hanya cukup berbekal argumen yang menyakinkan belaka melainkan juga harus mampu menampilkan sosok komunikator sebagai komunikator yang kredibel dan terpercaya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kredibilitas komunikatir bisa diperoleh dengan menampilkan karakteristik yaitu: (a) *intelligence*, bukan dalam arti kecerdasan otak atau kepintaran, melainkan diartikan sebagai persepsi khalayak terhadap ada tidaknya kesamaan pandangan antara komunikator dengan khalayaknya terhadap isu yang disampaikan. (b) *character*, upaya yang dilakukan komunikator membangun citra tentang dirinya sebagai sosok yang jujur, bermoral dan dapat dipercaya. (c) *goodwill*, persepsi khalayak bahwa komunikator yang tengah beretorika memang benar memiliki niat yang tulus dan berbuat “kebaikan (*good intentions*) serta tidak dicurigai memiliki agenda-agenda tersembunyi untuk memenangkan hati khalayaknya (Griffin,1997,h.303).

(2) *Pathos*, komunikator harus menyentuh hati khalayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka yang kemudian oleh para ahli retorika modern disebut sebagai emotional appeal.

(3) *Logos*, pembicara menyakinkan pendengar/khalayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Pendekatan yang dipakai menggunakan logika.

Dalam penggunaan retorika, komunikator alangkah baiknya mengetahui prinsip atau unsur dasar retorika agar pesannya dapat mempersuasi khalayak.

Seperti yang tertulis dalam Littlejohn & Karen Foss (2009, h.73), pusat tradisi retorika terdiri dari lima kanon atau unsur retorika yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Berikut adalah penjelasannya:

- a) Penemuan (*invention*) adalah mengacu pada konseptualisasi proses saat kita temukan pada apa yang telah ada, tetapi menciptakannya melalui penafsiran dari kategori-kategori yang kita gunakan. Penemuan dimaknai secara luas sebagai *body of information* untuk itu kanon yang pertama ini berhubungan erat dengan *critical thinking* (West & Turner,2007,h.343)
- b) Penyusunan (*arrangements*) adalah pengaturan simbol-simbol menyusun informasi dalam hubungannya dia antara orang-orang, simbol-simbol, dan konteks terkait.
- c) Gaya (*style*) hal ini berhubungan dengan semua anggapan terkait dalam penyajian dari semua simbol sampai makna yang kita berikan pada semua simbol tersebut, sebagaimana dengan semua sifat dari simbol, mulai dari kata-kata dan tindakan sampai pada busana dan perabotan. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful*. Selain itu Aristoteles menyarankan penggunaan metafora untuk membantu audience memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami (West & Turner,2007,h.346)

d) Penyampaian (*delivery*) adalah perwujudan dari simbol-simbol dalam bentuk fisik, mencakup pilihan nonverbal untuk berbicara, menulis, dan memediasikan pesan.

e) Daya ingat (*memory*) tidak lagi mengacu pada penghafalan pidato, tetapi dengan cakupan yang lebih besar yaitu mengingat, menyimpan dan mengolah informasi.

Hasil analisis Ardizzone dan Lauerbach (dalam Zaleska,2012,h.2) sumber sumber yang memungkinkan memenuhi syarat wacana aktor politik yaitu politisi, para kandidat, dan partai politik. Yang dianggap wacana politis adalah pidato yang berasal dari seseorang yang dianggap politisi. Sehingga penelitian utama pada retorika politik membahas masalah yang terang-terangan melibatkan hubungan kekuasaan, legitimasi, persaingan kepentingan dan hak-hak kelompok sosial yang besar, kriteria yang berbeda dan nilai-nilai, serta kebutuhan untuk mengambil keputusan konsekuensial (Zaleska, 2012, h.3).

2.4. Dramatisme sebagai Kajian Retorika Baru

Foss berpendapat bahwa Kenneth Burke sering dianggap sebagai salah satu dari Bapak pendiri ‘tradisi retorika baru’. Ia berpendapat Beranjak dari retorika tradisional yang dulunya fokus retorika digunakan sebagai instrumen persuasi yang efektif untuk situasi tertentu. Retorika ‘baru’ menekankan fokus yang lebih luas seperti konteks budaya dan struktur umum dari retorika. Sekarang berfokus cara melihat motif dari bahasa dan penggunaannya oleh komunikator

dari tindakan manusia karena manusia menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi (Bourgounjon,Rutten,Soetart,Valcke,2011,h.92).

Teori ini banyak dipengaruhi oleh interaksi simbolik. Teori ini memfokuskan pada diri dalam suatu peristiwa yang ada dengan menggunakan simbol komunikasi. Dramatisme memandang manusia sebagai tokoh yang sedang memainkan peran mereka, dan proses komunikasi atau penggunaan pesan dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita tertentu (Denzim,1992,h.145). Untuk itu drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk tiga alasan (West & Turner,2007,h.27):

- a) Drama mengindikasikan cakupan yang luas, tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasari pada interaksi atau dialog. Dalam dialognya, drama menjadi model hubungan dan menjadi penerangan pada hubungan.
- b) Drama cenderung mengikuti tipe-tipe atau *genre* yang mudah dikenali komedi, musical, melodrama, dan lainnya. Burke merasa bahwa cara seseorang membentuk dan menggunakan bahasa dapat berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. Burke berargumen bahwa pola berulang yang menggarisbawahi suatu teks menjelaskan bagaimana teks tersebut menggerakkan kita.

c) Drama selalu ditujukan kepada khalayak. Dalam hal ini drama bersifat retoris. Burke memandang sastra sebagai “peralatan untuk hidup,” artinya bahwa literatur atau teks yang berbicara pada pengalaman hidup orang serta masalahnya, memberikan orang bereaksi untuk menghadapi pengalaman ini.

Brumett (Griffin, 2005, h.303) menyebutkan asumsi teori dramatisme sebagai ontologi simbolis dikarenakan penekanannya pada bahasa. Ia mengingatkan bahwa “hasil terbaik yang dapat dilakukan seseorang, dalam mencari inti dari pemikiran Burke adalah menemukan sebagian ontologinya, dasar bagi kebanyakan bagian. Bagi Burke, orang umumnya melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan dunia kebanyakan adalah seperti itu adanya, karena sifat dasar dari sistem simbol itu sendiri. Gambaran mengenai tiga asumsi teori dramatisme berikut ini adalah:

1. Manusia adalah hewan yang menggunakan simbol
2. Bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia
3. Manusia adalah pembuat pilihan

Asumsi pertama berbicara tentang hal yang kita lakukan dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Ide bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol menggambarkan sebuah ketegangan dalam pemikiran Burke. Seperti yang diamati oleh Brummett, asumsi terombang-ambing antara kesadaran bahwa beberapa dari yang kita lakukan dimotivasi oleh sifat naluriah hewan dan beberapa oleh sifat

simbolik. Dari semua simbol yang di gunakan manusia, bahasa adalah yang paling penting bagi Burke (West& Turner, 2013, h.28).

Asumsi kedua (mengenai pentingnya bahasa), posisi Burke cukup mirip dengan prinsip relativitas linguistik yang dikenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf.

Mereka menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Jadi, orang dibatasi (dalam batasan tertentu) dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Bagi Burke, seperti halnya Edward Sapir dan Benjamin Whorf, ketika orang menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tersebut. (Nimmo, 2006, h.95). Bahwa aspek bahasa di dalam dramatisme sebagai sesuatu yang penting, karena ia merupakan *the art of delivery* sehingga tampak siapa-siapa yang berbicara manis kemudian pahit, dan sebaliknya. Karakter-karakter ini mengungkapkan tindakan-tindakan utama di dalam cara yang berbeda-beda yang menunjukkan kepentingan yang berbeda (Suparno,2012,h.9).

Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilakukan Suparno (2010) judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia,” bahwa melalui kajian dramatisme dapat menganalisis pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk

pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Untuk itu Corcoran (1990,h.51) mengatakan bahwa bahasa politik di dalam konteks simbolik yang lebih luas terhadap oposisi, distingsi dan diferensiasi memunculkan narasi terhadap perselisihan, kontestasi, dan pertarungan. Di manapun ada paksaan (*coersion*), resistensi (*resistance*), dan kekerasan (*violence*), di sana akan ada relevansi intuitif terhadap tatanan politik, apakah luas atau sempit didefinisikan di antara atau di tengah-tengah istilah-istilah yang saling berkontestasi di dalam wacana politik. Di dalam kontestasi ada empat hal penting yang merupakan ciri pokoknya (Suparno,2012,h.8).

1. Apakah setiap aktor (*agent*) menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi
2. Kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra.
3. Melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi (kontroversi makna). Hal ini berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif dari isu yang menjadi sumber kontroversi.
4. Kontestasi dapat dicermati dari karakteristik dan sejarah keyakinan serta kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan di dalam kontestasi tersebut.

Sesuatu tidak dapat disebut sebagai drama tanpa menggunakan sejumlah situasi yang ditandai dengan konflik (Burke,1966h.29). Situasi (*scene*) itu diperlukan untuk memperlihatkan adanya panggung drama yang menunjukkan adegan-adegan (*acts*), munculnya masalah-masalah sebagai sumber motivasi yang membentuk plot atau alur (Burke,1966,h.29). Plot itu sendiri merupakan bentuk dasar dari setiap babak suatu drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of the incidents*) (Fergusson, 1961,h.14).

Untuk itu Kenneth Burke (1945) berpendapat bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri. Ia harus dijelaskan di dalam konteks di mana ia berada. Makna kata ditentukan oleh konteks yang menyertainya, yakni dibatasi oleh konteks kata (*verbal context*) dan konteks situasi (*context of situation*). Melalui konteks verbal dan konteks ekstra verbal (*extraverbal context*) kata dapat ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk pernyataan yang memiliki makna yang berbeda-beda.

Burke juga percaya bahwa drama kehidupan dimotivasi oleh rasa bersalah, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban, dan bagaimana sang aktor didorong melakukan pengorbanan untuk mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya (Schultz,2011,h.176). Menurut Burke terdapat pola atau siklus terkait menghilangkan rasa bersalah tersebut, antara lain (West& Turner, 2008,h. 31-33):

a. Tatanan atau hierarki

Tatanan atau hierarki merupakan peringkat yang ada dalam masyarakat, terutama kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa sehingga kategori ini membentuk hierarki sosial. Seringkali seseorang merasa bersalah karena posisinya di dalam hierarki. Jika mempunyai kelebihan, ia mungkin merasa memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan mereka yang tidak punya dan perasaan inilah yang menimbulkan rasa bersalah.

b. Negativitas

Negativitas adalah perasaan menolak tempat seseorang dalam tatanan sosial memperlihatkan resistensi. Burke mengatakan demikian karena simbol yang diciptakan oleh seseorang memungkinkan dirinya untuk membayangkan kesempurnaan. Ia selalu merasa bersalah mengenai perbedaan antara kenyataan yang sesungguhnya dan kesempurnaan yang dapat di bayangkan.

c. Pengorbanan (*victimage*)

Pengorbanan adalah cara individu berusaha memurnikan diri dari rasa bersalah yang di rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Ada dua tipe dasar pengorbanan/memurnikan rasa bersalah. Pertama adalah mortifikasi (*mortification*). Mortifikasi adalah salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan dirinya sendiri. Kedua adalah pengkambinghitaman (*scapegoating*) yaitu salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah, dengan mencari faktor

eskternal yang bersalah sebagai penyebab kenapa sesuatu yang diharapkan tidak terjadi.

d. Penebusan

Penebusan adalah langkah terakhir dalam proses ini yang berarti penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Kunci tahap penebusan adalah fakta bahwa rasa bersalah hanyalah dihilangkan secara sementara. Saat tatanan dan hierarki di bangun kembali, rasa bersalah kembali menjangkiti kondisi manusia.

Menurut Burke (Koehn,2011,h.15) Retorika tidak bisa lepas dari identifikasi karena mempersuasi seseorang hanya sejauh kita dapat berbicara melalui bahasa, gesture tubuh, intonasi, sikap, ide. Dengan demikian retorika tidak akan berhasil jika tidak dapat menemukan kesamaannya dengan pendengarnya. Burke juga berpendapat bahwa manusia menciptakan dan memanipulasi sistim simbolik dimana kita membangun tindakan kita. Dari sudut pandang ini, diri adalah konstruksi sosial dan interaksi manusia adalah sebuah proses negosiasi antara aktor yang terlibat dalam pertunjukkan peran, sebuah drama tergantung pada simbol yang dibangun secara sosial dan turunannya. (Schultz,2011,h.171).

Membandingkan kehidupan dengan sebuah pertunjukan dan menyatakan bahwa sebagaimana dalam sebuah karya teatrical, kehidupan membutuhkan adanya seorang aktor, sebuah adegan, beberapa alat untuk terjadi pada adegan itu,

dan sebuah tujuan. Teori ini memungkinkan kritikus retorik untuk menganalisis motif pembicara dengan mengidentifikasi dan mempelajari elemen-elemen ini.

Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan.

Selanjutnya Burke percaya, rasa bersalah adalah motif utama bagi pembicara, dan dramatisme menyatakan bahwa seorang pembicara akan menjadi lebih sukses ketika mereka memberikan khalayaknya cara untuk menghapuskan rasa bersalah mereka (Turner & West, 2007, h.26).

Dramatisme ditandai dengan sejumlah situasi (*scene*) konflik dengan situasi-situasi yang berbeda yang disimbolisasikan dalam bentuk plot atau alur.

Plot merupakan bentuk dasar setiap babakan drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of incidents*). Bahasa dalam drama merupakan tindakan simbolik dan berfungsi sebagai *the art of delivery*. Analisis dramatisme negatisme melalui berbagai simbol. Atas dasar pokok-pokok konseptual dan gagasan tersebut, Burke sebagai pencetus teori dramatisme merekomendasikan sebuah metode penelitian terhadap teori ini, yakni *Pentad Analysis* (Ahmad, 2014, h.21).

2.5. Pentad Drama

Selain dramatisme, Burke juga mengembangkan pentad drama sebagai metode yang mempelajari bentuk aktivitas simbolik untuk memahami tindakan manusia (Bourgonjon, Rutten, Soetart, Valcke, h.93). Pentad drama sebenarnya sama dengan standar praktik jurnalistik yang menjawab siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana di awal cerita. Karena Burke menganggap dirinya

sebagai interpreter dan bukan wartawan, ia tidak puas hanya untuk label lima kategori (Griffin, 2005: 302). Namun Burke menambahkan poin yang keenam, sikap, pada pentad ini membuatnya menjadi hexad, meskipun kebanyakan orang tetap menyebutnya sebagai pentad (West & Turner, 2008, h.33).

Ahmad (2014) berdasarkan tesisnya yang berjudul Strategi komunikasi pembangunan Pesantren Salafiyah Al Munawar Bani Amin Kabupaten Serang Banten (analisis pentad) tertarik menggunakan pentad karena pentad didesain untuk menunjukkan jalur terhadap relasi-relasi kepentingan dan motif-motif humanistik serta fungsi-fungsi dari istilah-istilah yang dipakai manusia. Pentad menawarkan sebuah cara untuk menentukan mengapa tiap tindakan individu di dalam suatu kejadian atau konteks tertentu menyeleksi strategi komunikasi di dalam memberikan pernyataan-pernyataannya di dalam mengidentifikasi situasi yang dihadapinya. Tujuannya memberi perhatian terhadap unsur-unsur *act*, *agent*, *scene*, *agency*, dan *purpose* yang ditujukan untuk menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi simbol yang mereka desain, bekerja di dalam motif-motif dari tindakan simbolik tersebut.

Menurut Burke dalam (West & Turner, 2007, h. 33) terdapat lima elemen poin utama dari pentad dramatisme, yaitu:

1. Tindakan (*act*)

Burke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang.

Tindakan merupakan aksi yang mengambil peran dalam kisah atau pernyataan yang diberikan oleh pembicara untuk menunjukkan apa yang disampaikan pembicara kepada khalayaknya. Tindakan memainkan peranan yang sangat

penting dalam pentad dramatisme ini. Dalam pidato hal ini menunjukkan komitmen realisme, contohnya : kampanye akbar yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif.

2. Adegan (*scene*)

Adegan merupakan konteks yang melingkupi tindakan. Adegan juga merupakan *setting* atau latar belakang dari tindakan yang dilakukan dan bagaimana *setting* memberikan efek terhadap pesan termasuk dalam adegan ini adalah konteks yang *immediate* (segera) dan konteks sejarah dan situasi sosial dimana tindakan tersebut terjadi. Berbicara di depan umum menekankan pengaturan dan keadaan, merendahkan kehendak bebas dan refleksi sikap determinisme situasional. Contohnya: masa kampanye pemilu calon anggota legislatif atau masa pemilu.

3. Agen (*agent*)

Agen merupakan seseorang atau orang-orang yang melakukan tindakan. Beberapa pesan dipenuhi dengan referensi diri, pikiran, jiwa, dan tanggung jawab pribadi. Fokus terdapat pada karakter dan agen sebagai instigator yang konsisten dengan filosofi idealisme. Contohnya: calon anggota legislatif dalam pemilu.

4. Agensi (*agency*)

Agensi merujuk pada cara-cara yang di gunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Bentuk-bentuk agensi yang mungkin mencakup strategi pesan, penceritaan kisah, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan seterusnya. Penjelasan panjang tentang metode atau teknik mencerminkan

pendekatan "get-the-job-done" yang bersumber dari pola pikir pembicara yang pragmatism, contohnya: pidato memukau yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif.

5. Tujuan (*purpose*)

Tujuan merujuk pada hasil akhir yang ada di dalam benak agen untuk tindakan yaitu, mengapa tindakan dilakukan. Tujuan dari lakon baik merupakan tujuan yang eksplisit maupun implisit. Tujuan merupakan alasan dibalik aksi yang dilakukan oleh aktor komunikasi. Tujuan dalam pesan menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak pembicara kesatuan atau makna utama dalam kehidupan, yang umumnya disebut kepentingan misticisme. Contohnya: perolehan suara atau kemenangan dalam pemilu anggota legislatif.

6. Sikap (*attitude*)

Merujuk pada cara di mana seorang aktor memosisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Contohnya ketika menggunakan pentad untuk menganalisis sebuah interaksi simbolik, penganalisis pertama-tama menentukan semua elemen dari pentad dan mengidentifikasi apa yang terjadi dalam suatu tindakan tertentu. Setelah memberikan label pada poin-poin dari pentad dan menjelaskan semuanya secara menyeluruh, peneliti kemudian mempelajari rasio dramatik (*dramatistic ratio*) atau proporsi dari satu elemen bila dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Sehingga dengan menganalisis rasio ini, peneliti mampu menemukan elemen yang paling dominan atau berpengaruh (West & Turner, 2008, h. 34)

Gambar 2.1 Pentad Burke



Sumber: West & Turner, 2008, h.34

2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memasukkan penelitian yang pernah meneliti kajian komunikasi politik bertema *political actor and rhetoric* dan juga yang menggunakan teori dramatisme serta analisis pentad sebagai metode analisisnya. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan menjadi pembelajaran penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

2.6.1. Senator Barack Obama: *The Rhetoric of Hope and The American Dream*.

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui "*Politic of Hope*"

menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat. Meskipun kesamaan terkait studi *political actor and rhetoric*, terdapat perbedaan antara penelitian Atwater dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian dan jenis penelitian. Atwater menggunakan analisis isi pidato sedangkan peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menggunakan analisis pentad drama.

2.6.2. *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse*

Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse*. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, khalayak, badan legislatif, dan LSM.

Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan

diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penebusan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama.

2.6.3. *The Grand Old Man Indonesia* (Studi Retorika Dramatisme tentang Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* pada Tokoh Haji Agus Salim

Penelitian yang menggunakan dramatisme pernah dilakukan di Indonesia oleh Muhdanny Yusuf (2016). Dalam penelitiannya Yusuf mengungkap retorika serta motif dari aktivitas komunikasi politik tokoh sejarah Haji Agus Salim saat berada di dalam organisasi politik, pers dan pemerintahan Indonesia pada zaman pergerakan sampai kemerdekaan nasional. Secara khusus melakukan intepretasi

terhadap pernyataan, ucapan, sikap, gaya berpakaian (penampilan), pidato, tulisan-tulisan Haji Agus Salim saat menjadi jurnalis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif retorika yang dibangun Haji Agus Salim selama zaman pergerakan nasional dan zaman kemerdekaan Indonesia adalah menanamkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pada agama islam meningkatkan kualitas diri bangsa Indonesia, lepas dari penjajahan serta mendorong terbentuknya pemerintahan sendiri dan pemerintahan yang baik di Indonesia serta mengusung islam sebagai dasar sikap nasionalisme dan patriotisme.

Terdapat banyak kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Mulai dari sama-sama mengambil tema *political actor and rhetoric*, jenis penelitian kualitatif dan juga sama-sama menggunakan teori dramatisme serta analisis pentad sebagai metode analisisnya. Letak perbedaan hanya pada objek penelitian jika Yusuf mengenai tokoh sejarah Indonesia Haji Agus Salim sedangkan peneliti objeknya seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama.

2.6.4. From Counter-strike to Counter-Statement using Burke's pentad as a tool for analysing video games

Dalam penelitiannya Bourgonjon, Rutten, Soetart, Valcke (2011) bertujuan menganalisis proses antara gamers dan permainan mereka menggunakan analisis pentad drama pada *video games Bioshock* memperlihatkan berbagai konflik dramatis melalui dialog yang ditampilkan dengan *prosedural rhetoric* dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku pemain dalam bertindak sebagai

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dengan segala kosekuensinya dari pilihan pemain. Atlas sebagai guide permainan yang berargumen bahwa pemain membutuhkan ADAM (amunisi) dengan memanfaatkan anak-anak sedangkan Tenenbaum ditunjukkan sebagai seorang wanita yang memberikan instruksi humanis dan bermoral untuk tidak memanfaatkan anak-anak sebagai media untuk mendapatkan ADAM dengan membunuhnya.

Hasil penelitian ini menggunakan pentad drama menunjukkan bahwa retorika dari sebuah drama dari berbagai perspektif yang ditujukan kepada pemain dapat mempengaruhi tindakan dan motivasi berpikir pemain. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, bergantung kepada aktor dalam mengambil tindakan. Kesamaan penelitian ini dengan milik peneliti sama-sama menggunakan analisis pentad drama. Perbedaannya pada objek penelitian dan peneliti menggunakan kajian komunikasi politik *genre political actor and rhetoric*.

2.6.5. *Ethical Elitism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush*

Disertasi penelitian Koehn (2010) menganalisis pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang

menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Koehn dalam setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme serta analisis pentad telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Bush sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

2.6.6. A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation

Smudde & Courtright (2011) dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan hal penting bagi seorang praktisi *Public Relation* dan akademisi. "*Stakeholder Theory*" memasukkan basis pengetahuan tentang pemangku kepentingan, siapa individu dan kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Dengan menggunakan analisis pentad, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan

perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*.

Di tingkat ini hexad mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*.

Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis. Tingkat pemahaman makroskopis akan memungkinkan praktisi untuk benar-benar melihat dinamika praktik pengelolaan *stakeholder* yang lebih baik dengan diakomodasi oleh upaya perencanaan strategis efektivitas pendekatan manajemen pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Smudde & Courtright terdapat perbedaan objek penelitian. Smudde & Courtright melakukan analisis hexad untuk kepentingan praktisi *Public Relation* sedangkan peneliti menggunakan *hexad* dalam kajian komunikasi politik pendekatan studi *political actor and rhetoric*. Namun hal tersebut bukan sebagai halangan, persamaan metode yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan dramatisme serta analisis hexad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, mampu mengungkapkan dimensi retorika politik dari Basuki Tjahaja, pengelolaan bahasanya, ditujukan kepada siapa, bagaimana sikap dan siapa saja aktor-aktor pro-kontra dalam interaksi komunikasi yang terjadi sekaligus menelusuri motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis *hexad*.

2.7. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini awalnya berangkat pada fenomena Basuki Tjahaja Purnama yang berkonflik dengan DPRD DKI Jakarta. Ia menggoreskan tulisan tajam “Pemahaman nenek lu!” dan “Gila” pada RAPBD (Rancangan Anggaran Belanja Daerah) yang diajukan DPRD DKI Jakarta yang dinilainya tidak masuk akal. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam sosok Basuki Tjahaja Purnama. Setelah melakukan interpretasi pada tayangan Basuki Tjahaja purnama peneliti menemukan banyak kejadian menarik terkait tindakan komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama terutama dalam hal penggunaan bahasa dan pemilihan kata-katanya.

Penelitian ini melakukan pendekatan sosok Basuki Tjahaja Purnama dalam kajian komunikasi politik genre *political and rhetoric*. Berawal dari kajian komunikasi politik yang memiliki berbagai macam tema atau genre penelitian. Peneliti memilih *genre political actor and rhetoric* sebagai topik penelitian. Karena bidang genre tersebut masih sempit perhatian terutama di Indonesia berdasarkan data dari Graber (2005). Artikel-artikel lebih berorientasi ke arah hasil kampanye pemilu. Oleh karena itu peneliti ingin menambah menambah khasanah serta variasi terkait *genre political actor and rhetoric* dengan mengangkat tokoh politik tanah air yaitu Basuki Tjahaja Purnama.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Denzim dan Lincoln (2011,h.4) mengatakan bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu dalam keadaan alamiah, mencoba memahami dan menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang tersedia. Moleong (2005) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku,persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara analisis dokumen dan observasi. Untuk menganalisis motif retorika politik Basuki Tjahaja Purnama yang ada di media televisi dan buku dalam mengadministrasi keadilan sosial yang berlandaskan pada pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

Berdasarkan pemaparan di atas, karena penelitian ini mengkaji serta menganalisis suatu fenomena secara mendalam Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2007,h.4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka dari itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Kriyantono (2007,h.24) hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata baik tertulis atau lisan untuk memperkuat temuan yang ada terkait retorika dan motif komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama.

3.2. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada peneliti dan pembaca apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan. Paradigma merupakan kerangka penyusunan umum untuk teori dan penelitian yang mencakup asumsi dasar, persoalan inti penelitian, model dari kualitas penelitian, dan metode untuk menjawab pertanyaan (Neuman,2013,h.108).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif, yaitu melakukan pemaknaan atas pengalaman sehari-hari individu dengan perilaku sosialnya (Neuman, 2007,h.43-44). Juga, paradigma ini memandang kebenaran sebagai sesuatu yang subjektif dan partisipasi peneliti dalam penelitian sangat ditekankan, sehingga terdapat lebih sedikit penekanan pada objektivitas karena sifat objektif yang mutlak sangat tidak mungkin. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penelitian pada tradisi ini harus bergantung pada apa yang dikatakan partisipan tanpa ada penilaian di luar diri peneliti (West & Turner,2008, h.75). Paradigma interpretatif dipergunakan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana retorika serta motif dari komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

3.3. Fokus Penelitian

Dalam setiap penelitian, penentuan fokus penelitian adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Menurut Moleong dalam Suyanto (2005), ada dua manfaat

yang dapat diperoleh bila dalam merumuskan masalah penelitian mempersempit ruang lingkup atau fokus penelitian, diantaranya yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus berguna untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian ini adalah segala aktivitas komunikasi yang menggambarkan *political actor and rhetoric* dari tokoh Basuki Tjahaja Kusuma mulai dirinya meniti karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) karena Ahok sudah menjalani cuti kampanye mulai 28 Oktober hingga 11 Februari 2017 dan posisi Ahok sudah menjadi calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Kompas.com, Maret 2017). Sedangkan fokus penelitian tidak sampai masa ahok menjadi petahana (*incumbent*).

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana Neuman (2007,h.417) menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan data dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frase-frase, atau simbol-simbol yang mendeskripsikan atau mempresentasikan, orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Sutopo (2002,h.50), juga menambahkan bahwa sumber data penelian kualitatif dapat berupa manusia dan tingkah laku, tempat atau lokasi, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti yaitu berupa teks yang bersumber dari buku-buku tentang Basuki Tjahaja Purnama, antara lain buku 'Hargaku adalah Nyawaku' karya Agus Santosa (2015), buku 'Politik Akal Sehat' karya Meicky Shoreamanis Panggabean (2016), Majalah Gatra, Majalah Tempo dan selebihnya adalah

data tambahan yang diperoleh dari dokumentasi Basuki Tjahaja Purnama dari dirinya meniti karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) melalui akun YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dokumentasi Berita Jakarta, MetroTV: Mata Najwa, KompasTV, TV One.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Ardianto (2010,h.161) adalah cara atau teknik bagaimana data itu bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Menurut Husaini (2009,h.69) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Dalam bukunya, kriyantono (2006,h.120) juga menambahkan, dokumentasi adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi terhadap data-data yang terkait dengan tayangan dirinya mulai meniti karir politik di Partai Perhimpunan Indonesia Baru sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 (Periode 19 November 2014-September 2016) di televisi, akun YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saat menyampaikan argumen, berdialog, dan berdiskusi tentang masalah politik, kebijakannya, serta buku yang berkaitan dengan perannya sebagai Gubernur DKI Jakarta serta dokumentasi yang berasal dari majalah Gatra, Tempo. Setelah peneliti mengumpulkan semua sumber data, peneliti melakukan pembacaan teks-teks tersebut dan mendokumentasikannya ke dalam *field notes* berdasarkan fokus dan tema penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data dimaksudkan untuk merumuskan pola dalam data, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan upaya penafsiran terkait teori sosial atau latar tempat beroperasinya pola tersebut (Neuman, 2013,h.570). Neuman (2013,h.599) menambahkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan dapat berbentuk teks naskah wawancara terbuka, artefak fisik, kaset audio, gambaran ataupun foto, sehingga perlu dilakukan analisis terhadapnya. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensintesis dan merenungkan (*contemplating*) data, juga meninjau kembali data mentah yang terekam. Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berupa teks, dan tayangan di media mengenai Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana yang telah di dokumentasikan peneliti ke dalam *field notes*.

Temuan-temuan yang dituangkan dalam *field notes* oleh peneliti dikategorisasi menggunakan model Miles dan Huberman. Dalam pengerjaannya peneliti mengerjakan secara induktif terlebih dahulu dengan cara kerja *interactive model* berdasarkan Miles & Huberman (dikutip dari Sugiyono,2007,h.246) mengemukakan bahwa ‘Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) teknik analisis data yang dilakukan peneliti. Berikut alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Proses Analisis Data

Gambar Miles and Huberman dalam (Sugiyono,2006,h.277)

Singkatnya analisis data itu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama masa proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data untuk menganalisis teks simbolik melalui perbincangan atau serangkaian artikel. Adapun metode analisis data pada *field notes* yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pentad analisis dari Kenneth Burke terdiri dari lima poin. Adapun perkembangannya Kenneth Burke telah menambahkan poin baru (keenam) dalam pentad yaitu sikap yang membuatnya menjadi hexad, namun kebanyakan orang masih tetap menyebut metode ini dengan nama pentad (West & Turner, 2008,h.33). menanggapi perkembangan pentad yang bertambah satu poin menjadi hexad, dalam penelitian ini peneliti masih menggunakan pentad yang terdiri dari lima elemen, hal ini dikarenakan studi penelitian terdahulu dan beberapa referensi yang peneliti temukan rata-rata masih menggunakan pentad, sehingga hal tersebut menjadi landasan peneliti tidak menggunakan head.

Adapun lima elemen atau poin yang terkandung dalam analisis pentad diantaranya meliputi (West dan Turner, 2013,h.33) :

1. Tindakan (*act*). Burke mengangap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan merupakan aksi yang mengambil peran dalam kisah atau

pernyataan yang diberikan oleh pembicara untuk menunjukkan apa yang disampaikan pembicara untuk menunjukkan apa yang disampaikan pembicara kepada khalayaknya. Tindakan memainkan peranan yang sangat penting dalam pentad dramatisme ini.

2. Adegan (*scene*). Adegan merupakan konteks yang melingkupi tindakan. Adegan juga merupakan setting atau latar belakang yang dilakukan dan bagaimana setting memberikan efek terhadap pesan, yang termasuk dalam adegan ini adalah konteks yang immediate (segera), konteks sejarah dan situasi sosial dimana tindakan tersebut terjadi.
3. Agen (*agent*). Agen merupakan seorang atau orang-orang yang melakukan tindakan. Beberapa pesan yang disampaikan oleh komunikator dipenuhi dengan referensi diri, pikiran, jiwa, dan tanggung jawab pribadi.
4. Agensi (*agency*) merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Bentuk-bentuk agensi yang mungkin mencakup strategi pesan, penceritaan kisah, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan seterusnya.
5. Tujuan (*purpose*). Tujuan merujuk pada hasil akhir yang ada di dalam benak agen untuk tindakan yaitu, mengapa tindakan dilakukan. Tujuan dari aktor utama baik tujuan yang eksplisit maupun implisit. Tujuan merupakan alasan atau motif dibalik aksi yang dilakukan oleh komunikator.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan penelitian ini merujuk pada kriteria yang ditawarkan Lincoln dan Guba (dalam Bryman, 2008, h. 377-380) yaitu kepercayaan (*trustworthiness*) dan keaslian (*authenticity*), berbagai kriteria ini kemudian disebut dengan *goodness criteria*. Kriteria

yang pertama adalah kepercayaan (*trustworthiness*), yang dibangun melalui empat kriteria yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas (*credibility*) yaitu sama dengan validitas internal. Menyangkut bagaimana penemuan hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peneliti mengenai masalah yang diteliti diakui. Teknik melakukan ini dinamakan *respondent validation* atau *member validation* serta teknik lainnya adalah *triangulation*. Dalam penelitian ini hal tersebut tidak dilakukan, karena keterbatasan informasi dan lokasi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Basuki Tjahaja Purnama tidak terjangkau oleh peneliti.

2. *Transferability*

Transferability disebut juga validitas eksternal adalah kemungkinan dari hasil atau pola penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain. Sehingga kemudian penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia mengingat banyak aktor politik yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

3. *Dependability*

Dependability sama dengan realitas, yakni keterbukaan terhadap keseluruhan tahap dan hasil penelitian untuk dinilai oleh kolega. Keterbukaan tersebut memungkinkan adanya penilaian dari pihak-pihak lain. Terkait penelitian ini, pihak-pihak tersebut diperankan oleh para dosen pembimbing skripsi.

4. *Confirmability*

Confirmability sama dengan objektivitas, yang dimaksudnya adalah peneliti meminimalisir penilaian pribadi dalam penyajian data. Sekalipun dalam penelitian kualitatif sulit untuk mendapatkan objektivitas, namun peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang telah didapati dari pembacaan teks secara murni. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengkonfirmasi temuan peneliti dari data dokumentasi (*field notes*) dengan argumen para informan wawancara yang merupakan kader pergerakan dari PMII, GMKI dan salah satu Dosen Filsafat STFT (Sekolah Tinggi Filsafat Teologi) Pematangsiantar serta informan yang mengikuti rekam jejak Basuki Tjahaja Purnama melalui media. Metode pertanyaan yang digunakan peneliti biasa dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada para partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti, kemudian informasi partisipan tersebut diperuncing oleh peneliti sehingga terpusat.

Kriteria yang kedua dalam *goodness criteria* adalah keaslian (*authenticity*) yang menurut Bryman (2012,h.393) kemudian mengacu pada beberapa aspek seperti berikut ini:

1. *Fairness*

Aspek *Fairness* di sini menurut Bryman berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil penelitian ini kemudian mempresentasikan perbedaan pandangan dari masing-masing data serta data yang ditampilkan secara apa adanya dan proporsional. Mengacu pada konsep tersebut, penelitian ini kemudian tidak hanya menampilkan kritik dari satu pihak saja, melainkan dari beberapa sumber dengan

sudut pandang dan fokus kritik yang berbeda. Untuk itu praduga dan konsep peneliti harus segera disingkirkan.

2. *Ontological authenticity*

Data yang diteliti bisa membantu masyarakat untuk lebih terbuka pandangannya.

Peneliti pernah mempresentasikan ini bukan hanya kepada politikus maupun aktivis saja, namun juga masyarakat atau orang awam tentang dunia politik.

3. *Educative authenticity*

Aspek selanjutnya mengacu pada pertanyaan apakah hasil penelitian mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih menghargai perbedaan pandangan di dalam dunia sosial. Oleh karena itu peneliti telah mendiskusikan hasil penelitian ini kepada seorang dosen Filsafat, kader pergerakan PMII dan GMKI tentang bagaimana representasi politisi ideal sebagai pejabat publik menurut mereka.

4. *Catalytic authenticity*

Data yang diteliti bisa mendorong orang-orang yang terlibat dalam penelitian untuk melakukan perbaikan dan perubahan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi politisi, aktivis, dan masyarakat di Indonesia agar mencontoh hal-hal positif yang terkandung pada sosok Basuki Tjahaja Purnama dan hal negatifnya yaitu untuk tetap menjaga kesantunan dalam berbicara, berpendapat, serta menyampaikan kritik.

5. *Tactical authenticity*

Tactical authenticity adalah aspek pemberdayaan, maksudnya data yang diteliti dapat menjadikan bertambahnya pengetahuan. Dengan mendiskusikan dan

menjelaskan penelitian kepada teman serta kerabat terkait tanggapannya tentang penelitian ini, sehingga hal ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mereka tentang sosok Basuki Tjahaja Purnama.



BAB IV HASIL

4.1. Latar Belakang sosok Basuki Tjahaja Purnama



Gambar 4.1 Basuki Tjahaja Purnama
(Sumber: Merubah Indonesia, 2015)

Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih sering disapa Ahok, menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang didaulat rakyat menjadi Presiden Indonesia ketujuh. Ia tercatat sebagai Pemimpin sekaligus Politisi yang *anti maenstream* melakukan reformasi birokrasi pemerintahan untuk mengadministrasi keadilan sosial karena para pemimpin yang selama ini dianggap terlalu protokoler dan birokratis. Politisi yang dikenal sebagai tokoh yang kontroversial ini berasal dari kampung di Belitung Timur, merupakan keturunan Tinghoa-Indonesia, ada realitas baru yang mengejutkan banyak orang ketika nama

mencuat di pentas politik Indonesia. Ahok datang dari genre etnis Tionghoa yang menghendaki pluralisme dalam kehidupan politik. Ia lahir dari generasi yang mendambakan demokrasi di Indonesia steril dari diskriminasi suku, ras, dan agama. Untuk itu Ia tidak ingin terjebak dalam sikap politik yang apatis.

Sosok yang pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” pada tahun 2006 oleh majalah Tempo dan sebagai peraih penghargaan BHACA (*Bung Hatta Anti Corruption Award*) saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lantas semua penghargaan tersebut, tidak membuatnya mengubah karakternya yang Idealis. Ia tetap dikenal sebagai politikus muda Indonesia yang tegas, berani, aspiratif, blak-blakan, cerdas, emosional, dan jujur. Keberanian dan vokalnya memperjuangkan hak-hak masyarakat mengingatkan banyak orang kepada Soe Hok Gie seorang aktivis Indonesia Tionghoa yang menentang kediktatoran berturut-turut Presiden Soekarno dan Soeharto. Bedanya tentu saja, Ahok langsung terjun ke politisi, sedangkan Soe Hok Gie turun menjadi demonstran (Wibisono dalam Purnama,2008).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur pada 29 Juni 1966 sebagai keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka. Ahok tercatat sebagai putra pertama merupakan dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjau). Anak kedua yaitu Basuri Tjahaja Purnama Bupati Belitung Timur periode 2010-2015, pada tahun berikutnya, dikuti oleh kelahiran Fifi Lety Indra, Harry Basuki dan Frans yang meninggal karena kecelakaan saat remaja. Saat kecil, Basuki Tjahaja Purnama dipanggil Banhok oleh sang ayah. “Ban” berarti puluhan ribu dan “Hok” berarti

belajar. Saat digabungkan keduanya bermakna belajar di segala bidang. Ayahnya ingin Ahok tak pernah berhenti belajar agar menjadi orang sukses. (Shoreamanis,2016,h.3).

Masa kecil Ahok lebih banyak dihabiskan di sekitar Manggar tepatnya di Desa Gantung. Pendidikan dasarnya di sekolah negeri hingga SMA di desa Gantung, Belitung Timur. Walaupun anak pengusaha tambang ayahnya tidak ingin menyekolahkan Ahok dan adik-adiknya di sekolah PT Timah. Dengan sekolah di negeri, Indra Tjahaja berharap Ahok dan adik-adiknya sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan diluar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Tentu tujuan Indra Tjahaja untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap budaya yang berbeda karena Indonesia itu majemuk dan multikultural. Sehingga Ahok diharapkan ayahnya saat dewasa nanti bisa melihat permasalahan dari seluruh sudut pandang (Purnama,2008)

Ahok kecil dan adik-adiknya banyak mendapat pendidikan moral bukan hanya dari sekolah, keluarga juga turut berperan besar dalam pendidikan moral. Hal tersebut diulas dalam buku Hargaku adalah Nyawaku (Santoso, 20015). Anak-anak kecil memperoleh transmisi pendidikan moral, wejangan dan nasehat di malam hari sebelum tidur. Tapi sistem pendidikan yang belaku di keluarga Ahok cukup berbeda. Di kamar tidur, hanya bermain-main seperti kuda-kudaan dengan diselingi soal tanya-jawab. Khusus wejangan dan pelajaran dari Ayahnya dilakukan di Meja makan. Karenanya, Ahok, dan tiga adik kandung, masing-

masing Basuri T. Purnama, Fifi Lety dan Harry Basuki, selalu mewajibkan makan bersama dengan posisi duduk yang sama dari hari ke hari. Indra Tjahaja ayah Ahok memiliki alasan tersendiri menempa mereka dengan wejangan dan pengajaran di meja makan. Indra Tjahaja berpendapat bahwa jika dilakukan di tempat tidur, Ahok dan adik-adiknya cenderung tidak konsentrasi karena sudah bersiap-siap untuk tidur. Sedangkan transmisi pendidikan moral dan wejangan di meja makan akan lebih sempurna karena konsentrasi dan pikiran masih segar (Purnama,2008).

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, Ahok hijrah ke Jakarta melanjutkan pendidikannya. Ahok sangat mengingat betul pesan Indra Tjahaja, ayahnya tidak akan mewariskan harta berupa uang kepada anak-anaknya. Alasannya, kalau pun diberi uang yang berlimpah dan disebut orang kaya, maka uang tersebut akan lenyap seketika jika dirampok. Tetapi jika mereka terdidik dan memiliki nama baik, maka itulah harta sejati yang tidak bisa diambil oleh siapa pun. Dukungan moral dan usaha sungguh-sungguh guna mendapatkan biaya pendidikan juga dilakukan oleh Ibu Buniarti Ningsuh. Beliau selalu menyisihkan uang untuk dibelikan emas 24 karat sebagai tabungan buat kelak biaya pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut ditulis Ahok (Purnama, 2008, h.12)

“Pernyataan yang diungkapkan bapak itu, sangat mengena dihati kami. Itu sebab, kami semua anak-anaknya sangat ‘ngotot’ mengejar ilmu setinggi mungkin melalui pendidikan sekolah. Semangat kami cukup tinggi, melebihi orang tua kami tidak hanya mendoornng secara moral, tetapi juga bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membiayai kami sekolah,” Kata Basuki Tjahaja Purnama

“Jika perlu, ’menjual kepala’ pun saya lakukan untuk mendapat biaya sekolah kalian semua,” begitu bapak selalu mengatakan kepada kami putra-putrinya,” Tambahnya

“Bapak tidak mewarisi uang ketika beliau meninggal, tetapi beliau mewariskan” mesin pencetak uang yaitu putra-putrinya. Kami didik untuk meneruskan cita-cita bapak yang belum terwujud ketika beliau masih muda. Salah satunya menjadi pejabat agar bisa melawan oknum pejabat yang penyengsara rakyat”. (Sumber Dokumentasi : Purnama, 2008)

Harapan dan kerja keras kedua orangtua agar kami bisa bersekolah setinggi mungkin, setahap demi setahap terealisasi. Di Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diterima di jurusan kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, namun jurusan tersebut bukanlah kehendak hati Basuki yang ingin menjadi Insinyur pertambangan, melainkan keinginan Ayahnya. Setelah lulus dapat membantu masyarakat di kampungnya. Basuki tidak melanjutkan pendidikan kedokteran dan menulis surat kepada Ayahnya dikampung bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Melalui sepucuk surat, sang Ayah membalas perihal kekecewaannya mengatakan kalau insinyur tak dibutuhkan dikampung halamannya. Warga kampung lebih membutuhkan seorang dokter. Ahok membela diri dengan membalas surat bapak, bahwa jika dia menjadi seorang dokter, maka pasien akan lebih cepat meninggal karena dokternya “kobo!”(Purnama,2008,h.14). Gagal test ujian masuk jurusan pertambangan ITB (Institut Teknologi Bandung). Ahok tidak menyerah dan diterima di jurusan Geologi di Fakultas Teknik Mineral di Universitas Trisakti seperti yang dicita-citakannya ingin menjadi Insinyur Tambang, karena sejak kecil

dirinya memang sudah akrab dengan lingkungan pertambangan di kampungnya Belitung Timur.

Selesai pendidikan dan bergelar Insinyur Geologi, Ahok kembali ke kampung halaman di Belitung Timur dan mendirikan CV Panda yang bergerak dalam bidang Kontraktor Pertambangan Timah. Ahok kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen di Prasetya Mulya, setelah mendapatkan gelar tersebut, pada tahun 1922 dia kemudian bekerja dibawah naungan PT Simaxindo Primadaya dan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Pada tahun 1995 Ahok kemudian berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya dan mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama di Belitung. Mendirikan PT Nurinda Ekapersada yang memberikan keuntungan 150.000 USD dalam satu tahun jika nilai kurs Rp14.000,00 dan merupakan awal perjalanan dari *Gravel Pack Sand* (Santosa,2015,h.51). Tetapi Ahok terpaksa harus menutupnya karena ia terlibat pertikaian dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik yang terletak di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar.

Sebagai anak pengusaha yang “vokal” terhadap permainan manipulasi proyek-proyek pemerintahan maupun PT Timah yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pengusaha/kontraktor, tentu saja mereka sering “dikerjai” hingga kesulitan keuangan dalam menjalankan roda usaha. Ahok terdidik untuk menegakkan kebenaran walaupun harus sendiri. Melihat Pabriknya ditutup, Ahok

sempat frustrasi melihat perilaku oknum pejabat. Ada kesadaran dalam diri Ahok bagaimana birokrasi pemerintah itu bersih dari pejabat culas. Kebetulan seorang teman di Kanada menawarinya untuk bekerja di negeri benua Amerika itu. Ahok sedang goyah dan putus asa mendapatkan jalan keluar. Ia mengutarakan niatnya kepada ayahnya (Purnama, 2008, h.18). Perdebatan dan adu pendapat pun terjadi, diungkapkan dalam buku Basuki Tjahaja Purnama, Merubah Indonesia:

“Kamu tidak boleh keluar negeri karena rakyat miskin membutuhkan kamu, Hok. Soeharto bisa turun! Indonesia bisa berubah.”

“Apa yang dibutuhkan rakyat dari saya, Pa? Mana mungkin muka minyak babi seperti kita ini bisa jadi pejabat? Wajar Soeharto bisa turun, dan memang pasti turun, sebab dia sudah tua!” Ahok sedikit kesal terhadap sikap ayahnya.

“Kamu dengar baik-baik, kamu lihat saja! Saya mungkin sudah engga bisa lihat kamu. Tapi, suatu hari kelak, rakyat akan memilih kamu untuk membela haknya!” tegas Kim Nam mengunci pembicaraan, dan Ahok pun terdiam. (Purnama, 2008, h.18).

Pasca reformasi 1998, Ahok memutuskan untuk menekuni karir politik meski negeri ini masih bergelut oleh isu-isu primordial. Ia mulai dari kampung halamannya, pada tahun 2004 bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Jabatan yang diterima Basuki sebagai ketua DPC PPIB Kabupaten Belitung Timur. Sebelum memasuki dunia politik sebelumnya Ahok merupakan Ketua Majelis di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Yayon II Pluit. Pendeta bahkan teman-teman gereja menilai langkah Basuki sebagai seorang ambisius dengan kekuasaan (Purnama, 2008, h.20).

Di tengah pergolakan batin untuk memilih ke politik atau menjadi ketua majelis di gereja, dengan melihat kesalahpahaman dari pihak di gereja dan rasialismenya para oknum elite politik yang korup dan pengecut tetapi mengobarkan kebencian kepadanya karna Kristen. Satu hal yang dipikirkan Ahok, panggilannya untuk menolong rakyat dengan meniti karir menjadi pejabat adalah hal yang tepat. Jelas menjadi pejabat dengan bisa menolong rakyat banyak agar bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal. Basuki yakin rakyat tidak hanya membutuhkan doa-doa di gereja. Yang dibutuhkan mereka adalah pertolongan nyata agar mereka memiliki jaminan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan di hari tua di dunia ini (Purnama,2008,h.21).

Vakum dari politik, Ahok tidak hanya berdiam diri, ia menyalurkan pengetahuan politiknya dengan mendirikan *Center for Democracy and Transparency 31* (CDT 31) untuk memprovokasi anak muda agar mau dan berani meniti karir di bidang politik dan pemerintahan (Santoso,2015, h.20). Ia secara khusus mendorong pemuda dan pemudi etnis Tionghoa yang idealis agar mau naik ke pentas politik lokal dan nasional, tidak enggan ataupun segan masuk ke dalam birokrasi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ahok sempat berada di simpang jalan, sebelum akhirnya dalam Pemilu 2009 berhasil melenggang ke Senayan.

Indra Tjahaja pernah suatu hari mengajak Ahok ke Bandara Udara H.A.S. Hanandjoeddin, pada saat itu ayahnya menjadi kontraktor di Bandara Udara tersebut. Ahok dititipkan kepada teman-teman ayahnya dan ayahnya berteriak lantang di depan teman-temannya bahwa Ahok harus dijaga baik-baik, karena

suatu saat nanti dia akan menjadi Bupati. Spontan teman-teman ayahnya tertawa.

Mereka tidak percaya bahwa anak laki-laki bertubuh kurus, berkulit pucat, dan bermata sipit itu akan menjadi bupati, untuk bekerja di pemerintahan saja sangat sulit. Pemerintahan Orde Baru sudah sangat rapat menutup kesempatan bagi orang-orang keturunan Tionghoa untuk bisa terlibat dan bekerja di kantor pemerintah (Santosa, 2015).

Teriakan Indra Tjahaja mungkin juga terdengar “gila” untuk semua orang.

Namun itulah yang dalam bahasa Burt Nanus, disebut visi, suatu impian terbaik tentang masa depan. Visi adalah potret masa depan, artikulasi dari arah yang dituju, yaitu sebuah masa depan yang secara hakiki lebih baik, lebih hebat, dan lebih memikat daripada sekarang. Visi adalah hari esok yang divisualisasikan hari ini. Visi bukan realitas, tetapi diyakini akan menjadi realitas. Suatu harapan yang ingin diunduh di hari esok, dan harapan itu tentu saja bukan realitas hari ini.

Harapan adalah gambar tentang keinginan, cita-cita atau impian, meski tak jarang sekedar angan atau kesan sumir belaka. Dan berita hebatnya adalah hari cerah di tahun 1971 itu, Indra Tjahaja Purnama sudah melihat impian terbaik tentang apa yang harus dicapai Ahok, apa Yang harus dilakukan (Santoso, 2015, h.17).

4.3. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Sebelum Menjabat Menjadi Gubernur DKI Jakarta

4.3.1. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua DPC

Partai PIB

Perjalanan serta keterlibatan Ahok untuk menekuni karir politik dimulai dari daerah kelahirannya Bangka Belitung ketika ia bergabung dengan PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) yang sedang melakukan ekspansi dengan

melakukan penjarangan kader partai. Nama Ahok mencuat di pentas politik Indonesia datang dari etnis Tionghoa yang menghendaki pluralisme dalam kehidupan politik. Ia lahir dari generasi yang mendambakan demokrasi di Indonesia steril diskrimasi suku, ras, dan agama. Ia tidak ingin terjebak dalam sikap politik yang apatis (Santoso, 2015, h.15)

Dibawah naungan bendera Partai PIB (Perhimpunan Indonesia Baru), Ahok didaulat menjadi Ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) Bangka Belitung yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Sebelumnya ia merupakan Ketua Majelis Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Yayon II Pluit di tengah pergolakan batin, Ahok terlanjur jatuh hati untuk masuk dunia politik. Karena panggilannya untuk menolong rakyat. Ahok yakin rakyat tidak hanya membutuhkan doa-doa di gereja, yang dibutuhkan mereka adalah pertolongan nyata agar mereka memiliki jaminan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan di hari tua di dunia ini (Purnama, 2008, h.20).

Banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius. Gila dan tak tahu diri. Banyak orang meragukannya karena ia adalah orang yang terlanjur diberi label minoritas, beragama Kristen dan bermata sipit. Tak boleh menjadi pemimpin (Randan,2014,h.36). Namun Ahok berkisah bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Partai PIB antara lain disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik, sebagaimana dikatakannya dalam buku Politik Akal Sehat (Shoeramanis,2016).

“Kita tuh enggak cukup Cuma jadi penonton. Ibarat orang main bola, kita komentator nih, selama ini kita di atas gitu loh, kita di

bangku penonton. Eh...pemainnya kurang ajar. 'Eh lu jangan cuma ngomong dong. Kalau mau, lu turun lawan kita'. Gitu deh kurang lebih pemainnya ngomong ke kita. Kita kasih tahu cara main yang baik tuh gimana, dia engga mau dengerin, ya udah kita turun saja, kan? Mulai PPIB rekrut orang-orang. Lalu, apa itu Politik Akal Sehat? Misalnya kita pakai kaus 'Si XY Presidenku.' Orang minta kaus, kita enggak kasih. Terus dia enggak mau pilih, kan? Ya biarin! Nah, jadi konsepnya, yang pertama itu, kita ini bukannya menipu rakyat supaya memilih kita, tetapi kita mendidik rakyat untuk memilih pejabat yang jujur. Konsep kedua, kita mempertontonkan diri ke orang-orang, kita jadi showcase gitu, kita tunjukkan kerja kita."

Terpilih sebagai Ketua DPC Partai PIB, Ahok mengemban tanggung jawab mendidik rakyat agar mampu memanfaatkan pesta demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau *bonum commune*. Strategi pertama dimulai dengan memerangi praktik korupsi dalam tubuh partai menjadi satu tugas pertama yang dihadapi Ahok pada saat menjelang kampanye saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD perwakilan Belitung Timur. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat (*money politics*). Disebuah dusun, Ahok harus menolak permintaan uang dua puluh ribu rupiah per orang agar partainya dipilih. Di dusun yang lain, sudah ada banyak memasang bendera PPIB, bahkan ada sejumlah orang yang menjadi anggota partai. Hingga suatu hari kepala adat dusun itu mendatangi Ahok untuk meminta uang empat juta rupiah. Tentu saja Ahok menolak, dan karena mereka menerima uang dari partai lain, seluruh bendera PPIB pun diganti bendera partai 'donatur' (Purnama, 2008, h.30).

Bahkan para pengurus rumah ibadah juga datang memanfaatkan kesempatan menjelang pemilu dengan datang kepadanya melakukan permohonan sumbangan pembangunan dengan melakukan istilah yang implisit;

“Apa yang akan diberikan oleh partai saudara yang merah?Atap seng ini dari yang warna hijau, semen sudah dari yang kuning. Kami akan bagi suara kami ke partai yang telah menyumbang” kata pengurus rumah ibadah.

“Kalau begitu bapak salah mengundang saya, toh masih ada belasan partai lainnya. Minta kesana saja. Tetapi jika pemilu usai, rumah ibadah ini masih belum terselesaikan, maka bapak boleh cari saya. Masalah akan diberikan atau tidak, itu urusan saya dengan Tuhan.” Ahok menjawab secara diplomatis

Ketika akan memasuki masa proses verifikasi, sudah ada oknum pengurus partai yang menuntut diberikan perahu motor, tentu saja untuk kepentingan sendiri. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi mereka mengancam, ia bersama semua anggota partai wilayahnya akan mengundurkan diri dari PPIB. Ahok sedikit terkejut. Ini akan berakibat buruk, PPIB bisa tidak lolos verifikasi KPUD. Tetapi, Ketua Partai DPC PPIB Belitung Timur tersebut bukan orang yang mudah berletut pada ancaman. Ahok menjadi orang partai dengan satu motivasi kuat untuk memberantas korupsi. Ia tidak akan akan memelihara “anak macan” yang lapar rasuah. Intimidasi pengurus partai itu sudah merupakan benih korupsi yang harus dimatikan. Ahok tegas menolak tuntutan itu. Ancaman itu juga tidak hanya gertakan, pengurus partai dan orang-orangnya pun meninggalkan PPIB. Ia bersama rekan-rekan pengurus DPC PPIB yang lainnya harus bekerja ekstra keras. Mereka mendekati dan menjaring anggota partai baru, dan setelah melakukan revisi daftar anggota partai, PPIB dinyatakan lolos verifikasi oleh

KPUD Belitung Timur, dan berhak menjadi kontestan Pemilu 2004 (Shoeramanis,2016,h.68).

Persoalan lain juga muncul, ketika Ahok dan kawan-kawan PPIB merancang model kaos yang dicetak bervariasi kepada anggota dan simpatisan. Ada beberapa model dan warna yang berbeda tanpa diduga sebelumnya, kaos partai yang banyak ragamnya justru memicu persoalan di lapangan saat kampanye. Imbasnya banyak oknum pengurus partai yang ingin memiliki semua model kaos tersebut (Purnama, 2008,h.27). Tentu saja tindakan tersebut tidak diindahkan Ahok. Persoalan baju ini pun kemudian ternyata bisa menjadi pemicu mereka yang tidak mendapatkan semua model kaos menyatakan keluar dari partai. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat para pengurus dan anggota yang tetap setia. Dari hal ini Ahok menemukan realitas bahwa tidak hanya orang-orang partai dan elite politik saja yang korup. Sekelompok masyarakat tertentu juga korup. Ada massa yang korup di tengah-tengah rakyat yang sedang mengharapka perbaikan hidup (Santoso,2015, h.67).

Selama kampanye Ahok sudah bertekad melakukan pendidikan politik kepada rakyat, tidak semata-mata mencari suara di kursi DPRD Beltim. Ia ingin membangun paradigma yang saling membutuhkan antara konstituen dan calon legislatif. Pendidikan politik tersebut diberikannya di podium mini yang dibangun di tengah lapangan sepak bola di dusun itu. Siang hari itu di lapangan sepak bola sudah dipadati orang-orang yang meneriakkan yel-yel, "*Hidup PPIB! Hidup! Merdeka! Merdeka!*" Basuki dari atas podium justru membalas teriakan peserta

kampanye itu dengan seruan yang tidak kalah kerasnya, spontan peserta kampanye, simpatisan ataupun anggota partai terperangah;

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Dalam *scene* diatas, ketegasan dan kelugasan bahasa Ahok dalam berbicara menjadi karakter dan citra dirinya melalui tindakan (*act*) menolak keberpihakan kepada oknum yang memanfaatkan kesempatan pada masa kampanye, dilakukan dalam dua strategi yaitu menolak memberikan bantuan uang pada saat masa kampanye akan membuka hati nurani masyarakat dan memberikan pendidikan politik dengan memerangi praktik korupsi dalam tubuh partai. Bertujuan (motif) mengajarkan masyarakat untuk menghargai pesta demokrasi dalam pemilu menganggap pentingnya kejujuran dalam menaikkan kelas demokrasi di Indonesia sebagai salah satu pendidikan politik. Ahok sadar dengan memberikan segala yang dibutuhkan masyarakat dan menggelontorkan uang dan janji-janji untuk memberikan bantuan, niscaya PPIB akan meraup banyak suara di Beltim, namun di lain sisi ia prihatin melihat fenomena transaksional seperti ini. Jika seorang calon legislatif menjadi anggota DPRD itu karena konstituen memilih untuk mendapatkan sesuatu, tentu saja konstituen

akan menuntut dan menagih janji caleg pasca pemilu. Jika tuntutan konstituen tersebut tidak dipenuhi, masyarakat akan merasa ditinggalkan, bahkan merasa dilupakan karena Pemilu sudah berlalu dan sang caleg sudah duduk manis di kursi parlemen (Santosa,2015,h.70).

Melalui *scene* diatas memperlihatkan citra diri Ahok yang esentrik dan *ceplasp-ceplos*. di situ ia nampak marah dan dengan lugas menyampaikan orasinya (*agency*). Tentu saja orasi Ahok yang meluap-luap membuat peserta kampanye PPIB merah telinga. Mereka beramai-ramai menjauh dari podium, dan meninggalkan arena kampanye dengan panas hati. Mereka marah, tetapi kaos partai tetap diambil, dan kemenangan partai di dusun tersebut pun raib (Santosa,2008,h.73). Penggunaan diksi ‘Goblok’ yang dianggap kasar, tidak ada sama sekali ungkapan manis yang keluar, teriakan Ahok lantas membuat masyarakat marah. Tentu saja tujuan (motif) Ahok melontarkan kalimat sindiran “Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya.” Ada keinginannya agar masyarakat cerdas memilih pemimpin yang menjunjung keadilan sosial. Sehingga para calon kepala daerah lain yang berkualitas nantinya bisa bertanding secara *fair* tanpa terikat dengan politik transaksional.

4.3.2. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai pendiri

Center For Democracy and Transparency (CDT 31)

Gagal dalam Pilkada Babel, Ahok kembali menjalankan perusahaan yang cukup lama ia tinggalkan. Namun, itu tidak berarti ia menjauh dari kegiatan

politik, Ahok justru mulai menjejakkan karir politik di tingkat nasional. Pada Juni 2007, Ahok diangkat menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Namun, dinamika dan persoalan internal partai membuatnya tidak lama menjabat sebagai sekjen. Ia melepas jabatan itu dan mundur dari Partai PIB. Ahok kemudian mendirikan lembaga kajian *Center for Democracy and Transparency 31 (CDT 31)*. Lembaga ini memfokuskan kajian pada opini publik, terutama yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung (Santoso,2015,h.107).

Melalui *Center for Democracy and Transparency 31 (CDT 31)*. Ia menyalurkan pemikiran politiknya untuk memprovokasi anak muda agar mau dan berani meniti karir di bidang politik dan pemerintahan. Ia secara khusus mendorong pemuda dan pemudi etnis Tionghoa yang idealis agar mau naik ke pentas politik lokal dan nasional, tidak enggan ataupun segan masuk ke dalam birokrasi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ahok yakin, jika pemuda dan pemudi Tionghoa yang idealis mau memasuki arena politik, mereka bisa membuat Indonesia hebat. Orang-orang muda yang bersih, transparan, dan profesional akan membuat Republik ini menjadi tangguh. Ahok meyakini kata-kata bijak Plato, bahwa orang yang menolak memimpin biasanya akan dipimpin oleh orang yang lebih buruk darinya. Seperti yang dikatakannya berikut ini:

“Saya sendiri bersedia diutus. Jika semua berkata,”Ini aku, utuslah aku!” maka tidak sampai dua puluh tahun ke depan kita mungkin bisa menemukan data pribadi Presiden Republik Indonesia yang beragama bukan Islam, bukan suku Jawa, dan orangtua atau kakeknya masih bernama’tiga huruf.”(Purnama,2008,h.42)

CDT 31 tidak terlepas dari pengalaman Ahok selama terjun dalam politik.

Ia banyak belajar dari perjalanan politik sejak mendaftarkan diri menjadi anggota partai, menjadi ketua DPC dan memimpin PPIB di Belitung Timur, sampai ikut dalam Pilkada Belitung Timur dan Pilkada Bangka Belitung bertekad untuk menjaring pemimpin lokal yang kredibel dan mendidik rakyat untuk memilih dengan akal sehat, bukan berdasarkan pertimbangan SARA. Itulah yang melatarbelakangi berdirinya CDT 31. Lembaga kajian ini ingin menjadi agen sekaligus promotor yang terlibat aktif dalam mempromosikan lahirnya pemimpin muda yang bersih, transparan dan profesional (Santosa,2015,h.109).

Tujuan (motif) dari tindakan (*act*) Basuki Tjahaja Purnama adalah untuk menyelenggarakan substansi keadilan sosial, menegakkan pilar demokrasi tanpa memandang latar belakang RAS, sehingga lapangan tanding para calon kepala daerah rata (seimbang) di Pemilu. Jika terus melihat perbedaan maka hal itulah menjadi titik lemah dari bangsa yang dapat dimanfaatkan orang sebagai perpecahan kesatuan Indonesia.

Hal tersebut juga sudah ditegaskannya saat menjabat menjadi Bupati Belitung Timur. Merupakan catatan sang sekretaris atas pidato sambutan tanpa teks dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2005, berikut ini:

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, 77 tahun yang lalu, pemuda-pemudi kita dengan berani bahkan sangat gagah berani mau melepaskan suatu kebanggaan pribadi, kesukuan atau keegoisan dari kaum mayoritas untuk menerima suku-suku kecil untuk disatukan menjadi bangsa Indonesia. Dimana suatu resesi Yong Java, pemuda Jakarta mau menerima Yong Ambon, Yong Bangka mau menerima Yong Batak

dan Yong-Yong yang lainnya dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk mewujudkan Indonesia bersatu.

Saya yakin, kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak akan terjadi kalau tidak ada sekelompok pemuda yang ikhlas melepas keegoisannya. Saya bayangkan jika kita ditempatkan pada posisi saat itu, apakah kita ikhlas disatukan dalam satu suku bangsa. Kita ambil contoh di pilkada, kalau menerima pegawai harus putera asli daerah. Jika hal itu sampai terjadi 77 tahun yang lalu maka Sumpah Pemuda tidak akan terwujud, karena masing-masing masyarakat bersikap “Saya Mau Suku Saya.”

Pada masa revolusi kemerdekaan, senjata yang didapat dari Jepang atau Belanda sangat tidak memadai untuk berperang, dan pada saat yang sama tidak pernah ada kejadian, para pemuda saling baku tembak, saya coba bayangkan kembali kalau kita berada pada waktu itu.

Saya adalah suku yang kuat, maka saya akan membekali diri saya dengan senjata otomatis. Sedangkan suku yang kecil hanya menggunakan senjata bambu runcing. “Hei kamu suku kecil kamu saya bayar saja dan saya pelihara kamu. Jika hal itu terjadi maka Belanda tidak perlu menembakkan satu peluru pun tapi cukup menonton karena sudah saling baku hantam dan baku tembak sesama kita. Maka dari itu kemerdekaan tidak akan terwujud.

Untuk itu, kita yang berada di kehidupan sekarang patut bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan Pancasila. Kita bangun bangsa ini dengan pondasi yang kuat dan kokoh sebagaimana yang dicetuskan para pemuda terdahulu. Kita bangun Indonesia dengan pondasi Pancasila.

Saya yakin dengan peringatan Sumpah Pemuda ini, kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan Bangsa Indonesia bangsa yang besar.

Berkaitan dengan ini, para pemuda sekarang harus membangun bangsa ini dengan belajar teknologi dan lain sebagainya. Karena belajar merupakan transisi menuju kesuksesan.

Dan yang terpenting untuk membangun bangsa ini tidak harus melihat suku, agama, ras tapi lihatlah kita sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Mari kita perbaiki diri, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia ke depan dapat jaya. Sebagai pemuda, mari kita kita menjadi teladan contoh dalam membangun bangsa. Demikian, sekian dan terimakasih.

Kemudian, Ahok mengatakan bahwa sebaiknya orang jangan bersikap acuh tak acuh terhadap politik. Semua warga punya ruang untuk berkiprah di dalam politik. Ahok menyampaikan pidatonya dengan gaya khas; Meledak-ledak, terlihat garang dan bersemangat diikuti intonasi yang tinggi dalam Buku Politik Akal Sehat (Shoreamanis,2016,h.18)

“Anda harus masuk ke politik supaya orang yang sudah sadar politik, cerdas politik, punya pilihan. Jadi, golput itu bodoh. Nolong dia milih orang jelek ya juga ***** (Ahok mendamprat), yang kita pilih juga setan, mungkin kan gitu? Kita jadi susah. Nah, Anda harus terjun. Kalau Anda terjun, Anda harus sadar, Anda nih pejuang. Dulu kita melawan penjajah, bangsa bule, Belanda, sekutu. Sekarang kita malawan para koruptor. Kalau anda tidakpuas dengan pemerintah saat ini, Anda Cuma ngedumel, ngomong-ngomong doang, itu Anda setengah dosa karena Anda tidak pernah mau terjun ke politik. Jadi timses tidak dibayar, itu juga menolong orang jujur untuk berpolitik, kan? Jadi, satu, Anda sendiri nih maju, masuk politik. Dua, Anda membantu orang yang mau terjun. Yang ketiga aatu yang paling rendah, memilih orang berdasarkan rekam jejak bukan berdasarkan primodialisme, suku, agama, ras, gitu, lho. Itu penting.”

Dengan membangkitkan semangat juang pemuda-pemudi Ahok menuturkan hal yang sama dalam menanggapi pertanyaan lawan bicaranya Peter Gotha, Dubes Indonesia untuk Polandia pada tahun 2014, mengenai aspirasi Ahok untuk mengajak generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam menaikkan kelas demokrasi Indonesia. Ia menanggapi pertanyaan tersebut dalam program stasiun televisi QTV (2008) yang berjudul ‘Bersama Ir. Basuki Tjahaja Purnama,MM’ dengan penggunaan bahasa yang lugas dan diplomatis berikut ini:

“Saya ingin melihat ada orang-orang idealis para aktivis mari masuk ke DPRD dimulai dari tingkat II, karena ini jalur yang terbaik. Kita tidak usah teriak-teriak di luar. Mungkin 500 orang akan memilih, anda sudah dapat kursi DPRD. Tetapi

begitu di dalam mari kita tunjukkan kita berbeda. Saya harapkan anak muda pada tahun 2009 muncul untuk menjadi DPRD.” (Youtube, 27 Juni 2008)

“Setelah saudara-saudara duduk menjadi anggota DPRD, akan dipaksa menjadi ‘Robin Hood’ yang mencuri dari APBD, yang mencuri dari APBD, atau memeras orang kaya untuk bisa menghidupi konstituen pemilih, Bahkan yang tidak memilih saudara, setelah saudara duduk, mereka mengaku memilih saudara dan meminta jatah rezeki saudara.” (Youtube, 27 Juni 2008)

Melalui pidatonya yang menggairahkan dan narasi yang dia bangun melalui argumen-argumen yang disampaikannya melalui media nasional (*agency*).

Motif serta tujuannya tidak lain ingin mendorong semangat idealisme kaum muda untuk menjadi pelaku politik yang cerdas bukan hanya penonton apatis. Setelah para pemuda idealis tadi menemukan partai politik, Ahok menyarankan mereka memulai karir politik dari kampung halaman, dan menjadi calon legislatif yang bersih, jujur dan profesional. Tidak menghalalkan cara-cara haram, yang mementingkan kemenangan. Sehingga dapat disimpulkan tindakan (*act*) Basuki

Tjahaja Purnama mendirikan CDT 31 tersebut menegaskan SARA bukan sebagai faktor utama untuk memimpin, tetapi benar-benar kapabel dan memiliki integritas.

Perlunya pendidikan politik sebagai pilar menegakkan demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya vokal dan berani tetapi juga visioner dan memiliki kinerja yang berkualitas dan etis.

Pada tahun 2008 lewat lembaga non pemerintah (NGO) yang didirikannya yaitu *Center for Democracy and Transparency* (CDT31), Ahok sempat diundang sebagai pembicara dalam *Forum International Visitor Leader* di Washington DC yang juga merupakan rangkaian kampanye Barack Obama, yang ketika itu masih

menjadi calon presiden. Kemampuannya berbahasanya yang fasih inggris dan mandarin bukan tidak mungkin dirinya dilirik negara lain untuk diundang menyampaikan gagasannya. Ahok diundang karena pemikirannya tentang gagasan tentang demokrasi untuk mendidik rakyat dalam memilih pemimpin melalui sistem pilkada dengan mengajak rakyat memilih pemimpin yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) tanpa SARA. Ahok memang dikenal suka bercerita, menceritakan kembali pengalamannya melalui pidatonya maupun saat sedang pertemuan. Hal tersebut diungkapkannya saat sedang melakukan pertemuan dengan rombongan mahasiswa di gedung Balai Kota Jakarta dan diunggah melalui akun YouTube Pemprov DKI (2016).

Dalam prosesnya Ahok melakukan perlawatan ke luar negeri selama 3 minggu di negeri Paman Sam tersebut, pertemuan dengan senator Amerika Serikat (AS) yang sempat menyombongkan negaranya di hadapan para pemuda dari beberapa negara yang diundang, tak terkecuali Ahok. Menurut Ahok, senator tersebut sempat berujar kepada pemuda dari Korea Selatan dan Jepang bahwa keamanan negara mereka dalam bahaya jika Pemerintah AS menarik pasukannya dari kedua negara tersebut dan sampai tiba giliran Ahok. Saat mengetahui Ahok berasal dari Indonesia, senator itu kemudian meminta agar Indonesia banyak belajar demokrasi dari AS. Apa Indonesia? Kalian harus belajar demokrasi sama kami (AS),” ujar ahok menirukan ucapan sang senator. Ketika merespon ucapan itu, Ahok mengaku langsung menanyakan kepada si senator apakah mereka masih akan memilih Obama jika si capres beragama Islam, agama minoritas di Amerika. Senator tersebut menjawab “tentu saja tidak”. Kepada senator tersebut ia

membanggakan kampungnya Belitung Timur yang pernah memilihnya menjadi Bupati. Ahok mengatakan, 93 persen penduduk Belitung Timur beragama Islam yang dipilih justru saya keturunan China dan Kristen,” kata Ahok. Tak mau kalah si senator kemudian membanggakan bahwa negaranya memiliki prinsip menjunjung perbedaan yang dicantumkan dalam tulisan “*e pluribus unum*” kalimat tersebut tercantum dalam pita yang digigit burung elang yang menjadi lambang negara Amerika Serikat. Ahok kemudian menyatakan bahwa Indonesia juga punya lambang negara yang juga melambangkan prinsip menjunjung perbedaan, yakni burung Garuda yang mencengkram pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika". Kepada senator itu, Ahok mengatakan bahwa burung Garuda lebih unggul karena pita dibawa dengan cara digenggam, bukan digigit. "Artinya apa, burung elang Amerika kalau lapar pitanya dilepas. Jadi kalian orang Amerika pragmatis. Kalau bangsa kami, Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai pondasi yang begitu penting sehingga jadi pegangan burung Garuda, karna kami (Indonesia) terdiri dari etnis suku dan ribuan bahasa tetap harus bersatu" kata Ahok (Rudi,2016).

4.3.3. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Saat Menjadi Anggota DPR Republik Indonesia

Dalam pemilu legislatif 2009, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju sebagai calon legislatif dari Partai Golkar. Selama di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Ahok duduk di Komisi II. Dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya, vokal dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat

kiprahnya di DPR RI dia menciptakan standar baru: Anggota-anggota DPR semestinya bersikap bersih, transparan, dan profesional (BTP).

Komisi II adalah tempat yang tepat bagi Ahok dalam memperjuangkan aspirasi rakyat mengingat sebagai ‘orang kampung’ melihat banyak permasalahan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan. Ahok duduk di Komisi II yang mengurus masalah pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi ini bermitra dengan Departemen Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Basuki juga dipercaya jadi anggota Badan Legislasi (Baleg) sebuah badan kelengkapan DPR yang bertugas mengurus semua masalah legislasi atau perundang-undangan (Santoso,2015,h.113).

Ahok dikenal sebagai anggota Komisi II DPR RI yang ‘vokal’ di dalam menyerukan narasi politiknya. Ahok memang dikenal sebagai salah satu politisi yang aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dibalut gaya berbicara langsung ke sasaran, tanpa basa-basi (*to the point*), provokatif bahkan terkadang lebih mengarah ke sarkasme. Kritik pedas tersebut dilontarkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu (2011). Sebagai mana yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama kepada peserta rapat berikut:

“Seharusnya KPU itu membuat suatu usulan, yang menjadi persoalan selalu dikatakan bargaining calon independen menjadi masalah, KPU ada main dengan petahana segala macam. Ujung-ujungnya pemerintah, bapak tau kan sekarang pemerintah terutama

Partai Demokrat pak, itu terang-terangan mengatakan Gubernur akan dipilih oleh DPRD, mungkin selanjutnya Walikota, Bupati. Nah saya kan juga bersyukur berarti 600-800 miliar anggaran bisa kita potong dari komisi II. Untuk itu untuk apalagi ada KPU dan Bawaslu. Tetapi yang namanya demokrasi tidak seperti itu pak, pemerintah mengatakan habis uang banyak, saya katakan pemerintah tidak substantif. Ini salah KPU dan Bawaslu!

Tolong bikin terobosan dong pak! yang menjadi masalah itu dimana? Sekarang pemerintah juga lucu-lucu dulu mesti ada syarat birokrasi, sekarang ga boleh ada dinasti segala macam, saya kira itu betul tetapi melanggar HAM. Tetapi yang substantif mereka tidak bicarakan, yang kita tidak mau itu kan kalau si koruptor itu yang menjadi kembali pak, yang kita tidak mau ini, pencuri-pencuri uang ini..bos-bos gelap ini yang tidak membayar pajak, membayari orang ini yang menjadi kepala daerah dan KPU, Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Maksud saya harus bikin terobosan.

Di dalam alam demokrasi, yang buruk sama yang baik ini punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah itulah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu disini, bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena lapangan tidak rata. Tugas bapak meratakan lapangan, saya selalu bermimpi, para aktivis yang idealis ini 2014 bisa masuk ke politik ini tanpa dicurangi pak!

Saya sudah pernah mengalami pak, lalu bagaimana saya bisa duduk disini pak? (DPR RI Komisi II) karena kemudian kalian mendokumentasikan semua hasil suara saya, mereka tidak berani main pak. Saya menang 44%, maka itu duduklah saya di DPR RI, nah pertanyaan saya kenapa bawaslu tidak mau foto? Maksud saya apakah Bawaslu dan KPU tidak begitu ngerti urusan yang begitu murah dan saudara lakukan! Ini untuk mencegah maling..maling yang mau jadi pejabat! Supaya aktivis yang idealis ini bisa bertanding yang sama.” (Youtube, 11 Februari 2011)

Melalui *Scene* diatas menunjukkan argumen kritis Ahok kepada KPU dan Bawaslu yang dianggapnya lamban dalam menyelesaikan masalah teknis yang sering terjadi di lapangan. Penggunaan diksi ‘*Tolong bikin terobosan dong pak!*’, memperlihatkan suatu penekanan. Ia ingin menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan kinerjanya untuk melakukan terobosan upaya menghindarai

kecurangan dalam pemungutan suara, kedua membuat aturan jelas untuk calon yang maju independen sehingga tidak menutup kemungkinan PNS-PNS jujur dan Aktivis yang ideologis bersaing secara sehat tanpa politik uang. Argumen Basuki tersebut sebagai tujuan untuk meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia. Sesuai cita-cita sewaktu mendirikan CDT 31, untuk membuat iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat.

Dikezempatkan lain saat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi, untuk meninjau masalah pertahanan, kependudukan dan pemekaran daerah.

Basuki dihadapkan pada pilihan yang tak menyenangkan. Ketika seorang staff menawarkan kepadanya untuk memilih tiket pesawat ekonomi atau eksklusif.

Menurut peraturan yang berlaku, setiap anggota dewan dalam kunjungan kerja mendapat biaya dengan sistem *lum sum*, uang tiket eksekutif atau bisnis, uang saku, uang hotel semua dihitung dengan standart tertinggi di kota yang dikunjungi (Santosa,2015,h.115).

Basuki berpikir untuk melakukan penghematan dengan memilih kelas ekonomi dan selisih dari harganya ia kembalikan ke kas negara. Faktanya, anggota dewan meraup keuntungan dari selisih harga tiket. Basuki merasa risih dengan hal tersebut, ia kembali mengkritik tindakan anggota dewan.

“Dari sisi penghematan uang negara, saya setuju, anggota kalau melakukan perjalanan dinas sebaiknya tiket yang akan digunakan berada di kelas ekonomi, tapi faktanya adalah anggaran yang tersedia justru untuk kelas eksekutif atau bisnis, berarti tidak ada penghematan uang rakyat. Justru anggota dewan yang bersangkutan untung karena mendapatkan selisih dan hal itu merupakan penghasilan tambahan, apakah hal ini dilaporkan dalam pengisian SPT

Pajak? Jika tidak, bukankah ini merupakan contoh buruk kepada masyarakat?”(Santosa,2015,h.115.

Sejak kejadian kunjungan kerja ke Palu itu, Basuki mengayuhkan langkah-langkah kecil dengan melaporkan setiap aktivitas kerjanya sebagai anggota DPR, mulai dari rapat kerja sampai kunjungan kerja. Bahkan Basuki membuat laporan keuangan, lengkap dengan rincian biaya yang digunakan selama kunjungan kerja ke berbagai daerah. Dan Basuki setuju agar setiap anggota DPR, termasuk pejabat eselon satu dan dua, diwajibkan menggunakan kelas ekonomi dalam melakukan perjalanan dinas (Santosa, 2015,h.116)

Dari *scene* diatas motif komunikasi Basuki atas argumen yang dilontarkannya adalah menunjukkan dirinya tengah berjuang menularkan “budaya bersih” kepada sesama anggota dewan untuk mengembangkan budaya antikorupsi, transparan, dan profesional dengan menuntut pembuktian terbalik. Hal ini dibuktikannya dengan mengayuhkan langkah-langkah kecil dengan menjadi pionir dengan melaporkan setiap aktivitas kerjanya sebagai anggota DPR, mulai dari rapat kerja sama sampai kunjungan kerja. Ia juga membuat laporan keuangan, lengkap dengan rincian biaya yang digunakan selama kunjungan kerja ke berbagai daerah (Santoso,2015,h.116).

4.4. Komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama Saat Menjadi Gubernur DKI Jakarta

4.4.1. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Partai Gerindra dan DPRD DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama terlihat semakin proaktif melawan rasuah. Ahok ingin Metropolitan terbebas korupsi, *Jakarta Zero Corruption*. Ia ingin bersih-

bersih birokrasi dari rasuah, calo dan premanisme. Namun, tantangan itu tidak mudah, ada lebih banyak jalan terjal daripada jalan terbentang. Tidak sedikit terbentur jalan buntu ketimbang terobosan yang memberikan jalan keluar. Menata Jakarta memang tidak gampang, selalu saja ada pihak-pihak yang mempersulit, yang biasanya mereka yang akan kehilangan sumber uang ilegal (Randan,2014,h.70).

Pada Oktober 2014, kemenangan Jokowi-JK menjadi presiden terpilih periode 2014-2019, kompas politik nasional berubah arah Kubu Prabowo-Hatta gagal berkuasa. Sengketa Pilpres ternyata tidak kunjung selesai berdampak kepada gugatan kubu Prabowo-Hatta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun gayung tidak bersambut, PTUN menyatakan tidak punya wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta.

Gagal “menduduki” Istana Negara, Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS, ditambah Partai Demokrat) mengalihkan kekuatan, ingin mendukung pilkada lewat DPRD (Seri Majalah Tempo, 2014,h.132). KMP ingin ‘mematikan’ Pilkada langsung, dan membangkitkan Pilkada tidak langsung zaman rezim Orde Baru. Gubernur, bupati, dan walikota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi melalui perwakilan DPRD. Tak ada lagi *Vox Populi*, *Vo Dei*, Suara Rakyat, Suara Tuhan. Hak memilih rakyat segera dirampas. Kedaulatan rakyat ditelikung. Indonesia kembali menganut “demokrasi perwakilan.” Gaya orde baru. (Santosa,2015,h.263)

Wacana pilkada tidak langsung lantas memancing reaksi keras dari salah satu kader Gerindra, yakni Plt. DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia memiliki pandangan politik yang bersebrangan dengan partai pengusung, dengan vokal ia menentang partai politik dan pihak yang mendukung terhadap rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Bukan ngetweet sekelas Fahri Hamzah maupun menyeruakan pendapat melalui tulisan yang bisa dimasukkan ke dalam kolom surat media. Ahok yang memiliki ciri khas terletak pada kritik pedasnya tanpa tebang pilih. Keterbukaannya kepada media, membuatnya menjadi seorang *newsmakers*, yang setiap tindakannya terlepas dari pemberitaan positif maupun negatif tidak terlepas dari sorotan media. Kegusaran tersebut diungkapkannya melalui *doorstep* dengan wartawan sama sekali tidak ada nada dilematis saat ia melakukan di Balaikota Jakarta ia mulai menalarkan argumentasinya:

“Dulu kenapa ada reformasi? Karena ada pemilihan kepala daerah langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana itu terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurus rakyatnya.”

“Eksekutif nantinya hanya akan menjadi ‘sapi perah’ anggota dewan, dan kongkalikong politik semakin dahsyat. Gubernur, bupati, atau walikota tidak akan pernah lagi mengurus kepentingan rakyat. Para kepala daerah itu nanti hanya mengurus kepentingan DPRD yang telah memilih mereka. Setiap tahun akan ada pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD. Jika anggota dewan menolak, kepala daerah langsung diberhentikan. Itulah yang terjadi di zaman Orde Baru, DPRD berkuasa.” (Santosa, 2015, h. 266)

Selain *money politic*, efisiensi biaya adalah alasan kuat untuk menggelar Pilkada oleh DPRD yang tentu saja tidak semahal pilkada langsung. Tetapi, Ahok menampik hal tersebut dalam argumennya tegas dan lugas yang menggunakan bahasa tidak baku. Bahasanya memposisikan dirinya sejajar, seperti seorang teman yang sedang menggurui atau menasehati, “Sekarang reformasi sudah

terjadi. Alasannya biaya mahal, ya karena mesti nyogok rakyat; *lo aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok, bisa kepilih menjadi gubernur dan wagub di Jakarta.*”(MetroTv: Ahok jadi Polemik, 2014)

Melalui argumennya tersebut, tersirat nada kekecewaannya kepada partai pendukungnya. Ahok merupakan seseorang yang lahir dan namanya dibesarkan dari pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat. Demokrasi Hakikatnya adalah partisipasi, semakin luas demokrasi semakin sehat demokrasi, dia tahu masyarakat sudah jadi bagian yang menggairahkan dari demokrasi. Ia mengklaim memang jika pemilihan langsung akan banyak memakan biaya, namun Ahok membuat penekanan pada pengucapan “sapi perah” anggota dewan yang bermakna konotasi negatif yaitu bermakna mencari untung dari orang lain yang tidak halal.

“Mereka yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang bukan berjiwa rakyat. Tolong yang mengusulkan itu jangan munafik. Jangan hanya alasan biaya mahal. Memang lebih murah nyogok anggota dewan; itu mah bukan negarawan, dan pikirannya pengecut.” Kata Ahok geram (MetroTv: Ahok jadi Polemik, 2014)

Tanpa basa-basi Ahok kembali melontarkan kritik kerasnya, ia menuding Kementerian Dalam Negeri juga turut andil sebagai pihak pengusul RUU Pilkada bersama partai-partai dalam Koalisi Merah Putih tidak pro-rakyat atau tidak negarawan. Melalui argumennya ia mempertanyakan sosok negarawan di Negeri secara tersirat ia menyebut sosok itu “*munafik*”. Sosok negarawan haruslah mendengar suara rakyat bukan malah mempersempit partisipasi rakyat. Menurutnya sulit bagi calon kepala daerah dari kalangan minoritas dan terbukti bersih untuk bisa bersaing merebut kursi pemerintahan. Jika dirinya dipilih

melalui DPRD tentu ia tidak akan bisa menduduki kursi kepala daerah DKI Jakarta seperti sekarang ini. kembali mengingatkan, bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran dan melupakan sejarah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat:

Melalui *scene* diatas Ahok yang merupakan kader Gerindra tidak sungkan mengkritik tajam partainya jika Pemilihan Kepala Daerah dilangsungkan lewat DPRD. Ia menganggap tindakan partainya yang tergabung dalam KMP tersebut bukan jaminan mengakhiri *money politics*, tapi justru memindahkan *money politics* dari ranah publik ke ruang tertutup (politik transaksional) yang tidak bisa diawasi rakyat. Dan hal ini tentu mengembalikan demokrasi Indonesia ke Orde Baru dan menghilangkan fungsi *check and balance*. Dimana DPRD nantinya hanya akan memilih calon yang sejalan dengan kepentingan golongannya.

Pernyataan Ahok saat *doorstep* di Balai Kota itu seponatan langsung ditantang oleh ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. M.Taufik, “Jangan cuma cerita. Saya kira segera saja bikin pengunduran diri. Silahkan, itu hak orang, mau maju, mau mundur, silahkan. Partai tidak akan melarang, “Kalau mau konsisten, setelah mundur dari partai, mundur juga dari jabatan gubernur. Kan, dia bisa jadi, seperti sekarang karena partai. Jadi, jangan mau enak nya aja.” (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya, “Kita ini ibu yang baik membesarkan anaknya. Biar rakyat yang menilai, anak lupa sama ibunya, ya sudah seperti Malin Kundang” (Santosa, 2015,h.269).

Rabu 10 November 2014, Ahok resmi mengundurkan diri dari Partai gerindra. Ahok meminta dua orang staffnya untuk mengantarkan surat itu ke Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan. Hari itu juga Ahok mendapat tanda terima atas surat pengunduran dirinya dari DPP Gerindra. Di secarik kertas tertulis: *Sudah terima dari Ir.Basuki Tjahaja Purnama, M.M kepada Sekjen DPP Partai Gerindra. Berupa surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Gerindra dan Kartu Keanggotaan Gerindra* (Santosa,2015,h.271). Ahok mengatakan latar belakang pengunduran dirinya karena adanya perbedaan cara pandang nya dengan kebijakan partai terutama dalam wacana RUU Pilkada, Hal tersebut diungkapkannya saat *doorstop* menanggapi jurnalis di di Balai Kota, sebagai mana dikatakannya:

“Saya hanya mengatakan saya mengundurkan diri dari gerindra, karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) anda harus mendukung, dan mensukseskan semua program partai politik. Sedangkan saya itu berlawanan dengan nurani saya, kalau partai politik saya mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sedangkan saya bisa berani masuk politik karena saya ada kesempatan dipilih rakyat.” (Metro TV,2014)

Saya ga mau jadi budak DPRD. Bagi saya DPRD itu hanya pengawas, pengawasan, anggaran dan legislasi, tidak bisa mengontrol saya. Mengontrol saya rakyat, kalau Cuma dikontrol 100 orang lebih, kita bayar 60 orang digaji aja pulang, tiap hari dibawa jalan-jalan keluar negeri aja, kita *service* aja dia habis ngapain ngurus 10 juta orang.” (Metro TV, 2014)

Melalui pernyataannya terselip nada kecewanya saat diwawancara oleh media. Ahok yang biasanya memiliki ciri khas nada berapi-api, menggunakan bahasa yang baku dan santai walaupun bukan berada di situasi formal. Ia sedikit menurunkan volume dan kecepatan suaranya dengan wajah datar, menunjukkan

kerendahan dirinya bahwa ia tidak mampu menjadi kader partai yang baik hal itu ditekankan saat menyatakan kalimat *“Saya hanya mengatakan saya mengundurkan diri dari Gerindra, karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik.”* Namun ia tetap melontarkan kata sarkasme bernada negatif *“budak”* yang ditujukan kepada DPRD. Dengan maksud ia tidak ingin di setir oleh kepentingan oknum-oknum yang berada DPRD karena hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Ahok meyakini bahwa legislatif selaku wakil rakyat hanya bertugas sebagai pengawas kinerja eksekutif. Jika kinerja eksekutif telah melenceng dari berbagai program yang ada, DPRD wajib menegur dan mengoreksi kepala daerah. Bukan pengendali kepala daerah dalam merealisasikan berbagai kebijakan publik. Kekonsistenan sikap politiknya tersebut sudah dimulai semenjak ia terjun menjadi kepala daerah di Belitung Timur hal tersebut diklarifikasi Ahok saat diundang di talkshow Metro TV, di Episode Ahok jadi Polemik:

“Saya bisa karena saya tidak curi uang, karena saya tidak mempertanggungjawabkan setiap tahun kepada DPRD. DPRD mayoritas saya lawan! orang saya dipilih rakyat kok, anda tidak bisa mecat saya. Selama saya jujur, kenapa saya bisa melawan DPRD yang Mayoritas. karena setiap anggota DPRD kan punya hati nurani, kalau hati nurani kan tidak membedakan suku agama, ras, dan etnis. Kalau hati nuraninya sama pasti akan membicarakan kemanusiaan.”

“Kenapa saya mau membayar harga mahal, karena Jakarta inilah tontonan yang paling baik untuk membuktikan bahwa Pilkada langsung anda mendapatkan kesempatan mendapatkan yang terbaik, bukan permainan paham-kepaham dari DPRD, (Metro Tv; Ahok jadi Polemik,2014)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunis yang tidak mengerti etika yang

menganggap partai sebagai 'kutu loncat'. Fadli Zon menganggap Ahok tak pantasnya ikut mengomentari mengenai RUU Pilkada, apalagi sampai berujung pada rencana mengundurkan diri sebagai kader Gerindra. Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Gerindra seharusnya mengikuti keputusan partai. Fadli Zon juga mempertegas bahwa Gerindra mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena pilkada langsung dianggap lebih banyak mudaratnya, seperti banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena biaya tinggi, merebut kekuasaan horizontal contohnya, konflik di Papua, kantor DPRD Dibakar (Kuntoro, 2014).

Soal pernyataan Fadli Zon, Ahok tidak sependapat ia kembali membalas argumen tersebut di media. Pemilihan kepala daerah di Papua memang diwarnai pembakaran kantor DPRD, tetapi di Jakarta berlangsung aman dan tenteram. Ahok masih mengingat detik-detik ketika meninggalkan Golkar dan ditarik Gerindra untuk dicalonkan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena berbagai janji pro-rakyat dan tidak bermain *money politics*. Ahok menjadi heran, kenapa Gerindra sekarang justru memiliki pandangan Pilkada melalui DPRD. Ia benar-benar tidak bisa menerima keputusan Partai Gerindra yang mendorong pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Ia menganggap Gerindra sudah tidak lagi sejalan dengan visi politiknya. Gerindra sudah melakukan *blunder*. Ia pun siap berpaling, "Saya bilang dari awal, saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Bagi saya, Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat pilihan." Tegas Ahok (Santosa, 2015, h.270).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, “Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.” Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. “Kalau benar, berarti saya dapat satu ya,” kata Jokowi (Kuwado, 2014).

Namun, Ahok menjamin dirinya tidak akan membelot ke PDI Perjuangan atau partai politik lainnya. Ia akan membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin tanpa bantuan partai politik. Ia meyakini, jauh lebih penting, seorang gubernur mendapat dukungan rakyat daripada dukungan anggota DPRD. Lalu Ahok menjanjikan masyarakat Indonesia sebuah tontonan yang menarik selama sisa tiga tahun masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta tanpa menjadi anggota partai meski harus menghadapi 106 anggota DPRD dari partai politik. Bersiteguh akan membereskan semua tugas Jakarta di sisa masa jabatannya, ia menyebut upaya itu sebagai bumbu menarik dari tontonan yang dia janjikan (Santosa, 2015, h. 272)

Melalui situasi *scene* di atas terdapat konstentasi makna terhadap pernyataan-pernyataan dari aktor-aktor politik. Munculnya perdebatan yang tumbuh menjadi kontroversi memperlihatkan sikap aktor-aktor politik yang mengecam sikap politik ahok untuk muncul dari partai Gerindra yang membesarkan namanya dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, perubahan sikap

Basuki Tjahaja Purnama yang awalnya kooperatif menjadi nonkooperatif (politik zig zag) menunjukkan bahwasanya ia telah kecewa terhadap partai politik. Motivasi Awal Ahok mendukung Partai Gerindra karena memiliki pandangan ideologi yang sama yaitu Pancasila, tidak memandang suku, agama, dan ras dalam memilih calon yang diusungnya serta pro-rakyat. Namun karena keputusan politik Gerindra ia melihat adanya perbedaan garis perjuangan dengan partai politiknya yang ingin melakukan RUU pilkada. Sikap (*attitude*) Ahok jauh dari keberpihakannya mendukung Gerindra merealisasikan Pilkada melalui perwakilan DPRD. Opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Terselenggaranya pemilihan langsung oleh masyarakat merupakan bagian dari pesta demokrasi yang menggairahkan dan akan memberikan kesempatan kepada pemimpin lokal daerah yang idealis dan berkualitas bersaing secara sehat dalam politik nasional tanpa harus terikat dengan kepentingan transaksional dengan DPRD. Ahok merasakan bahwa pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah rakyat.

Tidak sampai disitu saja Pada Tahun 2015, Ahok kembali mengkritik DPRD DKI Jakarta, tampaknya ia tidak puas atas penganggaran uang negara yang dianggapnya tidak tepat sasaran dan penuh trik jahat. Saat penyusunan APBD DKI sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta tidak berjalan mulus. Kedua pihak kerap berselisih dan saling kritik melalui media. Sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dan Ahok berawal dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang diajukan DPRD mempertegas

kembali bahwa praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi (Majalah Gatra,2015). Kritik-kritik pedas pun mengandung muatan sindiran yang dilakukan di media, melalui salah satu acara TV swasta, Ahok diwawancarai oleh presenter Kompas Aiman Witjaksono (2015) dengan ciri khas bahasanya yang informal dan dominan meninggi dalam mempertahankan argumennya:

“Orang santun itu ga ada guna kalau kamu fitnah, kita sadar betul ini resiko kehilangan nyawa melawan koruptor yang santun-santun di negeri ini”

“Kalo kami tidak buat salah saja difitnah, kalau betul ada suap 12,7 Triliun, kenapa si DPRD membatalkan laporan ke Bareskrim, berarti lu pengecut, kalo lu memang ada bukti ya laporin dong! Jantan dong jadi orang, lapor dong! Kita udah ada anggaran 12,7 T untuk beli tanah, alat berat, dan truk sampah sedangkan lu (DPRD DKI) anggarin 12,1 T untuk beli UPS, ya ga bisa dong! Barang lu ga ada guna nih. Suara meninggi.”

“Ini kan sudah puluhan tahun dilakukan, tapi cuma sekarang bermasalah, berarti yang tidak beres Gubernur si Ahok ini, bukan tidak bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berkonspirasi”

“Dia Cuma modal otaknya aja masukin anggaran belanjanya selesai, justru saya sekarang berhasil saya mau bikin DPRD ngamuk nih supaya dia ga kebagian rezeki lalu dia marah besar semua pengeluaran uang di DKI di Plototin habis, di kritik abis, sip *lo* jadi auditor *gw* sekarang, sesuai *lo* di gaji, sekarang bagus nih kerja anak buah *gw* tuh yang 72.000 pegawai yang diawasin. Kalau ini *lo* awasin *lo* jadi auditor gratis saya, *lo* awasin deh kasih tau siap yang maling, siapa yang nyolong kasih tau saya biar langsung saya pecat!!

Jika diamati argumen di atas secara mayoritas menunjukkan kegeraman

Basuki Tjahaja Purnama terhadap langkah DPRD. Penyematan kata “*lo pengecut*”, “*jantan dong*”, “*cuma modal otak*.” Penggunaan kata-kata ini biasanya digunakan jika ingin menyudutkan lawan Tujuannya sebagai penegasan untuk memperkuat makna. Kata ‘*jantan*’ itu sendiri sudah memiliki makna yang kuat, garang, dan ganas. Merupakan muatan sindiran pada sikap DPRD, terkesan

meremehkan dan merendahkan kualitas DPRD. Ahok juga juga mengganti kata koruptor sebagai simbolisasi dengan sebutan yang lebih receh yaitu “*maling*.” Beberapa kali Aiman Wiyjaksono, selaku Host Eksklusif Kompas mengingatkan bahwa mereka sedang melakukan acara *Live* karna kerap kali Ahok mengeluarkan kata-kata kasar maka sering terjadi sensor ditengah ungkapan yang dilontarkan Ahok.

Sikap melawan arus Ahok yang berujung pada penolakannya terhadap program usulan tersebut membuat DPRD gusar. Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana dari Partai Pembangunan juga merupakan salah satu penggagas hak menyelidiki Gubernur Jakarta tersebut menampik sebutan ‘anggaran titipan’ atau ‘program siluman’. Menurutnya bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan dana secara terbuka dan melibatkan swadaya masyarakat:

“Kami dan SKPD duduk bersama membahasnya. Tapi usul Dewan ditolak Basuki. Dia menganggap usul itu siluman. Nih, ya, es kemong pake roti. Ahok kalo ngomong ati-ati.”(Seri Majalah Tempo,h.38,2015)

Untuk mengecek klaim Lulung, Ahok segera mengevaluasi anggaran 2014 yang pengajuannya dan pengesahannya belum melalui *e-budgetting*. Ia fokus pada usul pengadaan *Uninterruptible power suplay* (UPS) yang menjadi bagian dari usul program visi misi DPRD di kecamatan dan kelurahan se-Jakarta Barat. Program yang diusulkan Komisi A itu misalnya, bernilai Rp 4,2 miliar di kecamatan Cengkareng, namun Camat Cengkareng, Ali Maulana menampik bahwa mereka mengusulkan pengadaan UPS (Seri Majalah Tempo,2015,h.33). Melalui temuan

itu Ahok yakin anggaran itu bisa muncul berkat permainan DPRD bekerja sama dengan birokrasi.

“Ironis sekali. Masak iya, saat 46% sekolah mau ambruk, pengadaannya justru untuk UPS, bilingual system, meja-kursi dan papan elektronik. Dan ini terjadi bertahun-tahun.” (Seri Majalah Tempo,2015,h.38).

DPRD semakin meradang melihat jawaban Ahok. Mereka mengggalang pengajuan hak angket, yang disetujui semua fraksi. Termasuk Partai PDIP yang mengusung Jokowi-Ahok pada 2012. Menurut Ferrial Sofyan mantan ketua DPRD Jakarta periode 2009-2014 tradisi menitipkan anggaran di luar kesepakatan rapat tak pernah bermasalah karena selalu diloloskan pemerintah. Nilainya puluhan triliun rupiah, yang bisa dicairkan begitu anggaran disetujui Kementerian

Dalam Negeri

“Menurut pak Ferrial, Ini kan sudah puluhan tahun dilakukan, tapi cuma sekarang bermasalah, berarti yang tidak beres Gubernur si Ahok ini, bukan tidak bisa berkomunikasi, tapi tidak bisa berkonspirasi” (Seri Majalah tempo,2015,h.32)

Solusi yang ditawarkan Basuki untuk transparansi APBD adalah menggunakan sistem *e-budgetting*, bagian dari upaya transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar sistemnya bisa dipantau sehingga tidak bisa melakukan penyelewengan anggaran. Belajar dari pengalaman tahun 2012 Pemprov DKI sudah menggarkan untuk membeli truk sampah namun setelah sampai kepada Kemendagri anggaran tersebut tidak ada.

Adanya ketegangan politik yang intens diantara dua kubu yaitu Basuki dan DPRD, saat DPRD dikabarkan akan mengajukan Hak Angket kepada Basuki.

Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD dari Partai Pembangunan juga merupakan salah satu penggagas hak menyelidiki Gubernur Jakarta tersebut.

Menurutnya bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan dana secara terbuka dan melibatkan swadaya masyarakat. Ketua panitia hak angket DPRD DKI Muhammad Sangaji sebelumnya menyatakan Gubernur Basuki melakukan pelanggaran etika dan undang-undang terkait penyerahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif (Cahya, 2015).

Melalui tindakan (*act*) tersebut merupakan penggambaran sikap politik non-kooperatif Ahok kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok di kritik tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan DPRD. Namun ia kembali melakukan pembelaan diri dengan menanggapi hal tersebut saat *doorstep* di Balai Kota Jakarta:

“Ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi, apa yang mau diperdamaian, saya sampai mati juga tidak mau memasukkan 12,1 ke dalam APBD !! Terus kalo DPRD tetap ngotot tidak mau memasukkan e-budgetting yang dimasukkan SKPD bagaimana mau ketemu??”

“Orang bilang gaya komunikasi saya, mau komunikasi gimana? Ingat ga dulu sampai paripurna juga kemarin senyum..senyum..cipika-cipiki semua sama saya baik-baik kok. Siapa yang bilang gaya komunikasi saya jelek sama DPRD? Coba kalau saya terima anggaran DPRD 12,1 T baik ga mereka sama saya? Baik.. Jadi ini bukan soal komunikasi, ini soal 12,T Boss!! (MetroTV, 2015)

Ahok dalam argumennya bertutur dengan nada suara tinggi pada penggalan kata “cipika-cipiki” dan “senyam-senyum”. Terdapat penekanan digunakan Ahok untuk menunjukkan maksudnya pada penggalan “Coba kalau

saya terima anggaran DPRD 12,1 triliun baik ga mereka sama saya? Baik.”

Penggalan tersebut menunjukkan maksud bahwa dirinya bukan tidak bisa berkomunikasi santun, namun kepeduliannya terhadap pemimpin yang jujur. Ahok menunjukkan pribadi yang teguh pendirian, tidak berbelit-belit, anti ketidakadilan.

Tidak selesai sampai disitu, Basuki Tjahaja Purnama nampak menampilkan sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, melalui bahasa-bahasa sarkasnya Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan *pembelian uninterruptible power supply (UPS)* kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor. Kata-kata satiris pun keluar, Hal tersebut diungkapkannya melalui media nasional, Metro TV acara Stand Up Comedy:

“Orang bilang saya tukang ribut, tukang berantem enggak sebetulnya. Hanya terjadi selisih paham. Kira-kira kalo beli laptop mesti make UPS, kira-kira marah ga kalian? Laptop pake UPS? Lucu kan! Oh saya ngerti sekarang. UPS mahal? Murah dong! Kalo yang ini apa ini? Kata Ahok sembari mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya

“USB!” Jawan hadirin

“USB juga murah kan? Murah! Tapi kenapa jadi 6 miliar ini. Karena gini masalahnya, laptop ada baterai kaga cukup. Beli laptop pasti minta beli USB juga kan. Nah kenapa mahal? Karena USB yang dibeli kemarin itu bisa berfungsi menjadi UPS. Nah makanya didunia kaga ada itu! “ Lanjut ahok

Ya itulah kita jadi pejabat harus banyak belajar memang, banyak hal kita mesti pelajari, karena memang nasibnya begitu. Orang salah paham melulu. Dari tadi gw ngakak-ngakak dibilang marah-marah.

Kalo kamu memang mau jadi pejabat itu, syaratnya ga susah. Anda cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu kalo mau jadi pejabat. Pilnya itu agak gede, dia tulisannya PPG, artinya ada dua juga pertama

pinter-pinter goblok dan pura-pura gila. Nah tergantung nih, kalo pejabat minumnya yang pura-pura gila ya itu kaya model Saya. Tapi kalo tablet kedua yang diminum yang pintar-pintar goblok. Itu kaya oknum DPRD itu, UPS dibeli begitu mahal!”
(Stand Up Comedy, 3 Mei 2015)

Dari gaya ceplas-ceplos yang disampaikannya melalui acara *standup comedy* tersebut mengenai terkait kasus UPS yang dikaitkannya dengan DPRD membuat penonton terkekeh. Ahok memperlihatkan citra diri, dibalik sikap tegasnya, bahkan ekspresi marahnya yang kerap kali menjadi konsumsi publik tertangkap layar kaca, sejatinya Ahok memiliki kepribadian yang sangat humoris. Kata informal ‘lu’, ‘gw’ cenderung dituturkan Ahok sebagai upaya menyamakan bahasa dengan masyarakat agar mudah dipahami dan menimbulkan kedekatan.

Motif utama dari argumen Ahok pada adegan (*scene*) diatas adalah upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem *e-budgeting*. Karakter yang tegas ini ia tunjukkan dalam berbagai tindakan (*act*) selain memberikan kritik, ditengah argumennya Ahok juga memberikan solusi dalam penyusunan RAPBD 2015. Disini Basuki Tjahaja Purnama ingin menunjukkan solusi bahwasanya dengan menggunakan sistem *e-budgeting* sebagai langkah preventif Pemprov DKI dalam mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, lebih efisien dan dana yang dialokasikan akan tepat sasaran, sesuai yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Dari sisi distribusi, anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Seri Majalah Tempo, h.30, 2015). Hal ini dijamin Ahok tidak rawan kebocoran, karena pelaksanaannya diawasi ketat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dan

pemegang otoritas tertentu saja yang memiliki *password* dan kewenangan mengubah anggaran. Untuk itu kerap kali argumen yang dilontarkan, basuki secara gamblang mengatakan perlunya dukungan legislatif untuk mencapai harmonisasi pemprov DKI dalam mewujudkan transparansi.

4.4.2. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap BPK DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta melanjutkan sisa jabatan 2014-2017. Basuki Tjahaja sebagai orang nomor 1 DKI tersebut tentunya aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Komunikasi politik yang disampaikan Ahok mengandung pesan-pesan politik yang menjadi ciri khasnya dalam menyampaikan tujuannya. Dalam hal ini, Ahok menyampaikan pesan politiknya melalui sorotan stasiun televisi nasional atau melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Walaupun dia juga seorang eseksekutif pemerintahan, Ahok tidak segan melontarkan kritik tajamnya dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Basuki Tjahaja Purnama adalah sebuah anomali politik di Tanah Nusantara, ia memilih menjadi berbeda meski harus dicap sebagai si keras kepala. Ia tau untuk menjadi sama tak perlu harus serupa karena berbeda untuk maju itu adalah hal yang langka di negeri ini. Gaya komunikasinya begitu khas, mendobrak sekat-sekat ketabuan formal.

Pada tahun 2015, berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) DKI Jakarta pada rumah sakit sumber waras yang di beli Pemprov DKI Jakarta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menimbulkan polemik, dari pembelian lahan tersebut menurut catatan BPK DKI Jakarta adanya dugaan kerugian negara

sebesar 191 miliar rupiah dalam pembelian tersebut. Adanya perbedaan acuan dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras mengundang kontroversi. Ahok mulai mengkritik kinerja Badan audit tersebut serta Ahok menantang BPK untuk menempuh jalur hukum agar lebih transparansi dan dapat disaksikan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkannya melalui wawancara dengan wartawan MetroTV News. Ia tampak mengungkapkan kemarahannya dengan bahasa lugas.

Menurutnya banyak oknum-oknum yang berlindung dibawah institusi termasuk dibawah naungan BPK DKI Jakarta:

“Nah secara logika begini, dia yang nuduh kita itu dibilang goblok, nanti tersinggung. Saya mengerti pikiran mereka, mungkin oknum BPK berpikir “kamu mana berani sih lawan BPK, saya mah ga peduli! Kalau Tuhan ngaco aja gue lawan, masalahnya Tuhan ga mungkin ngaco! Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. (Mata Najwa: Pertaruhan Ahok, 16 Maret 2016)

“8 bulan tidak manggil saya, dan mengatakan tidak mengikuti prosedur Undang-Undang, ini apa Boss!! Ini apa Boss!! BPK, lo kira gue takut. Makanya saya berpikir BPK ini isinya lebih banyak oknum. Kamu kira atas institusi BPK saya takut sama kalian, makanya saya bilang buka semua di pengadilan!” ujar Ahok dengan nada tinggi sembari menunjuk dokumen yang ia kirimkan ke majelis kehormatan BPK (MetroTv, 13 April 2016)

“Sekarang saya tanya, BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, jadi jangan asal ngomong di Republik ini. Saya bilang kepada salah satu PT yang audit saya, “kamu ada di BPK ya, salam tuh sama, Prof. Edi, bilangin “Ahok doain dia umur panjang” untuk liat Ahok jadi presiden.” Supaya saya berantas munafik-munafik.”

“Uda sore nih ya dia nanya pertanyaan yang lucu banget, pertanyaan dia sederhana, “Bapak pernah ga berpikir, kenapa bapak tidak perlambat NJOP?” Saya jawab” saya ga pernah berpikir rencana itu, karena itu kejahatan, tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial.” (Pemprov DKI, 14 April 2016)

Ahok dalam argumennya yang di atas, dengan gaya ceplas, penggunaan kata “Boss” dan juga diikuti penekanan nada saat mengucapkannya. Merupakan

sindiran langsung kepada seorang pimpinan BPK, Edy Mulyadi. Disini Ahok menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dan komunikator sejajar. Sama halnya dengan kalimat *“kamu ada di BPK ya, salam tuh sama, Prof. Edy, bilangin “Ahok doain dia umur panjang untuk liat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik.”*, dan *“Tuhan ngaco aja gue lawan,”* Dibalik argumen tersebut Ahok ingin menunjukkan ambisinya atas kepercayaan diri yang tinggi bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi Presiden untuk mengadministrasi keadilan sosial, memberantas oknum-oknum di pemerintahan yang tidak bisa membuktikan kesalahan orang lain seperti jargon-jargon yang selama ini diungkapkannya saat membahas topik korupsi.

Gaya komunikasi pembuktian terbalik juga menjadi argumen andalan Ahok, untuk mempertanyakan profesional dan integritas dari badan audit tersebut. Seperti kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai teguran terbuka dengan kesan meneguhkan pentingnya integritas, kejujuran sekaligus menyudutkan lawan bicaranya jika Ahok ingin menekankan sesuatu (Firdaus, 2015). Hal tersebut terlihat dalam kalimat *“Sekarang saya tanya, BPK berani tidak buktikan hartanya dari mana, jadi jangan asal ngomong di Republik ini.”*

Ahok tipikal orang yang tidak bisa bersilat lidah, di akhir Tahun 2015 Ahok menuding BPK secara terang-terangan menyembunyikan data kebenaran mengaudit laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta agar dirinya dikenai pamsus oleh DPRD dan diturunkan dari jabatan Gubernur. Hal ini ditunjukkannya dalam penyampaian pesan-pesan politik yang berisi tantangan kepada badan audit

pemerintahan DKI tersebut. Bahasa yang digunakan juga informal dalam situasi formal:

"Jadi, mereka ya, kalau saya lihat itu tendensiusnya memang pengin saya tidak jadi gubernur. Kalau saya menuduhnya begitu," kata Basuki di Balai Kota

"Kalau saya menolak diperiksa, BPK akan menafsirkan saya tidak kooperatif dan dia bisa pidanakan saya lho. Kalau dipidana, DPRD akan memecat saya dari gubernur, Tanya jawab itu dibuka saja, biar seluruh rakyat Indonesia melihat, pertanyaan-pertanyaan itu tendensius atau tidak. Tapi dia tidak mau kasih. Sekarang saya tanya, dokter boleh tidak membuka record pasien? Tidak boleh! Tapi kalau pasiennya mau dibuka boleh tidak? Boleh! Jawab wartawan

"Saya yakin orang Indonesia, pengen nonton 8 jam..9 jam pengen tau, ini di dalam diapain gitu loh, berani ga BPK keluarin? Ga berani. Terus lebih lucu lagi tersangka aja klo mau masuk penjara, kalo ga mampu dikasih pengacara. Ini staff saya mau masuk ngebantu ga boleh, saya mana tau berkas sebegitu banyak! Segepok berkas yang dibawa staff saya, untuk bantu cari ga boleh!

"Saya sangat bersyukur, anda begini kepada saya, ini membuktikan kepada seluruh rakyat ada stigma bahwa pejabat korup, tidak jujur, ada celah. Saya akan buktikan sama kalian, bahwa saya pejabat yang tidak ada celah. Saking kesalnya saya bilang "mungkin uda takdir dikasih Tuhan untuk melawan institusi..institusi, yang diisi oknum-oknum yang tidak betul. Saya sangat senang record saya tambah lawan BPK." Hasil audit akan dikirim ke KPK nih, kalo KPK menkhususkan saya dengan alasan tidak jelas. Berarti takdir saya juga nanti lawan oknum BPK. Wah top banget udah, lengkaplah Republik ini saya lawan semua! Ujar Ahok sambil terkekeh (Pemprov DKI Jakarta, 24 November, 2015)

Dalam argumen tersebut, Ahok secara terbuka memberikan tantangan kepada Kepala BPK. Ahok dalam memberikan kritik yang disampaikan BPK, sangat lugas dan tegas. Namun melalui teguran terbuka ini lebih lanjut bisa menjatuhkan harga diri dan citra diri dari lembaga BPK DKI Jakarta yang selama ini diyakini masyarakat sebagai lembaga yang profesional dan independen dalam melakukan audit. Terdapat penekanan pada kalimat "*kalau memang BPK ingin membuktikan tidak ada sesuatu. Tanya jawab itu dibuka saja, biar seluruh rakyat*

Indonesia melihat.” Digunakan untuk menekankan, agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan dan objektif dalam evaluasi proses audit anggaran tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu dan penempatan orang-orang di BPK haruslah orang-orang profesional, bukan orang yang punya kedekatan dengan parpol. Dan terlihat sikap Ahok menginginkan KPK lebih cermat menginvestigasi lebih transparan dan independen tanpa ditunggangi oleh muatan politis.

Terkait hasil kesimpulan penyidikan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras Agus Raharjo, Ketua KPK menyatakan selama proses penyidikan yang dilakukan KPK yang mulai dilakukan 28 september 2014. Penyidik sudah menyimpulkan bahwa sejauh ini KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Dan Agus Raharjo mengatakan bahwa kesimpulan tersebut bukanlah intervensi dari pimpinan KPK, melainkan laporan dari Tim penyelidik yang sudah bertugas selama beberapa bulan ini. (Beritasatu, 14 Juni 2016).

Namun pernyataan dari Ketua KPK tersebut belum memuaskan sejumlah pihak. Kasus RS Sumber Waras ternyata menjadi pematik elemen-elemen masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka datang untuk memberikan dukungan atas penuntasan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ratna Sarumpaet sebagai salah satu koordinator aksi AGSJ juga mengatakan bahwa pernyataan Ketua KPK, Agus Raharjo tidak berdasar.

Belum lagi audit investigasi yang dilakukan BPK tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Padahal menurutnya, BPK memberikan hasil sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Ratna juga menegaskan pihaknya akan mendukung seluruh langkah yang dilakukan BPK untuk membongkar seluruh dugaan melawan hukum yang dilakukan Pemprov DKI (Purba,2016).

Sama halnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung penuh BPK dalam penuntasan kasus sengketa lahan Sumber Waras, hal tersebut diutarakannya kepada awak di media bahwa :

“Hasil audit investigasi BPK, dinyatakan oleh Ketua BPK sendiri bahwa sudah terjadi kerugian negara itu, bagaimana kesalahan prosedurnya ada, tidak diverifikasi ada, tidak teliti dalam membeli ada, bisa memperkaya orang lain atau korporasi ada. Dari hal ini tidak ada kehati-hatian dalam membeli, biasanya orang yang mau membeli rumah saja kita cek dulu (Tv One, 20 April 2016).

“Saya sudah melihat langsung lokasi pembelian rumah sakit sumber waras itu, jelas bahwa lahan yang dibeli PemProv DKI itu adalah lahan terkunci (*landlock*), kalau mengikuti sertifikat kepemilikan bukan di Jln. Kai Tapang. Jadi, dimana otaknya gitu loh, saya tidak melihat rasionalitas lagi disini. Hukum mau diinjak-injak, dan ada usaha-usaha untuk melindungi orang-orang tertentu (Beritasatu, 16 Juni 2016)

Melihat hal tersebut Ahok tidak tinggal diam, kata-kata satiris pun dilontarkan untuk menanggapi orang-orang yang memberikan *counter-statement* yang ditujukan kepada Fadli Zon dan Ratna Sarumpaet. Argumennya tersebut diungkapkan saat melakukan doorstep di Balai Kota. Dengan nada santai yang menyiratkan sindiran ia mengatakan:

“Kasian Wakil Ketua DPR (Fadli Zon) kaya gitu ga ngerti tata negara, yang pilih BPK siapa? Komisi XI, yang pilih KPK siapa?Komisi III, sudah buat pansus belum oleh DPRD DKI? Sudah, lalu Hasil pansus dibawa ke KPK? Sudah. KPK sudah bikin surat belum ke BPK untuk melakukan audit investigasi? Sudah. Lalu KPK bilang belum ketemu bukti dari hasil

audit investigasi. Kata Ratna Sarumpaet saya membeli KPK, ya sudah! Kalau gitu yang dituduhkan Ratna Sarumpaet itu benar, KPK tidak ketemu berarti bohong, dia ga profesional, yang harus panggil KPK siapa? Komisi III. Yang harus panggil BPK ngauditnya ga bener siapa? DPR juga. Trus kalau panggil saya? Fadli zon emang kira saya bodoh, kalau tanya sama saya kan ga boleh buka hasil BAP dari BPK. Kalau merek panggil saya trus marah-marahin saya, nanti dibilang menghina yang terhormat, saya juga pernah jd yang terhormat Komisi II dulu”
(Pemprov DKI Jakarta, Maret 2017)

Kabar di media semakin berhembus terkait Ahok dinyatakan BPK DKI Jakarta telah melakukan kerugian negara sebanyak 191 Miliar, namun sebaliknya justru Surya Paloh, Ketua Umum Nasional Demokrat tersebut menyakini bahwa Ahok tidak terlibat dalam skandal suap kasus pembelian lahan RS Sumber Waras:

“Dukungan kita kepada Ahok jalan terus, Ahok tidak terlibat dalam hal yang merisaukan hati kita, ga ada yang lebih terbaik sampai hari ini kecuali Ahok. Jiwananya, Spiritnya, semangatnya ya itulah dukungan Nasdem sudah memenuhi ini.” (Metro TV, 10 April 2016)

Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap diri yang diusahakan. Pada satu sisi lawan ahok, diartikulasikan sedemikian rupa untuk menyampaikan hal-hal yang tidak terungkap di media, berusaha menunjukkan kebenaran faktanya bahwa ahok memang telah mengakibatkan kerugian negara dan sengketa pembelian lahan RS sumber waras. Sedangkan di sisi lain, pernyataan dari Ketua Umum Partai Politik yang mendukung Ahok yaitu Nasdem tetap berpegang teguh pada hakikatnya Ahok sebagai seseorang yang bersih dan jujur tidak mungkin terlibat dalam kasus tersebut dan memiliki keyakinan bahwa polemik tersebut muncul hanya dari pihak-pihak yang ingin menjegal pemerintahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jika dilihat tindakan (*act*) Ahok melalui *scene* diatas, serta *agency* melalui argumen yang dilontarkan Ahok dominan kritik daripada pujian. Ahok memang tampaknya tak bisa diam ketika ia ingin mempertegas kesalahan dari sistem kerja BPK DKI Jakarta, Ahok menggunakan kritik-kritik tajam oknum-oknum yang berlandung dibawah naungan BPK tujuannya (motif) ia ingin memberitahukan kepada masyarakat selama ini BPK tidak bekerja sesuai koridor, ia juga ingin agar BPK berbenah diri kembali kepada kodrat awalnya independen tidak ada intervensi dari konflik kepentingan. Sikap (*attitude*) yang dapat ditunjukkan disini bahwa Ahok merupakan poin yang diperdebatkan. Namun ia meyakini tindakannya selama ini jujur, bersih, dan transparan sehingga tidak ada alasan baginya untuk terjerat hukum untuk kasus sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

1.4.3. **Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Komnas HAM**

Pada tahun 2016 Ahok melancarkan relokasi Kalijodo namun warga yang tidak puas dengan kebijakan penggusuran tersebut kemudian melaporkan ke Komnas HAM. Sejumlah tokoh masyarakat kemudian mendatangi Komisioner Komnas HAM Hafiz Abbas, menyesalkan ketika aparat TNI dilibatkan dalam pembongkaran bangunan di Kalijodo, dan penggusuran bangunan Kalijodo sudah mengganggu psikologis anak yang sedang menjalani persiapan ujian dan mereka juga pengerahan aparat keamanan akan memberikan *shock therapy* kepada anak dan sejumlah persoalan sosial. Terlebih lagi menurut anggota Komnas HAM Hafidz Abbas, pembongkaran yang dilakukan minim dialog hingga menimbulkan kesan arogansi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Rudi,2016).

Ahok membantah tuduhan Komnas HAM bahwa telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia saat melakukan penggusuran warga. Ahok mengaku telah memfasilitasi warga yang memiliki KTP Jakarta untuk direlokasi ketempat yang lebih layak di rumah susun. Kalijodo yang merupakan kawasan penuh bangunan liar dan juga sebagai tempat Hiburan malam. Ahok menegaskan bahwa kawasan Kalijodo lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Kasus Kalijodo dalam Undang-Undang Agraria adalah pelanggaran menguasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, menurutnya bukan hanya Kalijodo, namun yang menempati sungai, waduk, juga akan direlokasi sehingga dikembalikan ke fungsi semula sebagai ruang terbuka hijau milik negara (RTH). dan dalil lain relokasi warga Kalijodo demi perkembangan anak yang tinggal di kawasan prostitusi. Langkah tegasnya ini juga didukung penuh oleh TNI dan Polri. Hal tersebut dikatakan Ahok saat diwawancarai di stasiun media nasional:

“Kaya Kalijodo bilang saya melanggar HAM anak-anak, mual saya mendengarnya kamu membiarkan anak-anak itu tinggal di Kalijodo jang..jreng jeng itu musik sampai pagi di prostitusi, apa bukan melanggar HAM? Bagaimana dia mau belajar dari kecil tinggal dilingkungan seperti itu, saya pindahkannya dijemput bus sekolah apa lebih baik, ada mesjid, ga ketemu orang aneh-aneh. Masa saya dibilang melanggar HAM. Justru anak-anak susah tidur, susah belajar mendengar dangdut jraang..jrenng..jeng. Ngaco kaya begitu! Itu Cuma omongan orang yang isi otak kiri dan kanannya gimana, mesti dilihat itu otaknya penuh apa enggak, jenis apa, apa jenis udang, yang encer atau keras.” Kata Basuki santai (CNN, 14 Maret,2016)

Rencana penggusuran kawasan Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjadi perhatian publik. Terjadi perseteruan wacana antara Ahok dan tokoh Kalijodo. Mereka bersikeras tidak

mau dipindahkan ke rumah susun. Padahal, Ahok sudah menyiapkan rusun buat warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI sementara bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.

Menurut warga, mereka lebih dulu tinggal di Kalijodo dibanding keputusan Pemprov DKI menetapkan kawasan tersebut sebagai jalur hijau, bahkan ada warga yang tinggal di Kalijodo secara turun temurun. Untuk itu salah satu tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz atau akrab disapa Daeng Aziz menolak dikatakan warga liar dan menuntut keadilan. Mulai Komnas HAM hingga DPRD DKI didatangi Daeng Aziz untuk mengadukan rencana pengusuran Kalijodo.

Bahkan Daeng Aziz beberapa kali mengeluarkan pernyataan bernada mengkritik dan menantang Ahok:

“Jadi selama ini di televisi sudah ada sosialisasi, jangan sosialisasi komunikasi pun tidak ada. Tapi kemarin polisi, tentara, satpol PP kurang lebih 200 orang itu hanya menempelkan selebaran. Bahwa itu sudah dianggap sudah sosialisasi, eh itu caranya menawarkan bagaimana secara manusiawi atau seperti pencuri? (TV One 16 Februari 2016)

“Dari informasi pengakuan orang yang tinggal temurun, 70 tahun tinggal disana. Saya 20 tahun tinggal disana. Status tanah memiliki bukti ditandatangani oleh pak lurah, saya bayar pajak satu objek Rp 16 juta setahun. Ini diakui oleh pemerintah bukan?. Jangab mencari-cari kesalahan masyarakat. kami tidak mau hak kami dikurangi sedikitpun. Jika ada saya akan menuntut secara hukum. Jangan saya dipaksaksakan untuk melawan. Kata Daeng Aziz lugas (Merdeka, 17 Februari 2016)

Sementara salah satu anggota DPRD yang didatangi Daeng Aziz yang dimaksud adalah Haji Lulung. Dan Lulung juga sempat mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Ahok melalui dialog Interaktif di TV One:

“Saya sangat mengapresiasi Pak Ahok melakukan penertiban prostitusi. Dan harus dipahami penertiban itu harus melakukan

pendekatan, jangan didahulukan kekuatan tentara dan militer karena kemarin saya mendengar belum ada sosialisasi namun sudah menempelkan selebaran pemberitahuan yang dikawal oleh polisi.”

“Kalau nanti tidak ada kesepakatan di tingkat kota, walikotanya jangan diberhentiin, lakukanlah komunikasi dimana saja mau di Kapolda, di Kodam, atau Kantor Gubernur, undang mereka trus pak Ahok harus ngomong, jangan sembunyi, kan rakyatnya dia.”
(Tv One, 17 Februari 2016)

Pernyataan Daeng Aziz dan Haji Lulung di media, alhasil sampai ke telinga Ahok. Dengan demikian, Ahok menegaskan tidak ada warga yang boleh tinggal di kawasan Kalijodo tersebut. Ditambah kawasan tersebut diketahui sebagai jalur hijau. Sehingga jika mereka bersikeras tinggal maka dapat dipidana.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut itu pun membalas pernyataan Daeng Aziz dan Haji Lulung. Ahok menjawab dengan santai dengan wajah sumringah ia mengatakan:

“Kalau dia menuntut kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia suruh baca undang-undang, dia cari Lulung sebenarnya uda cocok. Lulung kan punya kantor pengacara, di dalam sistem undang-undang pokok Agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan tanda milik. Terus kalau kamu duduk di tanah negara itu salah, bisa pidana, Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang dimanfaatkan untuk bisnis, itu pidana.” (Metro Tv, 16 Februari 2016)

Di Pertengahan tahun 2016 pada bulan Juli, Ahok juga melontarkan argumennya saat diwawancara oleh Najwa Shihab.

Ahok : “Sekarang saya tanya kalo saya kirim orang suruh dudukin rumah anda bagaimana? Anda usir saya dan bilang saya melanggar HAM. Hamburger mah itu namanya jadi mesti jelas HAM mana.

Najwa Shihab: *Yang membuat orang mengkritik anda bukan hanya penggusurannya, tetapi pendekatan yang dambil kalau dulu pak Jokowi melakukan pendekatan puluhan kali PKL ditemui, diajak bicara baik-baik.*

Ahok: “Mana puluhan kali, itu mah di solo, Jakarta juga dua kali uda saya gusur aja.”

Najwa Shihab: *Anda yakin sudah melakukan pendekatan yang tepat pak?*

Ahok: “Sekarang gini, kalau kamu terus ngeyel, saya dudukin rumah anda, saya ngomongin baik-baik. Trus ga mau keluar, dan minta bagi duit, kamu kira-kira ngapain saya?”

Najwa Shihab: *Pak Ahok mereka merasa itu rumah mereka loh, mereka bayar listrik, mereka bayar segala kewajiban sebagai warga negara.*

Ahok: “Makanya ini persoalan bangsa ini, puluhan tahun salah dikira benar, pas kita benarin jadi masalah, itu aja. (Mata Najwa, 18 Juni 2016)

Argumen diatas secara tersurat, menunjukkan kemarahan Ahok ketika ia menyebut kata “mual,” merasa Komnas HAM tidak mengerti pokok permasalahan dari jenis pelanggaran HAM tersebut, karena Indonesia adalah negara hukum sehingga segala bentuk pelanggaran yang tertulis di dalam Undang-Undang harus ditegakkan termasuk menguasai tanah negara untuk kepentingan pribaditerlihat pada penekanan kalimat satir “*Hamburger mah itu namanya jadi mesti jelas HAM yang mana.*” Perbedaan gaya pendekatan yang dianggap Ahok berbeda dengan walikota solo dalam merelokasi warga tersebut karena masalah di Jakarta begitu kompleks, warga-warga tidak memiliki sertifikat tanah dan membuat tempat tinggal mereka diatas tanah negara (zona hijau) yang istilah kasar disebut Ahok adalah “dudukin tanah negara,” terlebih lagi Ia menegaskan pemerintah harus melakukan tindakan untuk mengatasi kesenjangan sosial jika Kalijodo dibiarkan terus beroperasi sama saja membiarkan penyakit masyarakat menggantungkan hidup dengan sumber pencaharian yang salah. Dalam mengungkapkan argumen politiknya Ahok masih dengan ciri khasnya melakukan

penekanan melalui umpatan informal “otaknya udang, encer, atau keras”, “Ngaco” dan “ngeyel” ditujukan kepada masyarakat yang menentang relokasi kalijodo.

Pasca pengusuran, Ahok dengan nada tinggi mengecam tindakan Komnas HAM (*act*) yang membela terhadap dua pabrik dikawasan Kalijodo tanpa melihat aturan mendasar. Bahwa lokasi pembangunan pabrik tersebut berada di jalur hijau negara yang justru patut dipertanyakan sertikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut Ia tidak segan memenjarakannya (*agency*). Ia melontarkan nasihat kepada Komnas HAM agar bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dinilainya tak pernah mengkritisi permasalahan di kawasan Angke, Jakarta Utara. Terkait kerang hijau tak layak dikonsumsi karena mengandung logam berat serta mempekerjakan anak-anak dibawah umur.

“Saya penjarain yang punya pabrik baut dan bihun. Biar dia *terkencing-kencing*, gara-gara Komnas HAM mau dibelain dia! Saya mau penjarain dia. Kalau masih nantang lagi, saya proses suratnya, penjarain yang punya pabrik baut. Saya mau tahu sampai mana Komnas Ham membantu, penjarain saja!” tegas Ahok dengan nada tinggi dengan ekspresi menegang (Tribunnews,26 Agustus 2016)

“Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari ribut-cari ribut sama saya lagi. Yang susah-susah orang, anak kecil kerja, lu (Komnas HAM) enggak pernah ngomong di Angke. Kerang hijau yang sudah ada racun, logam, lu ga pernah ngomomng. Kalijodo itu gue rasa yang ngomong HAM itu, dia belum lahir sudah ada Kalijodo, enggak pernah komentar.” Tuter Ahok (NewsDetik, 26 Agustus 2016)

Penggunaan diksi “*penjarakan*”, “*tangkap*” terdengar sangat frontal, kata-kata ini sering mengingatkan kita pada zaman orde baru dimana zaman kekuasaan Soeharto ketika ada yang menentang kebijakannya. Argumen berapi-api Ahok

terlihat dalam penggunaan kalimat satir dan lugas “*Biar dia terkencing-kencing, gara-gara Komnas HAM mau dibelain dia! Saya mau penjarain dia.*” Ditujukan kepada masyarakat yang “ngeyel” dalam istilah Ahok artinya sudah salah menduduki tanah negara tetapi masih ngotot bertahan. Kritik pedas yang menunjukkan kegeramannya kepada Komnas HAM terlihat pada kalimat “*Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari ribut-cari ribut sama saya lagi,*” pada kalimat tersebut merupakan sebuah penekanan agar Komnas HAM seharusnya berada di jalur yang sama dengan Pemprov DKI untuk mengembalikan hak-hak negara atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di lapisan masyarakat. Penekanan itu artinya sudah sering terjadi selisih paham antara Komnas HAM dan Pemprov DKI sebelumnya contoh saat menangani relokasi kampung pulo.

Melalui *scene* diatas, sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama selaku pemimpin kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian pemukiman dan tata ruang dengan merelokasi Kalijodo (*act*). Melalui kritik pedasnya kepada Komnas HAM, ia ingin menyampaikan agar seharusnya Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis bersama Pemprov DKI dalam melakukan penegakan hukum dengan mengambil kembali hak-hak negara atas tanahnya dari warga yang selama ini menguasainya secara ilegal karena masuk ke dalam zona hijau Pemprov DKI, dimana kemudian zona tersebut dikembalikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mengadministrasi keadilan sosial dalam mengambil langkah humanis menyelamatkan anak-anak dari lingkungan prostitusi Kalijodo.

4.4.4. Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama terhadap Media

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki sifat yang blak-blakan dan ia mengatakan apa yang harus dikatakan. Dirinya yang tak sungkan untuk menuturkan teguran terbuka baik secara live maupun saat menerima konferensi pers dari wartawan. Dikenal sering berbicara blak-blakan pernyataan yang dikeluarkan kerap menjadi kontroversi. Kata-kata keras tak hanya dilontarkannya saat mengomentari pihak yang menentang kebijakannya, tetapi juga media nasional TV One sudah langganan terkena kritik tajam Ahok.

Selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja kerap kali melayani pertanyaan wartawan di Balai Kota. Namun tidak selamanya pertanyaan wartawan menyenangkan hati Ahok. Ada beberapa isu sensitif yang kerap kali ditanya wartawan dan membuatnya naik pitam tersebut terutama topik mengenai kisruh APBD 2015 yang mengakibatkan konflik dengan DPRD dan juga mengenai relokasi warga yang diduga melanggar HAM.

Pada tahun 2013, Ahok naik pitam dan merasa diadu domba dengan pertanyaan wartawan yang meliputnya terkait relokasi, Ahok merasa media tersebut menggiring opini bahwa Pemprov DKI telah melanggar HAM. Ahok secara terbuka mencecar media TV One milik Aburizal Bakrie yang sedang *live* meliputnya. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap kualitas pertanyaan yang disampaikan wartawan media tersebut dengan bahasa khasnya. Ahok berang saat pertanyaan wartawan TV One, menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan

yang dianggap tidak logis. Kepada salah satu awak media yang bertanya soal hal itu, Ahok meninggikan suaranya:

“...Anda bilang kami melanggar HAM, anda ini pengamat pinter-pinter aja, semalam saya juga dengar di TV One luar biasa sekali fitnahnya itu, memberitakan kami telah membuat sumur resapan dengan dana RP 1,2 miliar, mereka dapat data dari mana?”

“...Semua jalan inspeksi sungai di dudukin, gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 kilometer. Kamu katakan melanggar HAM, makanya kita kejar membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itupun kamu menolak, mengatakan minta ganti 3 juta. **Nenek lo punya tanah apa?**Jadi persoalan kita disitu, kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih kulkas di bilang melanggar HAM. Jadi kita ini ga jelas yang kamu bela siapa? Jadi silahkan pengamat-pengamat yang kasih kritik kami terima, tapi yang masuk akal gitu loh.”

“Dia nuduh kami sumur resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalo gitu. Kita uda buka anggaran, jadi korupsi dari mana? Jadi jangan seolah-olah membangun opini yang hebat gitu loh, kita ada data, semua anggaran kami anda bisa liat di website.”

Wartawan :Semua anggaran di Pemprov Bisa dipertanggung jawabkan?

Ahok: “Anda bisa buka di website sampai lembar ketiga, mana ada provinsi yang lakukan seperti ini, semua gaji saya publikasikan. Jadi itu semua **konyol**, kebakaran bisa saja tambah banyak karena rumah liar makin banyak waktu kita mau **sikat**, melanggar HAM. **Hamburger** yang mau kamu langgar!

Wartawan: Pak Ahok, sebelum anda melakukan aktivitas ini yah, kita cooling down sedikit kalo pagi-pagi pak Ahok semangat membara ini ya?

Ahok: “Bukan membara! Saya marah, terus terang TV One kalo bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Saya ngomong jujur aja kalo gitu, saya tidak suka di politisi. Dan walaupun saya orang politik, saya tidak peduli nama baik saya mau kerja saja.kalo anda tidak senang anda tidak usah pilih kami lagi, anda cari lagi orang yang mau kerja keras, tapi sekarang biarkan kami kerja, anda awasi, anda kasih masukan.

Wartawan: Kita santai dulu ya Pak Ahok, selama setahun bapak memimpin Ibu Kota DKI Jakarta, kira-kira bahasa betawi ini sudah jago belum pak? Coba dong pak sapa pemirsa TV One. Logat betawinya pak

Ahok: “Saya kira tidak usah seperti itu. Logat betawi macam-macam, anda mau pilih logat betawi yang mana. Kalo Tanah Abang mirip melayu, “masi pakai kemane,” jadi anda mau tiru yang mana. Saya kira tidak perlulah begitu.”

Dari argumen tersebut Ahok terlihat geram karena pertanyaan Reporter TV

One melakukan pertanyaan ulangan mengenai transparansi sumur resapan sebesar

1,2 miliar terindikasi korupsi dan Ahok menjawabnya bahwa semua anggaran

sudah transparansi bahkan gajinya bisa di cek di website Pemprov DKI. Namun

reporter tersebut menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya

“Apakah *Semua anggaran di Pemprov Bisa dipertanggung jawabkan?*” Ahok

kembali menjawab namun kali ini ia menaikkan intonasinya menyarankan

reporter tersebut mengecek sendiri melalui website. Walaupun sedang melakukan

live, Ahok secara terbuka melontarkan kritik tajamnya bahwa TV One melakukan

politisasi. Kontennya tidak *fair* dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra

Pemprov DKI dengan melakukan pelanggaran HAM terkait relokasi tanpa

berdasarkan data akurat hal tersebut terlihat dari nada kekesalannya. Argumen

dimaksud diucapkan untuk penekanan kalimat “*TV One kalo bilang jujur ya, suka*

mencari-cari alasan juga. Saya ngomong jujur aja kalo gitu, saya tidak suka di

politisi.”

Melalui kritiknya kepada media, Ahok dengan gayanya yang meledak-

ledak menggunakan kata-kata yang lugas melontarkan kata “fitnah” terhadap apa

yang diberitakan TV One, kata “fitnah: memiliki makna perkataan tanpa

berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud merusak reputasi

seseorang. Terlihat kekesalan Ahok dengan TV One sudah memuncak sewaktu

Reporter mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Ahok menyapa netizen

menggunakan bahasa betawi. Namun Ahok yang sudah terlanjur berang, ia menolak permintaan Reporter tersebut dan segera menyudahi wawancara tersebut.

Penggunaan kalimat konotasi negatif juga terlihat saat ia menyampaikan di media, seperti kata “*nenek lu punya tanah apa?*”, “*kita mau sikat*”, “*Hamburger yang mau kamu dilanggar.*”

Pada tahun 2015 Ahok kembali mengkritik kepada salah satu reporter TV One perihal kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD Jakarta terkait pembahasan APBD. Basuki memperingatkan secara lugas agar TV One “hati-hati” tidak mengambil kesempatan menanyakan pertanyaan titipan hal tersebut dikatakan Ahok karena reporter TV One kerap kali melakukan pertanyaan yang diulang-ulang dan memaksa sehingga narasumber merasa risih. Ungkapan kekesalan tersebut dilontarkan Ahok saat melakukan doorstep di Balai Kota Jakarta:

“Sekarang terbuka toh, itu namanya jebakan Batman ala ahok, sekarang DPRD tidak bisa kamu yang ngetik..kamu yang ngetik (SKPD), sekarang DPRD uda terang-terangan ini versi kami ini yang asli katanya, ini yang palsu jadi itu yang menarik gitu loh. Jadi DPRD sudah berani mengakui versi dia karena dia buat angket buat menekan kami. TV One juga hati-hati juga, gausah cari-cari, pertanyaan-pertanyaan dititipin aku juga sebal dengan TV One makanya aku ga mau hadir (Youtube, 2015).

Dari *scene* di atas makna dan tujuan dari kritikan Ahok kepada Media TV One adalah ingin mengajak netizen berpikir cerdas, kritis terhadap berita yang disampaikan media nasional agar terhindar dari *hoax* atau opini sesat dan meminta TV One tidak hanya mengeluarkan opini namun berita yang disampaikan seharusnya berimbang dengan berdasarkan data. Karena Pemprov sendiri sudah melakukan transparansi data yang di unggah ke website sehingga bisa dicek

kebenarannya. Serta ingin menegaskan bahwa media yang selama ini memojokkan Pemprov DKI yang disebut melakukan pelanggaran HAM saat merelokasi itu tidaklah benar karena Pemprov juga memberikan fasilitas penunjang kepada penghuni rusun yang direlokasi.

4.4.5 Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Terhadap Masyarakat

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempunyai kewajiban membenahi Kota Jakarta sesuai dengan janji kampanya “Jakarta Baru”, sewaktu mendampingi Joko Widodo yang sekarang sudah diusung masyarakat menjadi Presiden Republik Indonesia. Melakukan revolusi kebijakan sering mendapat pro dan kontra di masyarakat terutama kebijakan Reklamasi Pulau di Jakarta dan Relokasi PKL Tanah Abang untuk menertibkan warga yang suka berjualan di pinggir jalan sehingga membuat macet arus lalu lintas.

Meski belum genap 3 tahun menjabat namun sudah banyak programnya yang sudah berjalan. Ahok aktif memberikan tanggapan-tanggapan terkait isu-isu dalam pemerintahan yang sedang dijalankannya sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media. Ruang lingkup Gubernur tidak hanya menata ruangan, tetapi juga menata wilayah darat dan air. Tentunya wewenang ini harus memberikan manfaat bagi rakyat

Salah satunya mengenai relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima). Pihak yang setuju, melihat PKL sebagai penggerak perekonomian kota dan sebagai upaya untuk menyerap lapangan pekerjaan serta menyediakan kebutuhan baik barang dan makanan murah dan mudah dijangkau masyarakat. Di sisi lain, PKL

dipandang sebagai penyakit kota. Keberadaan mereka di fasilitas umum dan fasilitas sosial dinilai merusak estetika kota. Untuk itu Ahok dituntut kritis menanggapi dan memberikan argumen. Hal tersebut sempat disinggung saat Ahok diundang menjadi Narasumber Kick Andy, dalam Acara Metro TV pada tanggal 5 Februari 2016. Dalam penyampaian argumennya Ahok terlihat santai namun sesekali nadanya meninggi dan menekan yang memang menjadi ciri khas Ahok saat beradu argumentasi dengan lawan bicaranya:

“Pemprov DKI sekarang sedang menyiapkan tempat dagang buat para PKL termasuk modal kerja. Kita menyiapkan dari pemerintah pusat kurs 9%, kami 12%, dan 1% perbulan. Kita siapkan 1 Triliun untuk biayain 100.000 PKL, yang terkumpul berapa? Cuma 20.000, mereka ga mau kumpul. Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjaran lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.

(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok, 2016)

Dalam mengungkapkan argumen politiknya mengenai kebijakan Relokasi PKL Pemilihan kata-kata saat berargumen juga berperan penting agar pesan-pesan yang disampaikan tepat sasaran. Dalam argumennya Ahok mengungkapkan kekesalannya kepada penyewa lapak terlihat dalam penggunaan kata “*gue*”, “*lu*” untuk menyebut para preman-preman yang kerap menarik setoran dari PKL. Dan penggunaan kata “*penjarakan*”, tidak kalah provokatif. Ahok ingin menunjukkan akan menindak tegas para penyewa lapak. Hal ini didasari adanya aksi ataupun tuntutan kepada Ahok yang menggunakan atas nama paguyuban atau persatuan.

Pada tanggal 5 Februari 2016 Basuki saat diwawancari di Kick Andy mengenai kebijakannya untuk merelokasi PKL dianggap kontroversi. Tujuan

(motif) dari tindakannya menegaskan perlunya penataan/relokasi PKL karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan menggunakan lahan yang sejatinya sebagai fasilitas umum. Selain itu Pemprov DKI juga menawarkan solusi dengan menyiapkan tempat dagang yang layak dan tertata. Seperti pembangunan pasar IRTI Monas yang dikonsepsikan seperti 129 kios-kios dan 210 gerobak. Dalam argumennya Ahok mengatakan Pemprov DKI sendiri sudah membuat APBN 1 Triliun untuk 100.000 PKL. Alurnya para PKL harus sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Bank DKI sebagai iuran menghindari membayar sewa kepada oknum-oknum yang melakukan pungli dan preman adalah menindas oknum-oknum penyewa lapak.

Tindak tegas yang dilakukan terbukti terhadap pelaku pungli, razia yang dilakukan Satpol PP dengan menangkap preman-preman yang melakukan operasi di tanah abang. Masalah penertiban PKL ini bukan hal baru yang ditangani Ahok, Jika dilihat kebelakang pada awal pemerintahan Ahok sudah sejatinya berani memerangi PKL liar dan Preman-preman yang melakukan pungutan liar. Bahkan dengan vokal mengatakan akan menggunakan strategi dengan istilah “*cara koboi*” dalam argumennya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2014.

“Saya menganggap PKL ini sudah *out of the rule*. Kami juga pakai cara koboi untuk mengatasi mereka. Kayak di film-film Godfather, Chicago. Makanya kita bentuk pasukan penjambret. Habis kita mau minta tolong sama siapa?(Dokumentasi Vivanews,2014)kata Ahok sedikit gamang

”Yang penting jangan anarkis. Jangan melanggar HAM. Nanti Komnas HAM bilang lagi, kita melanggar HAM. Jadi rusak nih

negara, karena terlalu banyak membela orang yang salah”
(Santosa,2015,h.231)

Upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban, perseteruan dengan paguyuban sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 2013. Bermula ketika Haji Lulung menyerang Ahok yang dinilai bicara sembarangan soal PKL Tanah Abang. Lulung selama ini dikenal sebagai tokoh di Tanah Abang dan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan agar Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya karena melontarkan ucapan sembarangan bahwa ada oknum DPRD yang berperan menggerakkan massa di Tanah Abang. Ucapan Ahok terkadang memang tidak sebatas kritik atau teguran. Ia tak jarang menuduh, mengecam, bahkan menantang. Kata-kata Ahok terkadang tak lembut, mengindahkan sopan santun. Sikap inilah yang membakar emosi Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana (Santosa,2015,h.188)

Ahok menjawab, sekelompok pengunjung rasa yang menamakan dirinya Rakyat Jahit Mulut Ahok (Rajjam Ahok). Mereka memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Tanah Abang. Hal tersebut ditayangkan melalui youtube dengan judul “Ahok VS Lulung”:

Ketua Umum Forum Betawi Bersatu:“Saya sikapi bersama teman-teman bukan hanya persoalan PKL dan Haji Lulung, namun juga masalah gaya bapak memimpin Jakarta. Gaya-gaya bapak ini sangat menyakiti masyarakat Jakarta, *statement-statement* bapak tidak menunjukkan sebagai pejabat publik. *Statement* yang menurut saya tidak layak dilakukan di media terbuka. Bapak sebagai pejabat seharusnya mampu menunjukkan intelektual dan bersantun ria.”
Ucap Rahmat, Ketua Umum Forum Betawi Bersatu

Pengunjuk rasa: “Saya sadar bapak adalah seorang pemimpin, dan kami sebagai rakyat mendukung bapak, apabila ada perda/program-program yang bapak jalankan. Saran ke bapak kalau ngomong-hati-hati, mungkin maksud bapak baik ngomong preman, anarkis secara hukum itu betul. Tapi bapak sebagai pejabat ada baiknya menjaga omongan. Bapak boleh turun bersihin tanah abang tapi sebelumnya komunikasi kepada warga, tokoh-tokoh figur” Kata salah satu peserta yang tergabung dalam paguyuban menengahi pembicaraan

Ahok: “Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis. Kenapa PKL toko yang baik dan layak tidak bisa masuk karena kalian kasih harga 20 tahun di muka. Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidak boleh curang, cucu anda juga tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan Tenang (Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Akhir dalam diskusi tersebut, Ahok juga menolak meminta maaf, sebagaimana yang diklaim orang-orang Rajjam Ahok, “mereka meminta saya meminta maaf karena menganggap Haji Lulung tolol. Saya Bilang, saya enggak pernah menganggap Haji Lulung tolol. Saya hanya mengatakan kalau sampai ada anggota DPRD tidak mengerti Perda berarti baru tolol. Pak Haji Lulung kan mengerti Perda, berarti dia tidak tolol dong” (Santosa,2015,h.191)

Melalui Argumen yang dilontarkannya saat forum diskusi dengan tokoh-tokoh betawi tersebut terlihat bahwa Ahok (*agent*) tujuan dari menata PKL dengan cara melakukan relokasinya yaitu *pertama*, sebagai upaya untuk menghindari praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. *Kedua*, sebagai upaya penegakan peraturan daerah yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan menggunakan lahan sejatinya sebagai fasilitas

umum namun digunakan oleh pedagang-pedagang yang selama ini mangkal di sepanjang ruas jalan. Sikap (*attitude*) dibalik itu yang ingin ia tunjukkan bahwa ia konsisten tidak melayani kepentingan konstituen yang melawan, bersebrangan atau tak sejalan dengan kebijakan publik.

Lain halnya dengan Penataan PKL, selanjutnya mengenai argumen kritis

Ahok dalam menanggapi pihak yang kontra terhadap kebijakan Reklamasi yang mencuat ke publik. Reklamasi sejatinya dilakukan dengan bertujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lahan baik dan bermanfaat. Hal itulah yang menjadi dasar argumen Ahok untuk memperbaiki kawasan pesisir teluk Jakarta yang dianggap masih kumuh, kotor dan juga tidak terawat dengan vokal Ahok mengatakan bahwa 100% hasil reklamasi, sertifikatnya menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok menjanjikan tidak akan memberikan sertifikat hasil reklamasi kepada pihak swasta.

“Itu reklamasi tidak menyingkirkan Nelayan, itu kan laut yang memang kotor, dan cara reklamasi dibuatkan pulau dan jaraknya masing-masing pulau jarak 300M jadi kapal tidak bisa lewat, semua hasil reklamasi 100 % sertifikat atas nama DKI, 40% yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Salahnya dimana pak? lagipula izin ini bukan saya yang keluarkan, tapi zaman Pak Harto tahun 1995. Orang ini juga suka salah, izin 17 pulau dikeluarkan tahun 1995 waktu dia minta izin-izin yang lain (Zaman pak Ali sadikin), saya justru minta memperjuangkan keuntungan DKI supaya lebih besar. Salahnya dimana? Saya juga ga ngerti? Merusak lingkungan bagaimana? Lautnya aja sudah kotor begitu, ga ada yang cari ikan disitu pingsan makan logam berat, kalo 300M ketemu ikan pasti sudah kaya sepeti di Belitung.

(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok, 2016)

Berbagai argumen maupun sanggahan terkait kebijakannya melakukan Reklamasi dan Relokasi PKL yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada saat melakukan dialog interaktif, maupun talkshow di televisi. Tidak lain tujuannya memberikan pemahaman bahwa pembangunan pada akhirnya harus bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat dan mensejahterakan rakyat. Jika ditelaah argumen yang disampaikan Ahok sangat lugas, bahasanya tidak bersayap namun tetap memberi penekanan.

Ahok dalam mata najwa memberikan argumen yang kritis dan disertai bukti riil dan seringkali menggunakan kata-kata lugas dan tanpa basa-basi dan bahkan tajam. Kata demi kata yang dilontarkannya di hadapan media. Dalam beberapa kesempatan, Ahok menggunakan kata-kata yang lebih tajam dan kritis untuk mengonseptualkan realitas, Contohnya pada penggunaan kata "*Haram*" daripada "*tidak bisa dilakukan*" sebagai kata denotasi yang mengonseptualkan realitas bahwa relokasi tersebut benar-benar tidak bisa dilakukan, namun argumen yang dilontarkan Ahok cenderung sinisme "ya kita akan banding", "karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram" yang dimaksudkan untuk menyindir, atau menyinggung seseorang atau sesuatu untuk mengekspresikan rasa kesal namun dalam konteks humor, karena nada yang ditunjukkan Ahok sambil tertawa tetapi tetap melakukan penekanan.

"Ya kita akan banding, kenapa? Ya karna dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya? Kalau 50 Tahun yang akan datang tidak reklamasi kelaparan dunia!. Karena tidak cukup tanah lagi, kalo soal pelanggaran lingkungan ya kita selesaikan secara teknis."

(Sumber Dokumentasi: Mata Natjwa, Semua Karna Ahok, 2016)

Argumen kedua yang dilontarkan Ahok masih dengan topik reklamasi, melalui acara Kick Andy pada 5 Februari 2016. Ahok memberikan argumen terkait kebijakan reklamasi dinilai pro orang-orang kaya karena nelayan tersingkir.

Sebagai sanggahannya Ahok mengungkapkan “lautnya aja sudah kotor begitu”, “cari ikan disitu pingsan makan logam”. Menunjukkan kata denotasi untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Ahok menunjukkan realitas menggunakan sindiran dengan tujuan menghaluskan bahasa agar tetap terlihat sopan. Namun tujuannya (motif) dari argumen Ahok sendiri adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa reklamasi sebagai solusi untuk merevitalisasi kawasan laut yang rusak menjadi lebih bermanfaat mengingat meningkatnya jumlah penduduk kota Jakarta secara pesat dengan kebutuhan meningkat tetapi keterbatasan lahan.

“Itu reklamasi tidak menyingkirkan Nelayan, itu kan laut yang memang kotor, dan cara reklamasi dibuatkan pulau dan jaraknya masing-masing pulau jarak 300M jadi kapal tidak bisa lewat, semua hasil reklamasi 100 % sertifikat atas nama DKI, 40% yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Salahnya dimana pak? lagipula izin ini bukan saya yang keluarkan, tapi zaman Pak Harto tahun 1995. Orang ini juga suka salah, izin 17 pulau dikeluarkan tahun 1995 waktu dia minta izin-izin yang lain (Zaman pak Ali sadikin), saya justru minta memperjuangkan keuntungan DKI supaya lebih besar. Salahnya dimana? Saya juga ga ngerti? Merusak lingkungan bagaimana? Lautnya aja sudah kotor begitu, ga ada yang cari ikan disitu pingsan makan logam berat, kalo 300M ketemu ikan pasti sudah kaya seperti di Belitung.

Tidak hanya mengenai pungli, Ahok juga kerap menanggapi kebijakan pemberian izin melakukan reklamasi di DKI Jakarta, tentu banyak pihak seperti

pemerhati lingkungan hidup yang kontra kepadanya karna dianggap pro pada konglomerat. Namun Ahok menegaskan bahwa melakukan reklamasi tersebut adalah untuk kepentingan publik bukan semata-mata untuk memperkaya pengembang. Agar tidak dianggap hanya sekedar Asbun (asal bunyi), Ahok sebagai komunikator yang cerdas, memaparkan secara logis melalui argumennya pada saat diundang di Kick Andy pada tanggal 5 Februari 2016.

“Sepanjang 300M Pulau G dari daratan lautnya sudah tercemar limbah, sampah, sehingga kapal tidak bisa singgah, dan sangat tidak memungkinkan kepada Nelayan untuk menjaring ikan disekitar laut tersebut karna Ikan diduga mengandung logam berat sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi”

“Ditegaskan kembali hasil reklamasi 100% sertifikat atas nama DKI, dan izin tersebut memang sudah keluar sejak zaman Pak Harto tahun 1995”. (Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok, 2016)

Dalam argumennya Ahok menjelaskan bahwa pemberian izin reklamasi bukan suatu hal yang baru bahkan sudah pada zaman Pak Harto. Izin reklamasi merupakan memperjuangkan keuntungan DKI. Topiknya masih sama pada argumen yang sebelumnya ditayangkan di Mata Najwa pada 16 Juni 2016. Najwa

Sihab kembali menanyakan sikap yang akan diambil Ahok mengenai kebijakannya untuk melakukan Reklamasi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan Pulau G tidak bisa di Reklamasi karena gugatan oleh warga dinilai

merusak lingkungan dan melawan hukum. Berikut ini argumen Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan dari Najwa Sihab.

“Ya kita akan banding, karna 50 tahun yang akan datang jika tidak direklamasi maka seluruh dunia akan kelaparan karena tidak akan cukup tanah lagi, jika pelanggaran lingkungan, kita akan atasi secara teknis. Korea Selatan melakukan reklamasi untuk mengatasi ladang

gandum, karena ia mengatasi kekurangan pangan yang akan datang, lalu Singapura, Abu Dhabi, Hongkong, China, Belanda, Eropa. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini sudah diributkan 50 Tahun lalu di Belanda”.

(Sumber Dokumentasi: Mata Najwa, Semua Karna Ahok, 2016)

Melalui argumen di atas secara eksplisit meminta masyarakat untuk lebih kritis berpikir jauh ke depan. Memang hasil reklamasi yang akan dilakukan sekarang memang tidak bisa langsung dinikmati namun akan menjadi aset generasi selanjutnya karena semakin cepatnya lonjakan jumlah manusia, kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat. Untuk itu Ahok juga menyarankan masyarakat untuk mencoba berkaca dengan Negara maju seperti Singapura, Abu Dhabi, Hongkong, dan bahkan sebagian besar lahan di Belanda adalah hasil reklamasi yang dipergunakan untuk menanam gandum.

BAB V

PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik Genre *Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjhaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, ”maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.



Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

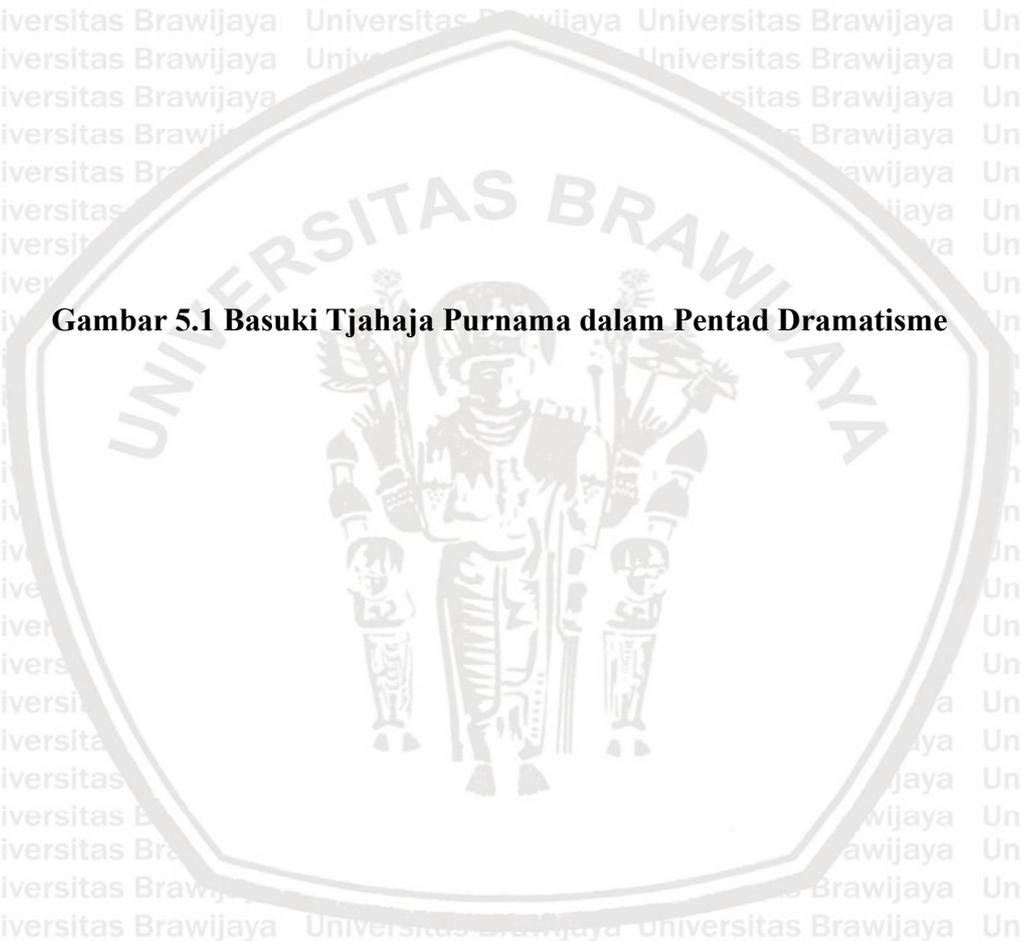
Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapkan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicaraannya, meskipun tidak mengucapkannya secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner, 2010, h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno, 2011, h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner, 2013, h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009, h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper, 1979, h.132).



Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis



pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masi terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup beresalan karena prilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah,2010,h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukkan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya.

Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhi Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Suplay (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggaga alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepengurusan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jejaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalannya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunist yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai 'kutu loncat'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karna partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunist tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno, 2012, h. 115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitaman (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*.

Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*.

Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya.

Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasaan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyupan Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan.

Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

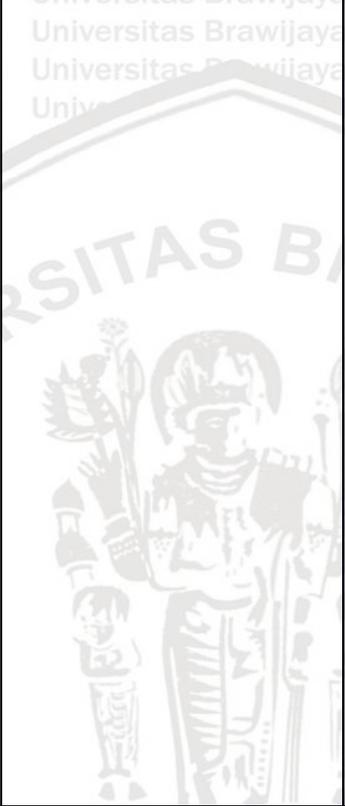
“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat*

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindarai	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	<p>berlindung dibawah naungan pemerintah.</p>	<p>kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat</p>	
<p>2.</p>	<p>Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i>.</p>		
<p>3.</p>	<p>Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di</p>		



PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik Genre *Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjhaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, ”maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.



Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapkan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicaraannya, meskipun tidak mengucapkannya secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner, 2010, h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno, 2011, h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner, 2013, h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009, h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper, 1979, h.132).



Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis



pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masi terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup beresalan karena prilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah,2010,h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukkan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya.

Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhi Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Suplay (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggaga alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepengurusan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jeaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalannya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunistis yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karna partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunistis tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno, 2012, h. 115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitaman (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*.

Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*.

Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya.

Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasaan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyupan Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan.

Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

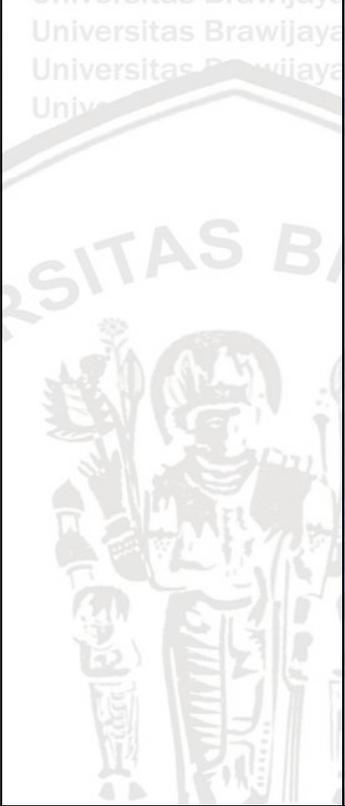
(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat*

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindari	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.



	<p>berlindung dibawah naungan pemerintah.</p>	<p>kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat</p>	
<p>2.</p>	<p>Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i>.</p>		
<p>3.</p>	<p>Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di</p>		



PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik Genre *Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjhaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, ”maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.



Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapkan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicaraannya, meskipun tidak mengucapkannya secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner, 2010, h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno, 2011, h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner, 2013, h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009, h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper, 1979, h.132).



Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis



pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masi terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup beresalan karena prilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah,2010,h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukkan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya.

Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhkan Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Suplay (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada Lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang benar bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepemimpinan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jeaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalannya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunist yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karna partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunist tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno, 2012, h. 115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitaman (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*.

Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*.

Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya.

Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasaan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyupan Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan.

Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

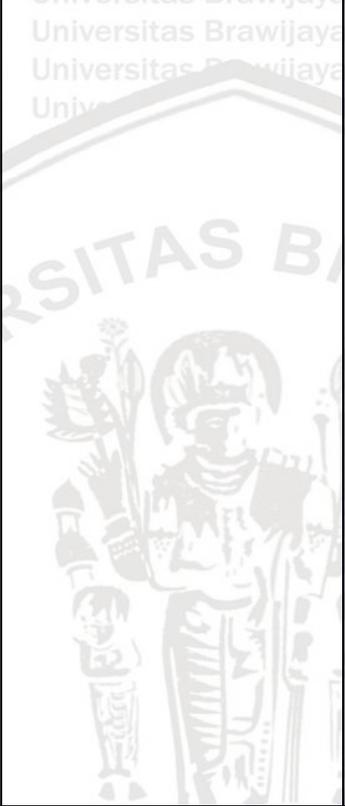
“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat*

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindari	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	<p>berlindung dibawah naungan pemerintah.</p>	<p>kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat</p>	
<p>2.</p>	<p>Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i>.</p>		
<p>3.</p>	<p>Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di</p>		



PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik Genre *Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjhaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, ”maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.



Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapkan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicaraannya, meskipun tidak mengucapkannya secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner, 2010, h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno, 2011, h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner, 2013, h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009, h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper, 1979, h.132).



Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis



pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masi terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup beresalan karena prilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah,2010,h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukkan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya.

Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian.

Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhi Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Suplay (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggaga alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepengurusan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jeaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalannya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunist yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karna partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunist tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno, 2012, h. 115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitaman (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis” (Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*.

Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*.

Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya.

Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasaan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyupan Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan.

Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidak boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”
(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat*

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindarai	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	<p>berlindung dibawah naungan pemerintah.</p>	<p>kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat</p>	
<p>2.</p>	<p>Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i>.</p>		
<p>3</p>	<p>Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di</p>		

lapisan masyarakat

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai studi komunikasi politik yang meneliti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pendekatan genre *political actor and rhetoric* dalam perspektif dramatisme semenjak ia meniti karir politik hingga menjadi gubernur DKI Jakarta di dapat simpulan-simpulan yang menarik, tetapi juga dapat dipahami sebagai pelajaran yang berharga bagi kehidupan politik, berbangsa dan bernegara. Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai politisi yang vokal merupakan salah satu *political actor* yang konsisten dalam mengembangkan argumen-argumen terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Kekhasan retorika Ahok juga terletak pada tindakan dan penggunaan bahasanya yang tajam, lugas, spontan, serta ceplas-ceplos sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Dari perspektif dramatisme dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009,h.7). Dalam panggung perpolitikan di Indonesia, tindakan (*act*) dan agensi (*agency*) yang dilakukan oleh Ahok ialah penonjolan karakter yang tegas serta penggunaan bahasa yang lugas. Hal ini sejalan dengan Burke bahwa manusia memanipulasi simbol. Budaya transparansi, penegakan hukum, dan yang diterapkan Ahok pun membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung sehingga menimbulkan *clash of argument*, untuk itu dalam penelitian ini juga menampilkan dialog serta respon pihak-pihak sebagai lawan bicara. Sehingga politik bisa dijadikan kontes

persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Tujuan (*purpose*) yang hendak dicapai oleh Ahok yakni menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang berlandaskan pada pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

6.2 Proposisi

1. Sesuai dengan pernyataan Burke bahwa manusia merupakan hewan yang menggunakan simbol, bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia (West & Turner, 2013). Motif tindakan dari pemakaian simbol-simbol dapat memberikan gambaran dan kondisi objektif yang mempengaruhi motif-motif lain. Dalam hal ini bahasa digunakan oleh Basuki Tjahaja Purnama merupakan sebuah simbol dari karakter dirinya sebagai aktor politik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di PPIB di Belitung Timur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta memegang teguh nilai-nilai bersih, transparan dan profesional yang Ahok sampaikan dalam berbagai argumen politiknya di televisi.
2. Dramatisme ditandai dengan situasi yang melibatkan kontestasi argumen. Hal ini terlihat ketika Ahok berbalas argumen dengan Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana dan Kader Partai Gerindra. Melalui kejadian-kejadian itu, suatu konteks tertentu (*scene*) Basuki Tjahaja Purnama sebagai aktor yang dilingkupi dari wacana-wacana yang berbeda dari pihak yang pro dan kontra. Hal ini ditunjukkan oleh tindakan (*act*) serta *agency* Basuki Tjahaja Purnama dalam menyampaikan argumen kritisnya yang terkadang bersebrangan dengan pandangan politiknya.
3. Dramatisme sebagai kajian retorika baru bukan lagi terfokus pada instrumen persuasi namun salah satunya ialah identifikasi. Mengenai identifikasi dan substansi berhubungan dengan siklus penebusan rasa bersalah. Bagi Burke proses rasa bersalah dan penebusan

mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Dalam penelitian ini Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di daerahnya Belitung Timur.

4. Bagi Burke, ketika orang menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tersebut (Nimmo,2006,h.95). Dalam dramatisme bahwa bahasa sebagai sesuatu yang penting karena ia merupakan *the art of delivery*. Gaya bahasa Ahok kerap kali mengandung sarkasme jika ingin menyudutkan lawan tujuannya sebagai penegasan untuk memperkuat makna. Hal ini sangat kontras saat Ahok dengan 'blak-blakan' men-counter argumen Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana alias Lulung. Namun argumen-argumen Ahok akan serius dan lugas jika berhubungan dengan hal-hal terkait teknis dan substansial.

6.3 Saran

1. Penelitian semacam ini perlu dikembangkan dalam kajian komunikasi politik, terutama dalam *genre political actor and rhetoric*. Hal ini dikarenakan penelitian dalam ranah tersebut masih sangat sedikit.
2. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis retorika Basuki Tjahaja Purnama melalui beberapa data yaitu, teks dari Buku autobiografinya, Gatra, Tempo, dan tayangan yang menampilkan Basuki Tjahaja Purnama. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat menganalisis tokoh-tokoh politik lainnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan berupa wawancara langsung dengan keluarga atau kerabatnya supaya mendapatkan kedalaman dan kekayaan data.
3. Penelitian yang menggunakan dramatisme analisis pentad perlu dikembangkan lagi pada bagian elemen sikap (*attitude*). Hal ini dikarenakan jumlah penelitian yang

menggunakan metode kajian ini serta menggunakan analisis *attitude* umumnya masih *scene, agent, act, agency, purpose*.

4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji berbagai macam tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di Indonesia.

Dengan ini diharapkan retorika lokal khas Indonesia akan ditemukan seiring bertambahnya penelitian dalam kajian yang sama.

5. Penelitian ini dengan menggunakan analisis pentad diharapkan menjadi awal bagi penelitian dramatisme selanjutnya dengan menggali dimensi lain dari Dramatisme

Kenneth Burke yang dihubungkan dengan pendekatan kritis.

6. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada para politisi di Indonesia agar lebih meningkatkan kualitas diri serta lebih inovatif di Indonesia agar lebih meningkatkan kualitas diri serta lebih inovatif dalam menyeleksi serta menggunakan bahasa atau kata-kata agar retorika dari pesannya tersebut dapat tersampaikan secara efektif dan persuasif kepada khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, Anwar. (2006). *Komunikasi Politik: Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Nimmo, D. (1993). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (7th ed)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Effendy, O. U. (1993). *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Denzim & Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: Thousand Oaks Sage Publication

Gergen, David. (2000). *Eyewitness to Power: The Essence of Leadership Nion to Clinton*. New York: Simon & Chusters

Firmanzah. (2008). *Marketing politik: Antara pemahaman dan realitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Griffin, E. M. (2005). *A First Look at Communication Theory (5th Ed)*. London: McGraw-Hill Companies.

Junaedi, F. (2013). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi, dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Alfian, M. A. (2016). *Mengapa Politik Menarik: Memperbincangkan Urgensi Kepemimpinan Politik*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati.

Santoso, A. (2015). *Hargaku adalah Nyawaku; Basuki Tjahaja Purnama Berani Mati Demi Konstitusi dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan, Markus. (2013). *Ahok: Kobo Jakarta Baru*. Jakarta: Visimedia.

Suyanto, B. (2005). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta; Prenada media

Kaid, L. L. (2004). *Handbook of political communication research*. USA: Lawrence Erlbaum Associate.

Levine, Deena., R&Mara, B., Adelman. 1993. *Beyond language: Cross Cultures Communication* (2th ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Neuman, W.L., (2013). *Metode penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks

Qadaruddin, Muhammad (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish

McNair, Brian. (2011). *An Introduction To Political Communication* (5th ed). New York: Routledge

Littlejohn, S.W. (2008). *Theories of Human Communication* (9th ed). Jakarta Selatan: Salemba Humanika

Qadaruddin, Muhammad (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish

West, R. & Turner, L.H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi*. Buku 1 Edisi Ke 3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika

Jurnal :

Atwater, Deborah.F. (2007). *Senator Barack Obama: The Rhetoric of Hope and the American Dream*. Vol.38, No.2

Hunt, E.L. (2009). *Plato on Rhetoric and Rhetoricians*. *Quartely Journal of Speech*. 33-53

Hasan, K. (2009). *Komunikasi Politik dan Pencitraan (Analisis Teoritis Pencitraan Politik di Indonesia)*. Vol.2, No.4. h.1-22

Jacobs, L. (2017). *Burke's Dramatism Framework: A Lens to Analyse Bullying*. Vol.15, No.6, h.195-201.

Koehn, V.L. (2011). *Ethical Elitism: A Burkean Analysis of The Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W. Bush* (Disertasi Doktoral, University of Denver). Diakses peneliti dari *Proquest Digital Dissertations*. Vol.15, No.6, h.195-201

Ivie, R.L. (2009). *The Complete Critism of Political Rhetoric*. *Quartely Journal of Speech*. Vol.73, No.1, h.98-107

Soukup, A.P. (2014). *Communication Research Trends: Political Communication*. Vol.33, No.2, h.2-43

Rahmanadji, D. (2007). *Sejarah, Teori, Jenis, dan Fungsi Humor*. Vol.35, No.2, h.1-9

Xiaoyan, L & Street, N.L. (2009). *The Analysis of Senator Barack Obama's Speech on Race by Kenneth Burke's Idea of Dramatism*. Vol.7, No.1, h.83-92

Schultz,P.D.(2011).*A Rhetoric of Retribution and Redemption: Burke's terms for order in the drama of child sexual abuse. International Journal of Law and Psychiatry.*Vol.34, h.168-176

Bourgonjoun,J.,Rutten,K.,Soetart,R.,Valcke,M.(2011).*From Counter-Strike to Counter-Statement: Using Burke's pentad as a tool for analysing video games.*Vol.22, No.2, h.91-102

Smudde & Courtright.(2011) *A holistic approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation.* Vol.37, No.2, h.137-144

Wilson,N.A.(2008). *Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy.*

Skripsi:

Suparno,B.A.(2010). Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Massad.(2014). Gaya Komunikasi Menghadapi Resistensi Kebijakan Analisis Wacana Kritis Pernyataan-pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Menghadapi Penolakan Kebijakan Penertiban PKL di Pasar Tanah Abang

Safitri,D.(2014). Linguistik Politik dan Persuasi Politik "Capres Boneka" dalam Perspektif Dramatistik Kenneth Burke. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

Hanum.(2016). Dari Aktivistis Kampus Menuju Gedung Parlemen (Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* tentang Fahri Hamzah). Malang: Universitas Brawijaya

Melinda,D.(2016). Tokoh Berpengaruh Dunia Versi Majalah Time Tahun 1958 (Kajian Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tentang Presiden Soekarno). Malang: Universitas Brawijaya

Yusuf,M.(2016).*The Grand Old Man* (Studi Retorika Dramatime tentang Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric*). Malang:Universitas Brawijaya

Sumber Lain:

Gatranews.(2013). Ahok dan Nur Pamudji Terima Bung Hatta Anti Corruption Award. Diakses pada 27 Februari 2017, dari (<http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/41781-ahok-dan-nur-pamudji-terima-bung-hatta-anti-corruption-award.html>)

Kompas.(2015). Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan. Diakses pada 23 Maret 2017, dari (<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/25/17432131/Ahok.Bongkar.Ajuan.Anggaran.Siluman.DPRD.di.Dinas.Pendidikan>)

Kompas.(2015). Ahok Anggaran Siluman DPRD ada di Semua SKPD. Diakses pada 23 Maret 2017, dari (<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/07410421/Ahok.Anggaran.Siluman.DPRD.Ada.di.Semua.SKPD>)

CNN.(2015). Mediasi Ahok-DPRD Buntu, Dewan; Gubernur Preman. Diakses pada 24 Maret 2015, dari (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150305122022-20-36926/mediasi-ahok-dprd-buntu-dewan-gubernur-preman/>)

Kompas (2016). Kekesalan Ahok terhadap Dinas Pertambangan sampai Terbawa Mimoi. Diakses pada 01 April 2016, dari (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/10/09471181/Kekesalan.Ahok.terhadap.Dinas.Pertambangan.sampai.Terbawa.Mimoi?page=all>)

Detiknews.(2015). Kronologi Ahok VS DPRD dari Dana Siluman sampai Hak Angket. Diakses pada 31 Maret 2017, dari (<http://news.detik.com/berita/2844167/kronologi-ahok-vs-dprd-dari-dana-siluman-sampai-hak-angket>)

Kuwado.J.F.(2014). Jokowi Apresiasi Ahok Keluar dari Gerindra. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/10/14125661/Jokowi.Apresiasi.Keberanian.Ahok.Keluar.dari.Gerindra>

Cahya,D.K.(2015). Alasan Nasdem, Tak Ikut Usung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/12402911/Alasan.Nasdem.Tak.Ikut.Usung.Hak.Menyatakan.Pendapat.terhadap.Ahok>

Purba,O.D.(2016). Ratna Sarumpaet KPK Menutupi Kebenaran Soal Sumber Waras. Diakses pada 28 Juni 2017. Dari, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/20/18000381/ratna.sarumpaet.kpk.menutupi.kebenaran.soal.sumber.waras>

Merdeka.(2016). Diakses pada 29 Juni 2017 <https://www.merdeka.com/jakarta/perang-urat-syaraf-ahok-dan-daeng-aziz-soal-kaljodo/daeng-aziz-jangan-saya-dipaksakan-untuk-melawan.html>